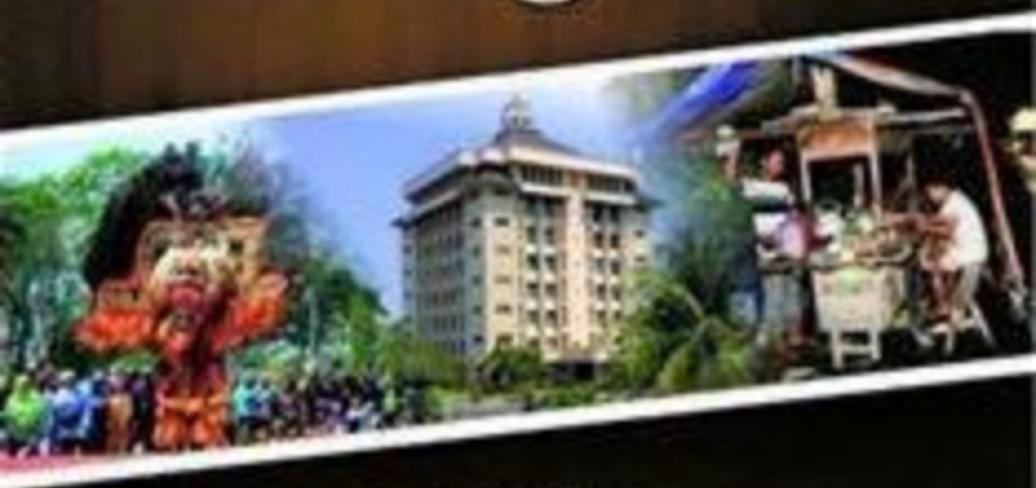


Drs. Jusuf Harsono, M.Si
Slamet Santoso, SE, M.Si

Sosiologi Masyarakat Ponorogo



Penerbit UMPO Press

Drs. Jusuf Harsono, M.Si
Slamet Santoso, SE, M.Si

Sosiologi Masyarakat Ponorogo

Penerbit UMPO Press

SOSIOLOGI MASYARAKAT PONOROGO

Drs. Jusuf Harsono, M.Si
Slamet Santoso, SE, M.Si



Hak Cipta © 2013, Penerbit Umpo Press
Jalan Budi Utomo Nomor 10
Ponorogo – 64471
Telp. (0352) 481124, 487662
Faks. (0352) 461796
E-mail : lppm@umpo.ac.id

ISBN : 978-602-97947-1-7

Cetakan Pertama : Juli 2013
Cetakan Kedua : Agustus 2016

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotocopy, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
 - 2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
-

KATA PENGANTAR

(Cetakan Kedua)

Buku Sosiologi Masyarakat Ponorogo Cetakan Kedua ini merupakan upaya pemenuhan kelengkapan dari cetakan pertama yang sudah terbit pada bulan Juli 2013. Penataan ulang yang mengarah pada pengelompokan bidang kajian telah dilakukan dalam buku ini, disamping adanya tambahan artikel ilmiah yang bersumber dari hasil penelitian hibah bersaing maupun penelitian fundamental yang didani oleh Ditjen Kemenristek dan Dikti Republik Indonesia.

Dalam buku ini penulis mengelompokkan artikel menjadi tiga kelompok bidang kajian, yaitu Sosiologi Ekonomi, Sosiologi Budaya, dan Sosiologi Politik. Pengelompokan ini dimaksudkan agar para pembaca lebih mudah memahami atau melakukan pemetaan bidang kajian, sehingga akan memudahkan menemukan ide untuk melakukan penelitian selanjutnya.

Besar harapan kami semua tulisan artikel ini akan bermanfaat untuk menambah khasanah kajian bidang ilmu sosiologi – sosiologi ekonomi, politik, dan budaya – maupun bahan diskusi untuk memperdalam bidang kajian dimaksud. Semua saran dan masukan akan penulis terima dengan terbuka untuk penyempurnaan di masa akan datang.

Ponorogo, 5 Agustus 2016
Penulis

KATA PENGANTAR

(Cetakan Pertama)

Semakin banyak suatu daerah dikisahkan atau diceritakan dalam bentuk tertulis oleh banyak orang dalam berbagai perspektif maka semakin banyak pula orang yang ingin mengetahui daerah itu. Buku ini setelah lama sekedar menjadi angan-angan maka akhirnya dengan seijin Allah SWT bisa diterbitkan. Buku ini diharapkan bisa memberikan informasi lebih banyak tentang kota Ponorogo dari kaca mata sosiologis. Buku ini merupakan kumpulan hasil penelitian dan tulisan yang sebelumnya pernah dipublikasikan diberbagai media, baik jurnal ilmiah maupun media massa lainnya termasuk tulisan yang dipresentasikan dalam seminar yang telah disesuaikan. Buku ini perlu dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dan kalangan manapun dalam memahami persoalan-persoalan atau fenomena sosiologis yang begitu kompleks dan dinamis yang terjadi di kota Ponorogo mulai fenomena sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Potensi kota Ponorogo yang sangat luar biasa ini perlu disampaikan secara ilmiah agar masyarakat pembaca mengetahui secara lebih pasti tentang potensi-potensi dari Ponorogo termasuk diantaranya adalah potensi kerawanan, polarisasi, konflik, perdamaian, dan perkembangan.

Tentu saja buku ini masih jauh dari kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang sebenarnya dari kota Ponorogo. Saran dan kritik pembaca tentu akan menjadi sangat berharga bagi penulis untuk melakukan perbaikan pada masa mendatang.

Ponorogo, 15 Juli 2013
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR (Cetakan Kedua)	iii
KATA PENGANTAR (Cetakan Pertama)	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
PENDAHULUAN	1

BIDANG SOSIOLOGI EKONOMI

PEDAGANG ANGKRINGAN DI KOTA PONOROGO	5
Sektor Informal dan Solidaritas	8
Modal Sosial, N. Ach, dan Mobilitas	14
Pola Solidaritas Kelompok Pedagang Angkringan	17
Pola Mobilitas Kelompok Pedagang Angkringan	22
Daftar Pustaka	24
TENAGA KERJA INDONESIA ASAL KOTA PONOROGO	27
N. Ach, Mobilitas, dan Konsumerisme TKI	28
Mobilitas Tenaga Kerja Indonesia	31
Daftar Pustaka	37
PENGUSAHA MUSLIM PERKOTAAN DI KOTA PONOROGO...	39
Etika Protestan dan Etos Kerja Kaum Santri	41
Etos Kerja dan Survivalitas	45
Perilaku Ekonomi dan Solidaritas Konsumen	46
Pengusaha Muslim Perkotaan di Ponorogo	47
Daftar Pustaka	56

SWADAYA MASYARAKAT	59
Kelemahan Program Penanggulangan Kemiskinan	61
Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	63
Swadaya Masyarakat dalam Program P2KP	67
Daftar Pustaka	71

BIDANG SOSIOLOGI POLITIK

WAROK; PEMIMPIN INFORMAL LOKAL PONOROGO

YANG TERLUPAKAN	73
Pertanyaan Siapa Warok	74
Peran Sosial	74
Peran Politik	75
Menjadi Agen Pembangunan	76
Warok di Era Sekarang	77
Penutup	78
Daftar Pustaka	79

AMBIGUITAS INTEREST GROUP DAN PARTISIPASI

POLITIK SEMU DALAM PILKADA PONOROGO TAHUN 2015	81
Pendahuluan	81
Konfigurasi Politik Saat Pilkada	82
Ambiguitas Ormas	83
Sikap Para Warok	85
Birokrasi Sebagai Mesin Politik	85
Politik Uang dan Partisipasi Politik Semu	86
Penutup	88
Daftar Pustaka	90

DINAMIKA PERUBAHAN STRUKTUR SOSIAL

PARA WAROK PONOROGO	91
Dinamika Fungsi Seni Reyog	93
Dinamika Peran Warok	95
Mobilitas Vertikal Para Warok	97
Mobilitas Horisontal Para Warok	99
Daftar Pustaka	100

ETIKA DAN MORAL POLITIK MENYONGSONG	
PILKADA BUPATI PONOROGO TAHUN 2010	101
Filsafat Etika dan Moral Politik	101
Karakter Masyarakat Ponorogo	102
Dinamika Politik Ponorogo	103
Potensi Kerawanan	104

BIDANG SOSIOLOGI BUDAYA

MAKNA 1 SURO BAGI MASYARAKAT PONOROGO	106
Fenomena Ekonomi	108
Fenomena Sosial Budaya	109
Fenomena Religi	111
Fenomena Sejarah Politik	113
Penutup	116
Daftar Pustaka	117
PENURUNAN STATUS KOTA PONOROGO	
(dari Kota Juragan Menuju Kota Para Pedagang dan Buruh)	118
Industri Batik Ponorogo	119
Tenaga Kerja Indonesia	120
Penutup	123
Daftar Pustaka	124
BIOGRAFI PENULIS	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Lokasi Usaha Pedagang Angkringan	6
Gambar 2.	Ciri Khas dan menu yang Disajikan di Angkringan	7
Gambar 3.	Pola Solidaritas Kelompok Pedagang Angkringan	20
Gambar 4.	Pola Mobilitas Kelompok Pedagang Angkringan	23
Gambar 5.	Pola Mobilitas Para TKI dari Ponorogo	34
Gambar 6.	Survivalitas Masyarakat Muslim Perkotaan Ponorogo	55
Gambar 7.	Beberapa Pelaksanaan Kegiatan Program P2KP	69
Gambar 8.	Kegiatan Kirab Pusaka dalam Perayaan Grebeg Suro	107
Gambar 9.	Barbagai Kegiatan Eonomi dalam Perayaan Grebeg Suro	109
Gambar 10.	Festival Reog Nasional di Panggung Utama Aloon-Aloon Ponorogo	110
Gambar 11.	Larung Sesaji di Telaga Ngebel	114

PENDAHULUAN

Ponorogo adalah kota yang mempunyai daya tarik bila dilihat dari berbagai perspektif. Kota ini adalah kota yang paling dinamis di belahan Jawa Timur bagian barat. Memahami kota ini dan masyarakatnya akan lebih baik bila dipandang dalam beberapa perspektif :

1. *Secara ekonomis* kota ini adalah kota yang sangat prospektif di bidang perdagangan karena masyarakat kota ini mempunyai daya beli yang cukup tinggi diantaranya karena kota ini adalah salah satu kantong TKI pada masa kini sementara pada pada tahun 1950-an kota ini merupakan salah satu kota penghasil kain batik di Pulau Jawa selain Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan. Sektor informal berkembang dengan pesat terutama yang berkaitan dengan penjaja makanan ringan seperti kue putu, martabak, pisang goreng dan lain-lain. Bahkan beberapa tahun terakhir telah menjamur adanya warung kopi angkringan yang sebagian berasal dari luar kota seperti dari Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, dan lain-lain yang dalam prakteknya mereka berjualan pada sore sampai tengah malam dan hal ini yang menjadikan kota Ponorogo menjadi sangat hidup di malam hari.
2. *Secara Politik* kota ini merupakan barometer politik di Jawa Timur bagian barat atau juga dikenal sebagai daerah Mataraman. Kota ini adalah kota yang paling sibuk dengan urusan-urusan politik bahkan elit politik pusatpun sering mengunjungi kota ini untuk urusan-urusan partai politiknya. Dalam sejarah pemerintahan RI sejak Orde baru berkuasa belum ada Presiden RI yang tidak pernah berkunjung ke kota ini terutama ke Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Perpolitikan di kota ini tidak pernah bisa diduga (Jusuf, 2009).

Pemenang Pemilu tahun 2004 adalah PDIP tetapi partai ini gagal mengantarkan kader terbaiknya untuk menjadi Bupati sementara itu yang menjadi Bupati justru kader dari PKB yang merupakan partai menengah. Demikian pula pada tahun 2009 PDIP kembali memenangkan Pileg dan menguasai DPRD namun kembali gagal mengantarkan kader terbaiknya menjadi Bupati pada Pemilu tahun 2010 sementara yang berhasil mengantarkan kadernya sebagai Bupati Ponorogo adalah Partai Golkar. Partai Demokrat yang tahun 2004 dan tahun 2009 berhasil mendapatkan suara terbanyak di Ponorogo untuk menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI juga gagal menjadi kendaraan Politik untuk mengantarkan seseorang menjadi Bupati Ponorogo pada Pemilu tahun 2005 dan tahun 2010.

3. *Secara sosial budaya* kota ini mempunyai dua predikat sekaligus yaitu sebagai kota santri, karena kota ini mempunyai puluhan pondok pesantren, serta disebut sebagai kota reyog, karena dari kota inilah asal kesenian reyog yang diakui Unesco sebagai kota asal mula “*The Biggest Mask Dance*”. Dua predikat ini nampaknya juga mempengaruhi terbentuknya kelompok-kelompok social di masyarakat dan berpotensi terjadinya polarisasi sosial antara kelompok *santri* dan *abangan* karena kedua kelompok tersebut mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang sangat bertentangan.
4. *Secara Historis* kota ini dikenal sebagai kota tua karena sudah ada sejak abad ke 15 dan dikenal sebagai kota yang mempunyai hubungan erat dengan sejarah beberapa kerajaan besar di Pulau Jawa, seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Mataram. Dalam perang kemerdekaan daerah ini juga merupakan salah satu wilayah penting dalam perang gerilya yang dipimpin Jendral Sudirman dalam melawan pasukan Belanda. Keberadaan masjid tua Ki Ageng Besari adalah simbol pentingnya peran sejarah kota ini dalam proses penyebaran Islam di Indonesia, karena Ki Ageng Besari adalah ulama besar pada abad 15 yang diduga mempunyai keturunan menjadi pembesar-pembesar di Kerajaan Mataram dan Negara Republik Indonesi.

Berbagai fenomena di depan telah membentuk karakteristik asli masyarakat dari: *sederhana, lugu, berani, jujur, keras, religius dan statis* menjadi: *sangat konsumtif, dinamis dan agresif*. Pada beberapa tahun terakhir banyak dijumpai adalah konflik politik di kota ini baik secara horisontal antar elit, antar kelompok massa maupun antara massa dengan elit politik berupa unjuk rasa ditujukan oleh masyarakat terhadap Bupati maupun pada DPRD. Awal tahun 2000-an kota ini sempat dilanda konflik horisontal yang melibatkan dua kelompok massa dua perguruan silat yang menciptakan suasana mencekam di masyarakat. Diduga konflik ini dikondisikan oleh penguasa daerah tahun tersebut sebagai pengalih perhatian atas dugaan adanya praktek korupsi yang dilakukan oleh sang Kepala Daerah saat itu.

Masyarakat Ponorogo sebelumnya dikenal sangat statis dikarenakan mereka sebagian besar berprofesi sebagai petani. Sebagaimana pada umumnya petani mempunyai karakter statis Hal ini dimungkinkan mereka rata-rata tidak berani ambil resiko dalam berinovasi baik ketika mengolah tanah maupun ketika bercocok tanam. Akhirnya sikap statis ini berlanjut pada aspek kehidupan yang lainnya. Perkembangan berikutnya menunjukkan adanya perubahan cara pandangnya terhadap kehidupan karena sebagian keluarga petani berubah profesi menjadi pekerja. Anak-anak mereka mulai tidak lagi menekuni profesi para orangtua mereka. Mereka mulai memilih profesi sebagai tenaga kerja di luar negeri baik sebagai pembantu rumah tangga, terutama para perempuan, maupun sebagai tenaga kerja industri dengan berpenghasilan lebih banyak dan berstatus social lebih baik. Perbedaan profesi ini nampaknya ikut membantu merubah karakter dan gaya hidup dari yang semula statis menjadi dinamis, dari yang sederhana menjadi sangat konsumtif.

Karena masyarakat Ponorogo adalah masyarakat yang sangat dinamis dalam seni budaya maka keberadaan seni reyog pun tidak bisa hanya dipahami dalam perspektif budaya saja karena keberadaan seni yang satu ini juga menarik sebagai fokus kajian dalam bidang ekonomi, religi, sosial, dan politik. Demikian juga dengan keberadaan Pondok Pesantren yang berjumlah puluhan tersebut bisa menjadi obyek kajian yang menarik dalam bidang ekonomi, budaya, social, dan politik karena

keberadaannya memang sangat berpengaruh terhadap banyak hal. Kedua hal tersebut bisa menjadi faktor penting ketika kita bicara tentang ekonomi, sosial-budaya, dan politik di kota ini. Kedua hal tersebut mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap eksistensi kota Ponorogo yang berpenduduk sekitar 700 ribu ini.

PEDAGANG ANGKRINGAN DI KOTA PONOROGO ¹

Keberadaan warung Angkringan menjadi tidak asing bagi masyarakat yang suka begadang dan ngobrol di warung kopi pada malam hari, namun bagi masyarakat yang belum atau tidak pernah ke Angkringan akan sedikit kesulitan untuk membedakannya antara warung Angkringan dengan warung kopi lesehan, yang sama-sama sudah menjamur di Kota Ponorogo.

Pedagang Angkringan mayoritas bukan berasal dari kota Ponorogo melainkan dari kota-kota di wilayah Propinsi Jawa Tengah, yaitu berasal dari Kabupaten Klaten, Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri, dan Yogyakarta. Dalam menjalankan usahanya menggunakan sebuah gerobak dari kayu dan pada malam hari menggunakan lampu kecil dengan bahan bakar minyak tanah (orang Jawa menyebut *lampu thinthir* atau *teplok*) untuk penerangan. Mereka menjajakan makanannya mulai selepas sore (sekitar jam lima sore) sampai menjelang dini hari (sekitar jam satu sampai dengan jam dua malam). Biasanya pedagang Angkringan memarkir gerobaknya di trotoar jalan kemudian menutupi bagian depan dengan terpal mulai dari atap gerobak sampai ke tanah, mirip sebuah tenda. Di dalam tenda dan di setiap sisi gerobak Angkringan dipasang bangku untuk tempat tempat duduk pembeli, sedangkan disekitarnya dibersihkan dan disediakan

¹ Tulisan ini bersumber dari hasil penelitian yang berjudul: *Pola Solidaritas dan Mobilitas Kelompok Pedagang Angkringan di Kota Ponorogo* (Slamet Santoso dan Jusuf Harsono), Penelitian Fundamental dibiayai oleh Ditjen Dikti, Kemendikbud RI, sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Nomor : 0046/SP2H/PP/K7/KL/II/2012 dan 023/SP2H/PDSTR/L/K7/KL/II/2013.

tikar plastik bagi pembeli yang suka duduk di bawah atau lesehan (gambar 1).



Gambar 1. Lokasi Usaha Pedagang Angkringan

Di dalam gerobak pada bagian kanan terdapat kompor arang untuk memanaskan air dan di atasnya terdapat tiga teko besar. Tiga teko besar tersebut sebagai ciri khas dari Angkringan dan menjadi pembeda dengan warung kopi lesehan (pedagang asli Ponorogo). Tiga teko besar tersebut satu berisi air putih yang dididihkan, satu berisi wedang jahe dan satunya lagi berisi wedang teh. Di bagian kiri ketiga teko besar tersebut, biasanya diisi dengan bungkusan nasi, lauk seperti *ceker* (kaki ayam), tempe dan tahu bacem serta beberapa jenis sate, seperti sate usus dan sate telur puyuh. Nasi bungkus yang disediakan biasanya disebut *sego kucing*, karena memang isinya relatif lebih sedikit, berupa nasi dengan sambal teri atau nasi dengan racikan tempe goreng (gambar 2).

Sisi gerobak sebelah belakang (dekat dengan pedagang) biasanya digunakan untuk tempat sendok, berbagai rokok eceran, tempat gula dan kopi. Cadangan gula dan kopi, cadangan rokok dan bahan minum lainnya biasanya disimpan di dalam laci bagian atas gerobak, sementara laci kecil di bawah tumpukan makanan digunakan untuk menyimpan uang. Bagian belakang dari tempat duduk pedagang disediakan dua atau lebih ember berisi air yang digunakan untuk persediaan air bersih yang akan dimasak dan untuk mencuci gelas yang kotor.



Gambar 2. Ciri Khas dan Menu yang Disajikan di Angkringan

Para pedagang Angkringan di Kota Ponorogo dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya tidak secara terpisah atau sendiri-sendiri tetapi mereka membentuk kelompok. Satu kelompok pedagang Angkringan diketuai oleh seorang ketua dan mempunyai beberapa anggota kelompok. Berdasarkan kepemilikan gerobak Angkringan dan penyediaan jajanan dan makanan, pedagang Angkringan di Kota Ponorogo dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu pedagang Angkringan *mandiri*, *semi mandiri* dan *non mandiri* (Santoso, 2006).

Seorang pedagang Angkringan yang termasuk dalam golongan mandiri adalah jika mereka memiliki gerobak sendiri dan sekaligus membuat jajanan dan makanan sendiri, tetapi tetap bersedia menerima makanan titipan. Pedagang Angkringan yang termasuk dalam golongan semi mandiri adalah jika mereka memiliki gerobak sendiri tetapi makanan dan jajanan mengambil dari pedagang Angkringan golongan mandiri. Pedagang Angkringan yang termasuk dalam golongan non mandiri adalah jika mereka menyewa gerobak dan mengambil makanan dan minuman dari pedagang Angkringan golongan mandiri.

Pedagang Angkringan golongan mandiri secara otomatis menjadi ketua kelompok, sedangkan pedagang Angkringan golongan semi mandiri dan non mandiri menjadi anggota kelompok. Seorang ketua kelompok biasanya mengontrak sebuah rumah atau mempunyai rumah sendiri di Kota Ponorogo dan ditempati bersama istri dan anaknya. Di rumah tersebut, istri ketua kelompok mempunyai usaha membuat jajanan dan makanan yang akan dijual oleh suaminya (ketua kelompok)

maupun yang akan dijual para anggota kelompoknya. Selain ketua kelompok bersama keluarganya, di rumah tersebut biasanya juga tinggal beberapa anggota kelompoknya yang masih belum mampu menyewa rumah atau kost sendiri.

Sekitar tahun 1999-an jumlah pedagang Angkringan di kota Ponorogo hanya sekitar lima pedagang. Dari tahun ke tahun, jumlah pedagang tersebut mengalami kenaikan dan sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah pedagang warung angkringan menjadi sekita dua puluh sembilan pedagang (Santoso dan Harsono, 2012). Lokasi usaha mereka cukup menyebar, yaitu hampir di seluruh jalan protokol yang ada dalam wilayah Kecamatan Kota Ponorogo, misalnya Jalan Jalan Gajah Mada, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan Sultan Agung, Jalan Sukarno Hatta, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan Jalan Diponegoro.

SEKTOR INFORMAL DAN SOLIDARITAS

Sektor Informal

Istilah sektor informal pertama sekali diperkenalkan di Ghana pada tahun 1971 oleh seorang peneliti dari Manchester bernama Keith Hearth. Sektor informal tersebut mulai menjadi pembahasan di kalangan pengamat pembangunan setelah diterbitkan hasil laporan penelitian oleh ILO dan UNDP. Senthuraman (Soeratno, 2000), dalam bukunya yang berjudul *"The Urban Informal Sector in Developing Countries"* terbitan ILO 1981, memberikan definisi umum sektor informal adalah sektor ekonomi yang terdiri dari unit usaha berskala kecil yang memproduksi serta mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi dirinya masing-masing, dan dalam usahanya itu sangat dibatasi oleh faktor kapital, baik fisik maupun ketrampilan.

Dalam Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (1997: 292-293) dijelaskan bahwa belum ada kebulatan pendapat tentang batasan yang tepat untuk sektor informal di Indonesia. Tetapi ada kesepakatan tidak resmi antara para ilmuwan yang terlihat dalam

penelitian masalah-masalah sosial untuk menerima ”definisi kerja” sektor informal di Indonesia sebagai berikut:

- a. Sektor yang tidak menerima bantuan atau proteksi ekonomi dari pemerintah;
- b. Sektor yang belum dapat menggunakan (karena tidak punya akses) bantuan, meskipun pemerintah telah menyediakannya; dan
- c. Sektor yang telah menerima bantuan pemerintah tetapi bantuan tersebut belum sanggup membuat sektor itu mandiri.

Selanjutnya dalam Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis dan Manajemen tersebut juga dijelaskan bahwa disamping definisi kerja tersebut, disepakati pula serangkaian ciri sektor informal di Indonesia, yang meliputi:

- a. Kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik, karena unit usaha timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia secara formal;
- b. Pada umumnya unit usaha tidak memiliki izin usaha;
- c. Pola kegiatan usaha tidak teratur dengan baik, dalam arti lokasi maupun jam kerja;
- d. Pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini;
- e. Unit usaha berganti-ganti dari satu sub-sektor ke sub-sektor lain;
- f. Teknologi yang digunakan masih tradisional;
- g. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga kecil;
- h. Untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja;
- i. Pada umumnya unit usaha termasuk kelompok *one man enterprise*, dan kalau ada pekerja, biasanya berasal dari keluarga sendiri;

- j. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri, atau dari lembaga keuangan tidak resmi; dan
- k. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa berpenghasilan rendah atau menengah.

Menurut Hidayat (1983) sektor informal merupakan bagian dari sistem ekonomi kota dan desa yang belum mendapatkan bantuan ekonomi dari pemerintah atau belum mampu menggunakan bantuan yang telah disediakan atau sudah menerima bantuan tetapi belum sanggup berdaya. Dari definisi tersebut dapat dibedakan bahwa sektor informal yang berada di daerah pedesaan seringkali disebut sektor informal tradisional yang bergerak di bidang pertanian, sedangkan untuk sektor informal yang berada di daerah perkotaan sebagian besar bergerak dalam kegiatan pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima (PKL) seringkali didefinisikan sebagai suatu usaha yang memerlukan modal relatif sedikit dan berusaha dalam bidang produksi maupun penjualan untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu, serta usaha dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Sektor usaha PKL tersebut seringkali menjadi incaran bagi masyarakat maupun pendatang baru untuk membuka usaha di daerah perkotaan. Hal ini disebabkan karena adanya ciri khas maupun mudahnya membuka usaha di sektor tersebut karena tidak memerlukan modal yang besar.

Menurut pendapat Kartini Kartono dkk. (1980) ciri dan karakteristik yang melekat pada PKL antara lain adalah :

- a. Merupakan pedagang dan kadang-kadang mereka juga memproduksi barang atau menyelenggarakan jasa yang sekaligus dijual kepada konsumen;
- b. Perkataan kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjajakan barang dagangannya dengan gelaran tikar di pinggir jalan atau di muka toko-toko yang dianggap strategis, mempergunakan meja atau kereta dorong maupun kios-kios kecil;

- c. Umumnya menjajakan bahan-bahan makanan, minuman dan barang konsumsi lainnya;
- d. Umumnya bermodal kecil, bahkan tidak jarang mereka hanya merupakan alat bagi pemilik modal, dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan dari jerih payahnya;
- e. Umumnya kualitas barang yang diperdagangkan relatif rendah atau tidak ada standart barang yang diperdagangkan;
- f. Umumnya merupakan usaha “*family enterprice*” dimana seluruh anggota keluarga membantu usaha tersebut;
- g. Sebagian pedagang kaki lima menjalankan usaha penuh atau per jam dan waktu kerja pedagang kaki lima tidak menunjukkan pola yang tetap;
- h. Pedagang kaki lima terlihat jiwa *entrepreneurship* yang kuat, walaupun faktor saling meniru usaha pedagang lain yang berhasil dilakukan secara intensif.

Pedagang kaki lima adalah termasuk usaha kecil yang berorientasi pada laba (*profit*) layaknya sebuah kewirausahaan (*entrepreneurship*). Pedagang kaki lima mempunyai cara tersendiri dalam mengelola usahanya agar mendapatkan keuntungan dan menjadi manajer tunggal yang menangani usahanya mulai dari perencanaan usaha, menggerakkan usaha sekaligus mengontrol atau mengendalikan usahanya, padahal fungsi-fungsi manajemen tersebut jarang atau tidak pernah mereka dapati dari pendidikan formal (Mulyanto; 2007). Manajemen usahanya berdasarkan pada pengalaman dan alur pikir mereka yang otomatis terbentuk sendiri berdasarkan arahan ilmu manajemen pengelolaan usaha, hal inilah yang disebut “*learning by experience*” (belajar dari pengalaman). Kemampuan manajerial memang sangat diperlukan PKL guna meningkatkan kinerja usaha mereka, selain itu motivasi juga sangat diperlukan guna memacu keinginan para PKL untuk mengembangkan usahanya.

Solidaritas

Bagaimana suatu perilaku dan institusi dipengaruhi oleh hubungan sosial merupakan pertanyaan klasik dari teori sosial. Dalam menjawab pertanyaan tersebut Granovetter (Damsar, 1997), mengajukan konsep *Keterlekatan*. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan fenomena perilaku ekonomi dalam hubungan sosial, yaitu tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara para aktor. Tindakan tersebut tidak terbatas terhadap tindakan aktor individual sendiri tetapi juga mencakup perilaku ekonomi yang lebih luas, dan kesemuanya terpendam dalam suatu jaringan hubungan sosial. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh anggota jaringan adalah terlekat karena ia diekspresikan dalam interaksi dengan orang lain.

Selanjutnya Granovetter menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jaringan hubungan sosial adalah suatu rangkaian hubungan yang teratur atau hubungan sosial yang sama di antara individu-individu atau kelompok-kelompok. Sedangkan menurut pendapat Mitchell (Damsar, 1997), bahwa pada tingkatan antar individu, jaringan hubungan sosial dapat didefinisikan sebagai rangkaian hubungan khas di antara sejumlah orang dengan sifat tambahan, yang ciri-ciri dari hubungan ini sebagai keseluruhan, yang digunakan untuk menginterpretasikan tingkah laku sosial dari individu-individu terlibat. Pada tingkatan struktur memperlihatkan bahwa pola atau struktur hubungan sosial meningkat dan atau menghambat perilaku orang untuk terlibat dalam macam arena dari kehidupan sosial. Oleh karena itu, tingkatan ini memberikan suatu dasar untuk memahami perilaku individu dipengaruhi oleh struktur sosial.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Granovetter (1974), memperlihatkan bahwa kuatnya suatu ikatan jaringan memudahkan seseorang untuk mengetahui ketersediaan pekerjaan. Dalam hal ini, jaringan sosial juga memainkan peranan penting dalam berimigrasi dan kewiraswastaan imigran. Jaringan tersebut merupakan ikatan antar pribadi yang mengikat para migran melalui kekerabatan, persahabatan, komunitas asal yang sama. Selain itu, kebanyakan

kewiraswastaan yang terjadi pada komunitas migran dimudahkan oleh jaringan dari ikatan dalam saling tolong menolong, sirkulasi modal, bantuan dalam hubungan dengan birokrasi.

Terkait dengan konsep *Keterlekatan* yang disampaikan oleh Granovetter tersebut di atas, Emile Durkheim (tahun 1964) telah mengenalkan *Teori Solidaritas*, melalui karyanya yang berjudul *The Division of Labour in Society*, yang menjelaskan bahwa pertumbuhan dalam pembagian kerja meningkatkan suatu perubahan dalam struktur sosial dari solidaritas *mekanik* ke solidaritas *organik* (Doyle Paul Johnson, 1994). Solidaritas *mekanik* didasarkan pada suatu kesadaran kolektif bersama (*collective consciousness/conscience*), yang menunjukkan pada totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama itu. Solidaritas ini tergantung pada individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang sama, menganut kepercayaan dan pola normatif yang sama pula.

Menurut pendapat Emile Durkheim (Doyle Paul Johnson: 1994), indikator yang paling jelas untuk solidaritas *mekanik* adalah ruang lingkup dan kerasnya hukum-hukum yang bersifat menekan (*repressive*). Disamping itu, ciri khas yang penting adalah bahwa solidaritas itu didasarkan pada suatu tingkatan homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentimen dan sebagainya. Homogenitas tersebut hanya mungkin kalau pembagian kerja bersifat sangat minim. Berlawanan dengan itu, solidaritas *organik* muncul karena pembagian kerja bertambah besar. Solidaritas ini didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan ini bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dalam pembagian pekerjaan, yang memungkinkan dan juga menggairahkan bertambahnya perbedaan di kalangan individu. Munculnya perbedaan-perbedaan di tingkat individu ini merombak kesadaran kolektif, yang pada gilirannya menjadi kurang penting lagi bagi dasar keteraturan sosial dibandingkan dengan saling ketergantungan fungsional yang bertambah antara individu-individu yang mengambil spesialisasi dan secara relatif lebih otonom sifatnya.

Dalam solidaritas organik ditandai oleh pentingnya hukum yang bersifat memulihkan (*restitutive*) dari pada yang bersifat represif. Menurut Emile Durkheim, kedua tipe hukum tersebut sangat berbeda, yaitu hukum represif mengungkapkan kemarahan kolektif yang dirasakan kuat, sedangkan hukum restitutif berfungsi mempertahankan atau melindungi pola saling ketergantungan yang kompleks antara berbagai individu yang berspesialisasi atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pola restitutif ini jelas terlihat dalam hukum kepemilikan, hukum kontrak, hukum perdagangan, dan peraturan administrasi dan prosedur.

Lebih lanjut Emile Durkheim menjelaskan bahwa pertumbuhan dalam pembagian kerja (dan solidaritas organik sebagai hasilnya) tidak menghancurkan kesadaran kolektif; dia hanya mengurangi arti pentingnya dalam pengaturan terperinci dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memberikan lebih banyak ruang untuk otonomi individu dan heterogenitas sosial, tetapi tidak harus membuat individu menjadi terpisah sama sekali dari ikatan sosial yang didasarkan pada konsensus moral. Dengan demikian, ketika jumlah penduduk, kepadatan sosial dan pembagian kerja dalam suatu sistem terjadi peningkatan, maka masyarakat akan berubah dari solidaritas *mekanik* menuju solidaritas *organik*.

MODAL SOSIAL, N-ACH, DAN MOBILITAS

Modal Sosial

Modal sosial (*social capital*) merupakan satu terminologi baru yang dikembangkan oleh ahli-ahli sosial untuk memperkaya pemahaman tentang masyarakat dan komunitas. Modal sosial menjadi khasanah perdebatan yang menarik bagi ahli-ahli sosial dan pembangunan khususnya awal tahun 1990-an. Diskusi tentang modal sosial ini berawal dari realitas bahwa proses-proses pembangunan yang selama ini dilakukan di negara-negara berkembang dianggap terlalu materialistik dan mengkesampingkan aspek-aspek sosial dan kultur (Bobi B. Setiawan, 2004). Modal sosial merupakan pemahaman dan

pengetahuan yang dimiliki bersama oleh komunitas, serta pola hubungan yang memungkinkan sekelompok individu melakukan satu kegiatan yang produktif. Terminologi ini merujuk pada organisasi-organisasi, struktur, dan hubungan-hubungan sosial yang dibangun sendiri oleh komunitas, terlepas dari intervensi pemerintah atau pihak lain.

Modal sosial hanya dapat dibangun ketika tiap individu belajar dan mau mempercayai individu lain sehingga mereka mau membuat komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengembangkan bentuk-bentuk hubungan yang saling menguntungkan. Menurut pendapat Lesser (dalam Bobi B. Setiawan, 2004), modal sosial sangat penting bagi komunitas karena:

- a. Mempermudah akses informasi bagi anggota komunitas;
- b. Menjadi media power sharing atau pembagian kekuasaan dalam komunitas;
- c. Mengembangkan solidaritas;
- d. Memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas;
- e. Memungkinkan pencapaian bersama; dan
- f. Membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas.

Menurut pendapat Aloysius Gunadi Brata (2004), modal sosial merupakan isu menarik yang banyak dibicarakan dan dikaji belakangan ini. Perhatian besar terhadap peran modal sosial pun makin diarahkan pada persoalan-persoalan pembangunan ekonomi yang sifatnya lokal termasuk dalam hal pengurangan kemiskinan, karena hal-hal ini akan lebih mudah untuk dicapai dan biayanya kecil jika terdapat modal sosial yang besar. Namun, diingatkan oleh Tonkiss (dalam Aloysius Gunadi Brata, 2004) bahwa modal sosial barulah bernilai ekonomis kalau dapat membantu individu atau kelompok, misalnya untuk mengakses sumber-sumber keuangan, mendapatkan informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha, dan meminimalkan biaya transaksi.

Menurut Aris Marfai (2005), warung Angkringan sebagai bentuk kegiatan perekonomian kecil yang mampu bertahan di tengah sulitnya perekonomian Indonesia menandakan berperannya modal sosial

(*social capital*) dalam perekonomian masyarakat. Kenapa disebut modal sosial, karena untuk memulai kegiatan angkringan biasanya dimulai dari informasi kerabat, teman, tetangga atau keluarga yang telah berjualan sebelumnya. Mereka saling membantu dalam permodalan, suplai makanan, tempat tinggal dan informasi, seperti informasi tempat berjualan, tempat kulak dan lain sebagainya. Dalam taraf ini Angkringan telah mampu memberikan simbol bahwa modal sosial sebagai salah satu faktor penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat.

The Need for Achievement (N-Ach)

Fenomena berjalannya modal sosial tersebut di atas, erat kaitannya dengan teori *The Need for Achievement* (N-Ach) yang dikembangkan oleh David Mc Clelland. Menurut Mc Clelland (Budiman; 1996) dorongan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan mendapatkan kepastian tentang masa depan mereka serta tidak sekedar melepaskan diri dari belenggu kemiskinan adalah alasan yang cukup kuat dalam penggunaan teori ini. Mc Clelland merumuskan adanya tiga kebutuhan manusia, yaitu:

- a. *Need for Achievement*, yaitu kebutuhan untuk berprestasi. Seseorang yang kebutuhan prestasinya tinggi cenderung untuk berani mengambil resiko;
- b. *Need for Affiliation*, yaitu kebutuhan untuk berafiliasi yang merupakan dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, berada bersama orang lain, tidak mau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain; dan
- c. *Need of Power*, yaitu kebutuhan akan kekuasaan yang merupakan refleksi dari dorongan untuk mencapai autoritas, untuk memiliki pengaruh kepada orang lain.

Mobilitas

Mobilitas menurut Kimbal adalah suatu gerak dalam struktur sosial. Hal tersebut bisa terjadi pada kelompok-kelompok sosial tetapi juga pada individu-individu. Sorohim (Soerjono Soekanto, 1996) membedakan gerak sosial menjadi dua jenis, yaitu gerak sosial horisontal dan gerak sosial vertikal. Gerak sosial horisontal merupakan peralihan individu atau obyek-obyek sosial lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Dengan adanya gerak sosial yang horisontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang ataupun suatu obyek sosial. Sementara itu yang ia maksud dengan gerak sosial vertikal adalah perpindahan individu atau obyek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang derajatnya lebih tinggi.

Dalam realitas, seseorang mengalami gerak sosial vertikal justru setelah menempuh gerak sosial horisontal. Seseorang sering harus berpindah tempat di daerah lain yang jauh dari daerah asalnya untuk mendapatkan peluang yang lebih baik. Rozi Munir (1981) menyebutkan bahwa diantara bentuk dari mobilitas horisontal adalah perpindahan penduduk secara teritorial, spasial dan geografis. Selanjutnya Munir menyebut mobilitas tersebut sebagai "migrasi", yang artinya adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik, negara, ataupun batas administrasi atau batas bagian dalam suatu negara.

POLA SOLIDARITAS KELOMPOK PEDAGANG ANGKRINGAN

Perkembangan jumlah pedagang Angkringan di Kota Ponorogo dari tahun ke tahun tidak dapat dilepaskan dari adanya jalinan solidaritas di antara mereka. Jalinan solidaritas tersebut tidak hanya terjadi antara ketua kelompok dengan anggota kelompok, tetapi juga antara sesama anggota dalam satu kelompok dan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain (Slamet S. dan Jusuf H.; 2012).

Solidaritas yang terjadi antara ketua kelompok dengan anggota kelompok pedagang Angkringan di Kota Ponorogo dimulai pada saat ketua kelompok berupaya untuk menambah anggotanya dengan jalan memberikan informasi, baik kepada pelanggan, teman, maupun kerabat dari daerah asalnya, terkait perkembangan usaha Angkringan dan sekaligus mengajak mereka untuk membuka usaha Angkringan di Kota Ponorogo. Ketika sebuah kelompok pedagang Angkringan telah terbentuk, maka mulai terjalin pembagian kerja yang sudah jelas antara ketua kelompok dengan anggotanya. Ketua kelompok mempunyai wewenang untuk membuat jajanan dan makanan yang akan disajikan di Angkringan. Jajanan dan makanan tersebut selain dijual oleh ketua kelompok sendiri juga akan diambil oleh para anggota kelompoknya dan mereka berhak mengambil keuntungan dari hasil penjualan jajanan dan makanan tersebut. Jajanan dan makanan yang tidak laku dijual akan dikembalikan kepada ketua kelompok dan tidak wajib dibayar. Selain itu, jika terdapat anggota kelompok yang tidak mempunyai gerobak Angkringan dan tidak mampu untuk mengadakan sendiri, maka ketua kelompok menyewakan gerobak Angkringan kepada anggota kelompok tersebut. Adanya kejelasan pembagian kerja antara ketua dengan anggota kelompok pedagang Warung Angkringan di Kota Ponorogo tersebut bukan berarti ketua kelompok tidak lagi membantu anggotanya dalam bidang yang lain. Ketua kelompok tetap membantu anggotanya mulai mencarikan lokasi usaha yang strategis, membantu permodalan dan menyediakan tempat tinggal.

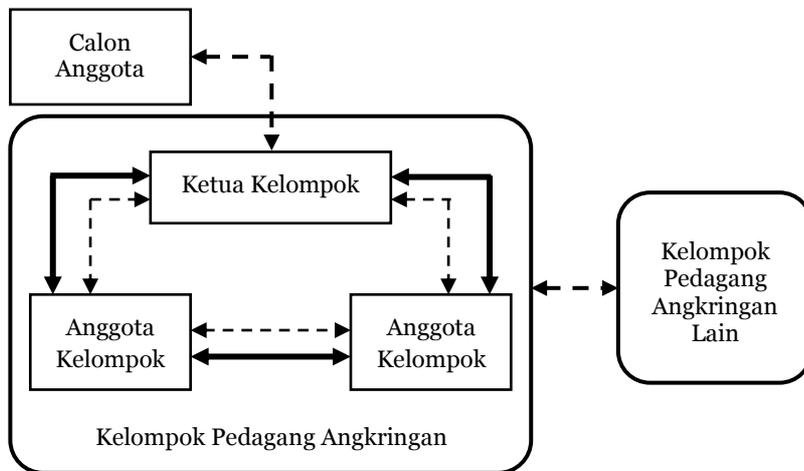
Solidaritas dalam kelompok pedagang Angkringan di Kota Ponorogo tidak hanya terjalin antara ketua dengan anggota kelompoknya tetapi juga terjalin di antara sesama anggota kelompok. Jaringan solidaritas di antara sesama anggota kelompok tersebut adalah saling membantu jika ada permasalahan, saling menghargai sesama anggota, dan saling mematuhi kesepakatan. Saling menghargai dan mematuhi kesepakatan yang mereka buat biasanya terkait masalah lokasi berjualan. Lokasi berjualan yang mereka tempati diatur sedemikian rupa agar tidak saling berdekatan dan tidak terjadi persaingan antar sesama anggota kelompok. Adanya kesepakatan

tersebut menjadikan pedagang Angkringn mampu menyebar di setiap jalan protokol yang ada di Kota Ponorogo.

Solidaritas kelompok pedagang Angkringan tidak hanya terjadi di dalam satu kelompok, tetapi juga terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Solidaritas tersebut terkait permasalahan lokasi usaha, aturan pengambilan jajanan dan makanan, dan saling membantu dalam acara hajatan. Solidaritas dalam penentuan lokasi usaha yang dimaksud adalah adanya perilaku saling menghormati antar kelompok dalam memilih lokasi usaha yang strategis. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa setiap lokasi usaha pedagang Angkringan tidak ada yang saling berdekatan dan mampu menyebar di seluruh jalan protokol di Kota Ponorogo. Dengan terjalannya solidaritas ini maka para pedagang Angkringan di Kota Ponorogo tidak saling bersaing tetapi bersaingnya hanya dengan warung kopi khas Ponorogo, baik warung kopi lesehan maupun permanen. Solidaritas dalam pengambilan jajanan dan makanan biasanya terjadi jika salah satu ketua kelompok berhalangan dalam membuat jajanan dan makanan, sedangkan anggota kelompoknya tetap akan menjalankan usaha Angkringannya, maka ketua kelompok tersebut memperbolehkan anggota kelompoknya mengambil jajanan dan makanan dari ketua kelompok lain. Namun demikian, ketua kelompok yang berhalangan tersebut sudah mengarahkan kepada anggota kelompoknya untuk mengambil jajanan dan makanan pada ketua kelompok lain yang masih satu daerah. Solidaritas pada saat ada acara hajatan terjadi jika salah satu ketua atau anggota kelompok mempunyai hajatan di daerah asalnya dan mengundang ketua atau anggota dari kelompok lain maka sudah dapat dipastikan mereka yang diundang akan meliburkan usaha Angkringannya untuk membantu dan menghadiri acara hajatan tersebut.

Meminjam istilah yang disampaikan oleh Emile Durkheim, berjalannya solidaritas mekanik dan solidaritas organik pada kelompok pedagang Angkringan di Kota Ponorogo dapat dibuat "*Pola Solidaritas*" sebagaimana tergambar pada gambar 3 (Slamet S. dan Jusuf H.; 2012). Pola solidaritas kelompok pedagang Angkringan di Kota Ponorogo memberikan gambaran bahwa di kelompok pedagang

Angkringan telah berjalan solidaritas mekanik dan solidaritas organik, namun demikian dominasi berjalannya solidaritas tersebut berbeda-beda.



Keterangan :

← - - - - - → : Solidaritas Mekanik

← = = = = = → : Solidaritas Organik

Gambar 3. Pola Solidaritas Kelompok Pedagang Angkringan

Solidaritas antara ketua kelompok dengan anggota kelompok lebih didominasi oleh solidaritas organik karena berjalannya usaha kelompok Angkringan dalam setiap hari sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap pembagian kerja dan aturan kelompok yang telah disepakati bersama. Solidaritas mekanik antara ketua kelompok dengan anggota kelompok, baik dalam bentuk bantuan pemilihan lokasi usaha yang strategis, bantuan modal usaha, penyediaan tempat tinggal, maupun saling membantu dalam acara hajatan, hanya berjalan pada saat anggota kelompok tersebut tidak mampu mengusahakannya sendiri dan lebih bersifat tidak terus menerus. Solidaritas ketua kelompok dalam memberikan informasi tentang peluang usaha kepada teman, saudara, atau tetangga di daerah asalnya dan berusaha

mengajak mereka untuk membuka usaha Angkringan di Kota Ponorogo termasuk dalam solidaritas mekanik karena lebih menekankan pada unsur kepercayaan dan unsur kedaerahan yang sama antara pemberi informasi dengan penerima informasi.

Solidaritas antar sesama anggota dalam satu kelompok lebih didominasi oleh jenis solidaritas organik karena dalam setiap berjualan mereka saling mematuhi kesepakatan yang telah buat khususnya terkait lokasi berjualan yang tidak saling berdekatan. Solidaritas mekanik antar sesama anggota kelompok, baik berupa saling membantu permasalahan maupun bantuan dalam acara hajatan, tidak setiap hari terjadi atau bersifat isidental.

Solidaritas antar kelompok pedagang Angkringan yang satu dengan kelompok yang lain lebih mengarah pada solidaritas mekanik karena dalam menjalankan usahanya mereka selalu menghormati pedagang Angkringan yang lain, yaitu dengan memilih lokasi usaha yang tidak saling berdekatan sehingga tidak saling berebut pembeli maupun lokasi usaha yang strategis. Solidaritas mekanik yang lain adalah berbentuk bersedia meliburkan usaha Angkringannya untuk menghadiri undangan hajatan seorang pedagang Angkringan dari kelompok lain. Selain itu, seorang ketua kelompok memperbolehkan anggota kelompoknya mengambil jajanan dan makanan dari ketua kelompok lain pada saat ketua kelompok tersebut tidak memproduksi jajanan dan makanan karena ada acara kepentingan keluarga. Biasanya ketua kelompok tersebut sudah mengarahkan anggota kelompoknya untuk mengambil jajanan dan makanan pada ketua kelompok lain tertentu, yaitu ketua kelompok yang masih satu daerah asal.

Pola solidaritas kelompok pedagang Angkringan di Kota Ponorogo tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Emile Durkheim bahwa pertumbuhan dalam pembagian kerja (solidaritas organik) tidak menghancurkan kesadaran kolektif (solidaritas mekanik) tetapi hanya mengurangi arti pentingnya dalam pengaturan terperinci dalam kehidupan sehari-hari. Solidaritas organik memberikan lebih banyak ruang untuk otonomi individu dan heterogenitas sosial, tetapi tidak

harus membuat individu menjadi terpisah sama sekali dari ikatan sosial yang didasarkan pada konsensus moral.

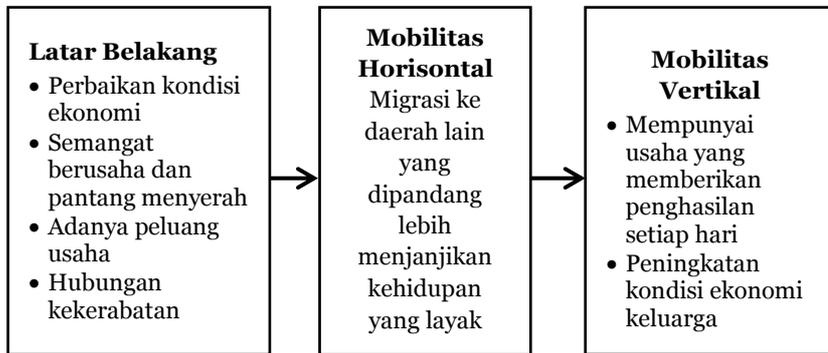
POLA MOBILITAS KELOMPOK PEDAGANG ANGKRINGAN

Mobilitas kelompok pedagang Angkringan yang dimaksud dalam penelitian ini terkait dengan perpindahan pedagang Angkringan dari suatu daerah ke daerah lain (mobilitas horisontal) dan peningkatan status sosial yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kondisi ekonomi keluarga (mobilitas vertikal).

Mobilitas Horisontal. Kelompok pedagang Angkringan yang ada di Kota Ponorogo mempunyai semangat kerja yang tinggi dan pantang menyerah. Sebelum membuka usaha Angkringan di Kota Ponorogo mereka sudah mempunyai usaha di daerah lain, namun usaha tersebut mengalami kegagalan atau menghadapi hambatan untuk berkembang lebih baik. Mereka tidak pernah putus asa dan tetap mencari peluang usaha di daerah lain. Berbagai informasi baik dari teman maupun kerabat mereka yang telah sukses membuka usaha Angkringan di Kota Ponorogo dan hasil observasi yang mereka lakukan sendiri sangat mendorong semangat mereka untuk membuka dan mengembangkan usaha Angkringan di Kota Ponorogo.

Mobilitas Vertikal. Usaha Angkringan yang telah dijalankan oleh kelompok pedagang Angkringan di Kota Ponorogo selama bertahun-tahun telah mampu meningkatkan status sosial (mobilitas vertikal) mereka, khususnya dilihat dari peningkatan kondisi ekonomi keluarga mereka.

Hasil temuan di lapangan memberikan gambaran bahwa fenomena mobilitas yang dijalankan dan dialami oleh pedagang Angkringan di Kota Ponorogo dapat berbentuk mobilitas vertikal dan mobilitas vertikal. Fenomena mobilitas kelompok pedagang Angkringan di Kota Ponorogo tersebut dapat dibuat “*Pola Mobilitas*” sebagaimana pada gambar 4 (Slamet S. dan Jusuf H.; 2012).



Gambar 4. Pola Mobilitas Kelompok Pedagang Angkringan

Mobilitas horisontal ditunjukkan dari perpindahan pedagang Angkringan dari suatu daerah ke Kota Ponorogo. Perpindahan tersebut mayoritas berlatar belakang kondisi usaha sebelumnya yang tidak memungkinkan dikembangkan yang lebih baik karena banyaknya saingan atau usaha sebelumnya mengalami kegagalan atau kebangkrutan. Meskipun pernah mengalami kegagalan pada usaha sebelumnya, mereka tidak menyerah dan selalu bersemangat untuk membuka usaha baru atau memilih daerah baru untuk mengembangkan usahanya. Pemilihan Kota Ponorogo sebagai tempat untuk membuka dan mengembangkan usaha Angkringan didukung dari berbagai informasi baik dari teman maupun kerabat sederaah yang sudah mengembangkan Angkringan di Kota Ponorogo, dan juga hasil pengamatan yang mereka lakukan sebelumnya tentang peluang usaha Angkringan di Kota Ponorogo.

Mobilitas vertikal yang terjadi pada kelompok pedagang Angkringan di Kota Ponorogo ditunjukkan dari adanya peningkatan kondisi ekonomi keluarga yang semakin baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi keluarga sebelum membuka dan mengembangkan usaha Angkringan di Kota Ponorogo. Selain mampu mencukupi kebutuhan keluarga, mereka juga mampu membuat rumah di Kota

Ponorogo, membeli tanah, dan membeli beberapa kendaraan bermotor untuk mendukung usaha mereka.

Fenomena mobilitas yang terjadi pada kelompok pedagang Angkringan di Kota Ponorogo tersebut sesuai dengan pendapat Sorohim (Soerjono Soekanto, 1996) bahwa dalam realitas seseorang mengalami gerak sosial vertikal justru setelah menempuh gerak sosial horisontal. Seseorang sering harus berpindah tempat di daerah lain yang jauh dari daerah asalnya untuk mendapatkan peluang yang lebih baik. Sebelum membuka usaha Angkringan di Kota Ponorogo, mereka mempunyai usaha di suatu daerah dan ketika mengalami kegagalan atau tidak mampu mengembangkan usaha di daerah tersebut, mereka akhirnya melakukan perpindahan ke daerah lain (Kota Ponorogo) untuk membuka usaha Angkringan. Dalam jangka waktu tertentu, usaha Angkringan yang mereka tekuni ternyata mampu memberikan hasil dan meningkatkan kondisi ekonomi keluarga mereka. Bahkan beberapa dari mereka mampu membuat rumah dan tinggal menetap bersama keluarga di Kota Ponorogo.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius Gunadi Brata, 2004, "*Nilai Ekonomis Modal Sosial Pada Sektor Informal Perkotaan*", email : aloy.gb@mail.uajy.ac.id, Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya.
- Arif Budiman, 1996, "*Teori Pembangunan Di Negara Dunia Ketiga*", Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Aris Marfai, 2005, "*Angkringan, Sebuah Simbol Perlawanan*", dalam : <http://www.penulislepas.com/>
- Bobi B. Setiawan, 2004, "*Ruang Publik dan Modal Sosial: Privatisasi Ruang di Kampung*", Universitas Gadjah Mada, dalam Info URDI Volume 17, Yogyakarta.
- Damsar, 1997, "*Sosiologi Ekonomi* ", Cetakan Pertama, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Doyle Paul Johnson, 1994, "*Teori Sosiologi Klasik dan Modern*", Diindonesiakan oleh Robert M. Z. Lawang, Penerbit PT. Gramadia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hidayat, 1983, "*Definisi, Kreteria dan Evolusi Konsep Sektor Informal: Sumbangan Pemikiran untuk Repelita IV*", ANALISA, Tahun XII, Nomor 7, Fakultas Ekonomi, Universitas Pedjajaran, Bandung.
- Kartini Kartono, dkk., 1980, "*Pedagang Kaki Lima sebagai Realita Urbanisasi dalam Rangka Menuju Bandung Kota Indah*", FISIP Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung.
- Mulyanto, 2007, "*Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Manajerial Terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima Menetap (Suatu Survai pada Pusat Perdagangan dan Wisata Di Kota Surakarta)*", dalam Jurnal BENEFIT, Volume 11, Nomor 1, Juni 2007, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Rozy Munir, 1981, "*Dasar-Dasar Demografi*", Penerbit Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Slamet Santoso, 2006, "*Survivalitas Pedagang Warung Hik (Warung Angkringan) di Kota Ponorogo*", Penelitian Dosen Muda yang Didanai oleh DP2M Ditjen Dikti dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor: 233/SP3/PP/DP2M/II/2006.
- Slamet Santoso, 2006, "*Kemampuan Bertahan Pedagang Warung Hik di Kota Ponorogo (The Survival of Hik Vendors in Ponorogo)*", dalam Jurnal Penelitian Humaniora (Terakreditasi), Volume 7, Nomor 2, Agustus 2006, diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Slamet Santoso dan Jusuf Harsono, 2012, "*Pola Solidaritas dan Mobilitas Kelompok Pedagang Angkringan di Kota Ponorogo*", Penelitian Fundamental dibiayai oleh Ditjen Dikti, Kemendikbud RI, sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Nomor : 0046/SP2H/PP/K7/KL/II/2012.

Slamet Santoso dan Jusuf Harsono, 2013, "*Pola Solidaritas dan Mobilitas Kelompok Pedagang Angkringan di Kota Ponorogo*", Penelitian Fundamental dibiayai oleh Ditjen Dikti, Kemendikbud RI, sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Nomor : 023/SP2H/PDSTRL/K7/KL/II/2013

Soerjono Soekanto, 1990, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Soeratno, 2000, "*Analisa Sektor Informal : Studi Kasus Pedagang Angkringan di Gondokusuman Yogyakarta*", Jurnal OPTIMUM, Volume 1 Nomor 1 September 2000, Yogyakarta.

_____, 1997, "*Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*", Cetakan Kedua, Buku II P-Z, Penerbit Delta Pamungkas, Jakarta.

TENAGA KERJA INDONESIA ASAL KOTA PONOROGO ²

Krisis moneter yang dialami Indonesia sejak tahun 1997 mempunyai dampak yang luas pada banyak bidang kehidupan masyarakat. Krisis moneter yang semula hanya menjangkau bidang ekonomi akhirnya merambah semua aspek kehidupan seperti politik, pendidikan dan ketenagakerjaan. Ambruknya perusahaan-perusahaan telah mengakibatkan banyak pengangguran. Tragedi ekonomi berkepanjangan yang dialami bangsa ini telah mendorong sebagian para pencari kerja untuk mengadu nasib dengan mencari pekerjaan di luar negeri. Adanya kebijakan *floating exchange rate* (nilai tukar mengambang) di bidang moneter pada situasi ekonomi yang sangat rawan di tahun 1997, menurut Baswir (2003: 73), ikut merangsang terjadinya perbedaan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing yang sangat besar. Pada tahun 1997 nilai kurs 1 dollar AS sama dengan Rp. 16.000 (dibandingkan dengan tahun 1996 yang hanya Rp. 2.500). Perbedaan kurs mata uang rupiah dengan mata uang asing telah menarik mereka untuk mencari uang di luar negeri, baik di negara-negara Timur Tengah maupun negara-negara Asia Tenggara, seperti Singapura, Hongkong, Malaysia dan lain-lain. Fenomena tersebut juga terjadi pada pencari kerja asal Ponorogo yang ingin bekerja di luar negeri.

² Tulisan ini bersumber dari hasil penelitian yang berjudul: *Mobilitas Vertikal Dan Pola Aliran Uang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Ponorogo* (Peneliti: Khoirurrosyidin, Jusuf Harsono, dan Slamet Santoso). Penelitian ini dibiayai oleh Ditjen Dikti, Departemen Pendidikan Nasional, Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor: 008/SP2H/DP2M/III/2007.

Hal yang paling menarik untuk diamati dari fenomena sosial yang diakibatkan oleh bidang ketenagakerjaan ini adalah adanya *Mobilitas Sosial* (vertikal) yang dialami oleh keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Ponorogo. Hal yang tidak kalah menarik adalah bahwa rata-rata mereka mempunyai gaya hidup yang cukup konsumtif sehingga sangat mendorong *pemerhati* sosial ekonomi tertarik untuk meneliti pola aliran uang para TKI dan keluarganya. Gaya hidup yang konsumtif tersebut, disatu sisi menimbulkan dampak positif bagi perekonomian kota Ponorogo secara luas, tetapi sebaliknya juga mempunyai dampak negatif bagi para TKI dan keluarganya.

Jika dikaitkan dengan fenomena globalisasi, hal yang cukup menarik adalah hampir tidak ada wilayah di dunia ini yang tidak terjamah globalisasi. Kota Ponorogo yang notabene adalah bukan *Kota Metropolis* dan tidak punya hubungan langsung dengan kota-kota besar di dunia, ternyata juga tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh globalisasi dunia. Hal ini terbukti dengan mudahnya dijumpai produk-produk negara industri maju di setiap sudut kota, terutama produk-produk elektronik, seperti televisi, tape recorder, hand phone dan lain-lain, serta kendaraan bermotor yang sebagian besar adalah produk-produk negara besar, seperti Jepang, Korea Selatan, China dan lain-lain. Bahkan di Ponorogo juga banyak dijumpai adanya *money changer* yang sering kali melayani kepentingan para TKI dan keluarganya dalam menukarkan uang asing dengan uang rupiah atau sebaliknya. Sebagai konsekuensi logis dari globalisasi, menurut Usman (1998: 8) adalah adanya proses produksi dan pemasaran terhadap barang tertentu menembus batas-batas administrasi dan geografis antar negara.

N-ACH, MOBILITAS, DAN KONSUMERISME TKI

The Need for Achievement TKI

Teori The Need for Achievement (N-Ach) dari David Mc. Clelland menjadi *pisau analisis* yang tepat untuk memahami fenomena sosial ekonomi yang sedang dialami oleh para TKI dan keluarga

mereka di Ponorogo. Menurut Mc Clelland (Budiman; 1996: 23) dorongan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan mendapatkan kepastian tentang masa depan mereka serta tidak sekedar melepaskan diri dari belenggu kemiskinan adalah alasan yang cukup kuat dalam penggunaan teori ini.

Mc. Clelland merumuskan adanya tiga kebutuhan manusia yaitu:

- a. *Need for Achievement*, yaitu kebutuhan untuk berprestasi. Seseorang yang kebutuhan prestasinya tinggi cenderung untuk berani mengambil resiko.
- b. *Need for Affiliation*, yaitu kebutuhan untuk berafiliasi yang merupakan dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, berada bersama orang lain, tidak mau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain.
- c. *Need of Power*, yaitu kebutuhan akan kekuasaan yang merupakan refleksi dari dorongan untuk mencapai autoritas, untuk memiliki pengaruh kepada orang lain.

Lebih dari itu dorongan yang dimaksud tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan material semata tetapi lebih dari pada itu adalah mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Peneliti tidak menggunakan konsep Etika Protestan milik Max Weber karena peneliti tidak melihat adanya motif religi pada para TKI tersebut. Mereka bekerja menjadi TKI di luar negeri semata-mata karena dorongan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Disinilah perbedaan penting antara konsep N – Ach milik David Mc Clelland dengan konsep Etika Protestan milik Max Weber. Lebih dari pada itu para TKI bukanlah komunitas yang diikat dengan satu norma yang ketat, sehingga menurut peneliti unit analisis dari penelitian ini adalah *individu* bukanlah *group*, seperti dalam konsep Etika Protestan.

Prestasi ekonomi yang didapat oleh para TKI menunjukkan bahwa mereka mempunyai optimisme yang besar dan tidak mudah menyerah pada keadaan yang melingkupi mereka. Situasi makro ekonomi yang tidak memungkinkan mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi tidak menjadikan mereka untuk menyerah pada keadaan.

Mobilitas TKI

Mobilitas menurut Kimbal (dalam Soekanto, 1996: 275) adalah suatu gerak dalam struktur sosial. Hal tersebut bisa terjadi pada kelompok-kelompok sosial tetapi juga pada individu-individu. Sorohim (dalam Soekanto, 1996: 276) membedakan gerak sosial menjadi dua jenis, yaitu gerak sosial horisontal dan gerak sosial vertikal. Gerak sosial horisontal merupakan peralihan individu atau obyek-obyek sosial lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Dengan adanya gerak sosial yang horisontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang ataupun suatu obyek sosial. Sementara itu yang ia maksud dengan gerak sosial vertikal adalah perpindahan individu atau obyek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang derajatnya lebih tinggi.

Konsep tersebut memudahkan peneliti dalam memahami perubahan struktur sosial ekonomi para TKI dan keluarganya, mengingat sebagian besar dari mereka mengalami perubahan status sosial ekonomi. Namun demikian, bukan berarti peneliti mengabaikan konsep mobilitas horisontal karena dalam prakteknya seseorang mengalami gerak sosial vertikal justru setelah menempuh gerak sosial horisontal. Seseorang sering harus berpindah tempat di daerah lain yang jauh dari daerah asalnya untuk mendapatkan peluang yang lebih baik. Rozi Munir (1981: 117) menyebutkan bahwa diantara bentuk dari mobilitas horisontal adalah perpindahan penduduk secara teritorial, spasial dan geografis. Selanjutnya Munir menyebut mobilitas tersebut sebagai "migrasi", yang artinya adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik, negara, ataupun batas administrasi atau batas bagian dalam suatu negara.

Konsumerisme TKI

Konsumerisme menunjukkan pada sebuah gaya hidup seseorang atau kelompok orang dengan keinginan luar biasa memenuhi

kebutuhan konsumsinya secara berlebihan. Fenomena yang sering muncul adalah pemenuhan keinginan dengan tanpa mempertimbangkan berbagai akibat yang menyertainya, terutama hubungan dengan potensi ekonomi yang dimilikinya. Konsep konsumerisme menjadi penting disampaikan untuk *meneropong* gaya hidup para TKI dan keluarganya yang cukup konsumtif.

Begitu besarnya *remitansi* atau kiriman uang para TKI dari luar negeri ke kota Ponorogo dan begitu tingginya semangat mereka untuk berbelanja, maka perlu juga memahami *Cash Flow* atau pola aliran uang mereka mengingat bukan tidak mungkin bahwa uang para TKI dalam waktu dekat akan kembali ke negara-negara besar sebagai akibat adanya globalisasi. Globalisasi, menurut Fakhri (2002: 194), diartikan sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Bila hal ini terjadi maka merupakan pembuktian terhadap *Teori Dependensia* yang disampaikan oleh Andreas Gunder Frank (dalam Budiman, 1996: 76) yang menyatakan bahwa hampir tidak ada keuntungan sama sekali bagi negara-negara sedang berkembang untuk menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara besar, yang ia ibaratkan sebagai hubungan negara-negara *Metropolis* dengan negara-negara *Satelit*, dimana negara-negara satelit lebih banyak memberikan keuntungan kepada negara-negara metropolis dan tidak sebaliknya. Selanjutnya Frank menganggap negara-negara maju sebagai metropolis sementara negara-negara berkembang sebagai satelit.

MOBILITAS TENAGA KERJA INDONESIA

Para TKI telah melakukan mobilitas horisontal, yaitu dengan menjadi tenaga kerja di beberapa negara, misalnya Arab Saudi, Abu Dhabi, Hongkong, Malaysia, Brunei, Korea Selatan, Amerika, Taiwan, dan lebih dari itu ada yang ke Singapura, Jepang dan Bahrein. Mobilitas horisontal tersebut perlu dilakukan untuk memperoleh peluang hidup yang lebih baik dibandingkan dengan tetap bekerja di desa masing-masing.

Migrasi (mobilitas horisontal) nampaknya menjadi pilihan rasional mengingat penghasilan mereka di negara-negara di atas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Ponorogo. Rata-rata TKI wanita (TKW) bekerja di sektor domestik atau sebagai pembantu rumah tangga yang berpenghasilan minimal sebesar Rp. 1.500.000 per bulan dibandingkan dengan bekerja pada sektor yang sama di pusat kota Ponorogo dengan gaji sebesar Rp. 250.000 per bulan. Demikian juga bila dilihat penghasilan dari seorang TKI yang bekerja di pabrikaan maka penghasilan minimal mereka adalah sebesar Rp. 2.700.000 per bulan dibandingkan dengan bekerja di bagian penjaga toko di pusat kota Ponorogo yang bergaji sebesar Rp. 400.000 per bulan. Selisih gaji yang begitu besar menjadikan mereka lebih memilih bekerja di luar negeri dari pada bekerja di Ponorogo pada bidang yang sama, yaitu pembantu rumah tangga dan karyawan perusahaan.

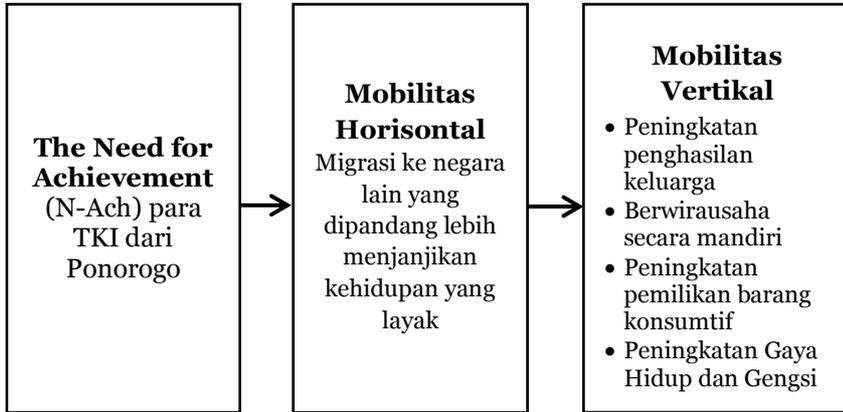
Secara umum para TKI telah mampu memperbaiki posisi sosial ekonomi mereka, yaitu secara ekonomi aset mereka telah bertambah. Mereka berhasil meningkatkan kepemilikan barang yang bersifat konsumtif, seperti hand phone, televisi, sepeda motor, mobil, tape recorder, maupun meubeller. Demikian juga mereka telah mampu meningkatkan aset yang investatif, seperti tanah, rumah, toko maupun tabungan. Sebagai contoh *Srt*, seorang TKW yang tinggal di Jalan Menur dan pernah bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga selama delapan tahun. Penghasilan sebagai TKW tersebut mampu untuk membeli tanah, sepeda motor, televisi, tape recorder dan untuk membangun pertokoan. Sariyati saat ini mempunyai lima buah toko yang disewakan dan ia sendiri juga mengelola sebuah toko kecil yang menyediakan keperluan rumah tangga atau disebut "*mracang*", yaitu antara lain sembako, kosmetik, barang-barang dari plastik dan lain-lain.

Srt mewakili beberapa responden yang telah menginvestasikan hasil jerih payahnya selama menjadi TKW di luar negeri. Lebih dari itu, ia tidak berhenti hanya berinvestasi saja tetapi juga melipatgandakan modalnya dengan berwirausaha "*mracang*". Hal ini menunjukkan bahwa mereka, para TKI, mempunyai etos kerja yang tinggi. Mereka mempunyai semangat N-Ach, seperti apa yang diteorikan oleh David

M. Clelland dalam bukunya Budiman (2003: 23). Mereka mempunyai dorongan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan mendapatkan kepastian tentang masa depan mereka serta tidak sekedar melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Dorongan yang kuat menjadikan mereka berani mengambil resiko walaupun tanpa perlindungan hukum dan politik yang memadai, baik berupa tindak melawan hukum yang dilakukan oknum di Indonesia maupun dari negara tujuan para TKI. Seperti diketahui bahwa telah sering terjadi "kecelakaan kerja" dialami para TKI yang menyebabkan cacat tetap atau bahkan kematian, tetapi hal tersebut tidak menyebabkan niat mereka surut untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri.

Pendapatan dari gaji selama menjadi TKI barangkali cukup bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Namun, itu semua belum cukup untuk memberikan kepastian tentang masa depan mereka. Keberanian untuk berwirausaha merupakan contoh riil langkah mereka untuk memperoleh kepastian tentang masa depan. Diantara mereka (responden) saat ini ada yang menjadi makelar, tukang, pengelola toko dan ada juga yang mengelola biro jasa PJTKI (Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia).

Hampir tidak ada pola hubungan yang bisa ditarik diantara etos kerja dan usaha untuk mandiri (berwirausaha) dengan lamanya kerja menjadi TKI atau besarnya gaji selama menjadi TKI. Sebagai contoh, *Swi* yang telah menjadi TKI di Korea Selatan selama lima tahun sebagai buruh pabrik dengan gaji sekitar Rp. 8.000.000 per bulan, memutuskan akan kembali lagi sebagai TKI di luar negeri. Hal ini berbeda dengan yang dialami oleh *Awd*, penduduk Desa Ngabar Kecamatan Siman yang bekerja di Arab Saudi selama lima tahun sebagai sopir dengan gaji Rp. 1.600.000 per bulan, memilih berwirausaha, yaitu mengelola bisnis alat pesta berupa terop dan mobil angkutan. Namun demikian, secara umum mereka mempunyai etos kerja yang baik untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan dan mendapatkan aset yang investatif yang bisa digambarkan dengan pola sebagai berikut:



Gambar 5. Pola Mobilitas Para TKI dari Ponorogo

Pada umumnya para TKI dan keluarganya mempunyai perilaku ekonomi yang konsumtif. Rata-rata hasil kerja berat mereka selama menjadi TKI dibelanjakan dalam bentuk biaya hidup, hand phone, perbaikan rumah, sepeda motor, membayar hutang, membeli meubeller dan alat-alat elektronika, seperti sound system dan televisi. Biaya hidup dan hand phone adalah contoh jenis pengeluaran tetap yang akan mengurangi jumlah tabungan mereka.

Meskipun besarnya angka belum bisa diperoleh secara pasti, namun bisa diperkirakan bahwa perbaikan rumah telah menyedot sebagian besar tabungan hasil kerja keras selama menjadi TKI di luar negeri, disusul kemudian dengan belanja sepeda motor. Para TKI dan keluarganya pada umumnya membelanjakan uangnya untuk membeli sepeda motor bermerk buatan Jepang, walaupun selain buatan Jepang juga beredar sepeda motor buatan negara lain, seperti China dan Korea Selatan. Perlu diketahui, bahwa sepeda motor buatan Jepang yang bermerk Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki yang beredar di pasaran mempunyai harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk dari negara lain tersebut. Perlu diketahui saat ini juga beredar produk-produk yang terbuat dari plastik yang berasal dari China yang menguasai pasar di kota ini walaupun rata-

rata dengan kualitas yang sangat rendah. Dari sini sangat nampak bahwa gaya hidup para TKI dan keluarganya mempunyai gaya hidup yang konsumtif.

Bila dihitung maka belanja sepeda motor, televisi, tape recorder, home theater, dan hand phone yang hampir semuanya adalah produk Jepang atau luar negeri, secara nominal bisa mencapai total Rp. 20.000.000 dan itu menjadi daftar belanja hampir semua TKI dan keluarganya. Dengan demikian, bisa digambarkan bahwa uang hasil kerja keras yang dikirim ke Indonesia, dalam bentuk remitansi melalui bank-bank pemerintah di Ponorogo, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama akan mengalir kembali ke negara-negara produsen sepeda motor dan alat-alat elektronik melalui belanja mereka. Hal ini menurut Andreas Gunther Frank (dalam Budiman; 1996: 76) sebagai situasi yang tidak menguntungkan negara-negara sedang berkembang dan sebaliknya lebih banyak menguntungkan negara-negara maju, yang oleh Frank disebut "Metropolis". Terhadap fenomena tersebut maka negara-negara maju akan memetik keuntungan sebagai berikut:

- a. Negara maju seperti Hongkong, Singapura, Jepang, Korea dan lain-lain bisa mendapatkan pekerja dengan gaji murah untuk menangani pekerjaan-pekerjaan yang mereka sudah tidak dimaui oleh warga negara mereka sendiri.
- b. Negara-negara maju seperti Jepang, China, dan Korea Selatan menjadikan kota Ponorogo, melalui gaya hidup konsumtif dari para TKI dan keluarganya, sebagai pasar potensial produk-produk mereka.

Gaya hidup yang konsumtif dari para TKI dan keluarganya telah membantu memacu cepat mengalirnya kembali uang mereka ke negara-negara maju melalui produk-produk mereka yang dibeli oleh para TKI dan keluarganya. Disatu sisi gaya hidup para TKI dan keluarganya telah merangsang sirkulasi uang dan perkembangan sektor swasta, seperti toko-toko penjual sepeda motor produk Jepang dan alat elektronik, seperti televisi, tape recorder, lemari es, mesin cuci, hand phone dan lain-lain. Disisi lain, perilaku tersebut banyak

berdampak pada perkembangan ekonomi kerakyatan atau sektor informal. Sektor ekonomi kerakyatan yang ikut merasakan uang para TKI adalah warung-warung nasi yang berada di sekitar bank-bank dimana para TKI mengambil tabungan atau para keluarga TKI mengambil uang transfer dan toko-toko dimana para TKI dan keluarga mereka belanja sepeda motor dan benda- benda elektronika.

Di depan sudah dibicarakan bahwa uang para TKI selain digunakan untuk belanja sepeda motor dan barang-barang elektronika juga banyak digunakan untuk perbaikan rumah. Dari perbaikan rumah inilah uang para TKI banyak menggerakkan ekonomi sektor informal dan ekonomi kerakyatan. Perbaikan rumah menjadikan para tukang batu, tukang kayu dan kuli batu di pedesaan mendapatkan pekerjaan lebih rutin, karena rata-rata para TKI melakukan perbaikan rumah secara total sehingga membutuhkan waktu cukup lama dan biasanya memakan waktu berbulan-bulan. Biasanya para tukang bangunan tadi (tukang batu, tukang kayu dan kuli batu) akan kebanjiran order untuk membantu pekerjaan perbaikan rumah, yang biasanya terjadi sepanjang musim kemarau.

Selain para tukang bangunan yang menikmati hasil jerih payah para TKI, para pengrajin batu bata dan genteng juga ikut merasakan uang para TKI tersebut. Semakin banyak para TKI yang melakukan perbaikan rumah maka semakin banyak pula pengrajin batu bata dan genteng yang menikmati pesanan tersebut. Hanya saja pada umumnya para TKI lebih banyak memesan genteng yang berasal dari luar kota, seperti dari kota Trenggalek, yang mempunyai kualitas lebih baik dari pada buatan lokal Ponorogo. Berbeda dengan genteng, maka untuk kebutuhan bata merah, para TKI cukup memesan dari produk lokal yang dianggap sudah memenuhi kebutuhan. Dengan demikian pemanfaatan produk lokal oleh para TKI yang sedang mempunyai kegiatan perbaikan maupun yang membangun rumah ikut menggerakkan dan menggeliatkan sentra-sentra industri batu bata maupun genteng dari tanah liat di Ponorogo dimana mereka juga merupakan bagian dari sendi-sendi ekonomi kerakyatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Budiman, 1996, "*Teori Pembangunan Di Negara Dunia Ketiga*", Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Revrisond Baswir, 2003, "*Di Bawah Ancaman IMF*", Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Khoirurrosyidin, Jusuf Harsono, Slamet Santoso, 2007, "*Mobilitas Vertikal Dan Pola Aliran Uang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Ponorogo*", Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor: 008/SP2H/DP2M/III/2007.
- Mansour Fakh, 2002, "*Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik*", Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rozy Munir, 1981, "*Dasar-Dasar Demografi*", Penerbit Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sunyoto Usman, 1998, "*Perkembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*", Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

PENGUSAHA MUSLIM PERKOTAAN DI KOTA PONOROGO ³

Dominasi Etnik Cina terhadap roda perekonomian nasional adalah sesuatu yang nyata. Demikian juga terhadap perekonomian lokal telah menjadi fenomena umum. Nampak sekali, menurut Marzali (1994: 40) dominasi ekonomi swasta golongan keturunan Cina mudah terlihat di kota-kota, yaitu melalui pusat-pusat perbelanjaan, ruko-ruko dan pertokoan di jalan-jalan utama yang sebagian besar dimiliki dan diusahakan oleh anggota golongan keturunan Cina. Hampir setiap kota besar di Indonesia memiliki Pecinan yang menjadi jantung perdagangan dalam kota. Setelah dikurangi aset BUMN, Pecinan di seluruh Indonesia menguasai 80% dari seluruh uang yang beredar di Indonesia.

Keberhasilan kelompok-kelompok tertentu bersifat lokal yang mampu bertahan untuk mengelola usaha perekonomian diantara dominasi Etnik Cina tidak banyak dijumpai di negeri ini. Kota Ponorogo adalah salah satu kota yang menunjukkan gejala-gejala tersebut. Golongan Masyarakat Muslim perkotaan di kota ini termasuk salah satu dari sedikit golongan di Indonesia yang mampu mempertahankan usaha perekonomiannya. Bahkan mereka berhasil mendominasi beberapa jenis usaha, seperti rumah makan, usaha transportasi, jasa penginapan, dan bahkan usaha pertokoan buku

³ Tulisan ini bersumber dari hasil penelitian yang berjudul: *Solidaritas Mekanik Masyarakat dan Survivalitas Pengusaha Muslim Perkotaan di Ponorogo* (Peneliti: Jusuf Harsono dan Slamet Santoso) Penelitian ini dibiayai oleh Ditjen Dikti, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Nomor: 185/SPPP/PP/DP3M/IV/2005

bacaan dan pakaian jadi. Untuk jenis usaha tersebut Masyarakat Muslim menguasai lebih 80 persen dari yang ada di Ponorogo.

Pada masa lalu, mulai tahun 1950-an sampai akhir 1960-an kota ini dikenal sebagai bagian dari jalur perdagangan batik bersama-sama dengan kota Solo, Yogyakarta, dan Pekalongan. Dan ketika batik menjadi primadona perekonomian lokal pada kurun waktu di atas, maka para pengusaha muslim perkotaan adalah pemegang kendalinya. Ketika komoditi batik mengalami kemerosotan, maka peran kaum muslim perkotaan terhadap jalannya perekonomian lokal juga mengalami kemerosotan yang berarti.

Regenerasi perekonomian dikalangan masyarakat Muslim perkotaan berjalan dengan sangat lamban. Setelah masa keemasan usaha batik berakhir pada awal tahun 1970-an, dunia usaha masyarakat muslim di perkotaan baru menemukan titik terang kemajuannya pada akhir tahun 1980-an. Jadi dunia usaha masyarakat muslim mengalami kelesuan selama kurang lebih 20 tahun. Merosotnya kekuasaan (Fadhely, 1995: 26). pengusaha muslim Ponorogo sejalan dengan merosotnya peran dan kemampuan GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) yang berpusat di Jakarta. Adanya kelesuan yang relatif lama tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai kewirswastaan kurang ditanamkan pada anak-anak mereka. Kenyataan menunjukkan bahwa anak-anak mereka banyak yang menekuni profesi yang tidak sejenis dengan para orang tua mereka seperti guru, dokter dan banyak pula yang mengadu nasib dikota lain.

Seperti diketahui bahwa (Fadhely, 1995: 26) salah satu sebab kemerosotan GKBI karena adanya perubahan sistem perekonomian nasional dari sistem ketat menjadi perekonomian liberal dan terbuka lebarnya pintu masuk modal asing.

Masyarakat muslim perkotaan kembali bangkit dari tidur panjangnya kurang lebih 10 tahun terakhir, sebagian berasal dari keluarga pembatik yang ketika itu adalah termasuk kelas menengah. Sementara itu yang lain berangkat dari kelas bawah. Para pengusaha Muslim generasi baru yang berlatar belakang keluarga pengusaha Batik pada masa lalu sebagian besar tidak lagi meneruskan usaha batik,

tetapi mengembangkan jenis usahanya sendiri. Sebagian ada yang bergerak dibidang usaha pertokoan, sebagian lagi ada yang bergerak dibidang jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan berangkat dari kelas bawah adalah mereka yang sebelumnya hanya seorang pegawai pada sebuah usaha tetetntu karena nelalui upaya yang gigih pada akhirnya mengantarkan mereka menjadi pengusaha tangguh melebihi para majikannya dahulu. Yang menarik dari fenomena tersebut di atas adalah bahwa para pengusaha muslim perkotaan yang sukses sebagian besar berafiliasi pada organisasi sosial keagamaan NU (Nahdlatul 'Ulama) dan Muhammadiyah. Hal ini berbeda dengan gambaran Castle bahwa kalangan NU banyak didukung santri petani. Sebaliknya fenomena ini sesuai dengan pendapat Kuntowijoyo (1985: 17). Perkembangan usaha perekonomian di kota Ponorogo ini perlu diikuti dengan cermat karena Ponorogo dengan pengusaha muslimnya pernah mewarnai perekonomian nasional khususnya pulau Jawa. Ponorogo adalah salah satu dari sedikit kota yang para pengusaha muslim pribuminya bangkit kembali dan mulai berkembang.

Fenomena lain dari kota Ponorogo yang perlu dicermati dalam hal kaitannya dengan survivalitas usaha perekonomian muslim perkotaan di Ponorogo adalah banyaknya pengusaha Cina yang masuk Islam. Dan yang menarik dari fenomena ini adalah bahwa sebagian dari mereka mengalami kemajuan usaha pertokoan, justru setelah memeluk agama Islam. Kemajuan usaha mereka tentu bukan terjadi secara kebetulan seperti halnya stereo tipe selama ini tetapi lebih disebabkan hal-hal lain yang perlu pengamatan scara lebih cermat karena kemajuan pengusaha muslim China tersebut bersamaan dengan bangkitnya pengusaha muslim pribumi. Pengamatan menunjukkan bahwa kemajuan dunia usaha di kalangan pengusaha muslim perkotaan tersebut bukan merupakan fenomena ekonomi biasa tetapi telah menjadi fenomena sosial.

ETIKA PROTESTAN DAN ETOS KERJA KAUM SANTRI

Weber (Budiman, 1996: 21) berpendapat bahwa kerja keras bagi kaum Calvinis adalah cara untuk memperoleh kepastian apakah

seseorang bisa masuk surga ataukah tidak. Keberhasilan kerja seseorang akan menentukan masa depannya setelah seseorang mati. Begitu pula sebaliknya bila seseorang mengalami kegagalan di dunia ini, hampir dapat dipastikan bahwa ia akan masuk neraka. Lewat karyanya yang terkenal, Weber (2000: 161) ingin menjelaskan bahwa nilai-nilai agama atau kultural bisa memberikan dorongan pada orang atau kelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu, terutama dalam bidang ekonomi. Dalam bukunya Weber memandang etik Protestan sebagai suatu interaksi supranatural bahwa bekerja itu adalah ibadah bagi kaum puritan (Protestan). Faktor-faktor yang dipertegas oleh Weber adalah memajukan keberlakuan faktor irasional dalam tindakan yang tampak dibimbing oleh rasionalitas yang keras seperti pada tindakan pemenuhan kebutuhan ekonomi (ekonomi ansich) atau bahkan juga akhirnya akan mengarah pada “bagaimana dapat meningkatkan kualitas hidup manusia atau dengan kata lain digiring ke arah sosio-ekonomi yang ditujukan oleh pengaruh doktrin agama”. Weber melihat etos kerja kaum Calvinis dengan mengamalkan ajaran kerja keras, jujur, hemat, dan tekun. Ajaran ini dilaksanakan karena bekerja adalah panggilan Tuhan, maka orang harus berusaha untuk menjadi pilihan Tuhan. Menurut Budiman (1996: 22), Etika Protestan menjadi sebuah nilai tentang kerja keras tanpa pamrih untuk mencapai sukses. Dia bisa ada di luar agama Protestan, dapat menjelma menjadi nilai-nilai budaya di luar agama. Dalam bukunya Bellah (1992: 121) menyatakan bahwa apa yang disebut Etika Protestan itu juga ada pada agama Tokugawa. Religi di Jepang telah mengajarkan sikap rajin dan hemat pada para pemeluknya selain mengajarkan kesetiaan pada keluarga dan negara. Karena itulah Jepang berhasil membangun kapitalisme dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam memahami fenomena yang ada Ismail (1997: 17) berpendapat bahwa setiap agama mempunyai ajaran yang spesifik mengenai kegiatan ekonomi bagi pemeluknya.

Motif-motif religi yang mendorong keberhasilan hidup seseorang tidak hanya kita temui pada masyarakat Eropa dan Jepang, tetapi juga bisa kita jumpai pada masyarakat Islam di Indonesia. Raharjo (1987) berpendapat, bahwa apa yang mendorong tumbuhnya pengusaha-

pengusaha kita di Indonesia ada persamaan yang besar sekali antara Etos Kerja Protestan dengan Etos Kerjanya Kaum Santri Pedagan. Terminologis “Etos Kerja kaum Santri Pedagang” tersebut diperkenalkan oleh Raharjo untuk menggambarkan keberhasilan para pengusaha muslim dalam mengembangkan usahanya di beberapa kota di Jawa pada tahun 1950-an seperti Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, Tegal, Ponorogo dan lain-lain. Hal yang demikian juga didukung oleh Usman (1998: 99) yang mengatakan bahwa sejarah kehidupan masyarakat Indonesia memperlihatkan adanya keterkaitan yang signifikan antara kedalaman penghayatan agama dan keagairahan dalam kehidupan ekonomi. Kelompok-kelompok tertentu yang tergolong menjalankan syariat agama dengan lebih bersungguh-sungguh dalam kehidupan sosial dan pribadinya kelihatan lebih mampu beradaptasi dalam kehidupan ekonomi.

Peneliti punya alasan kuat untuk ikut menggunakan terminologi ini karena Islam mempunyai ajaran memberikan tekanan kuat pada aktifitas ekonomi umatnya. Ismail (1997: 18) berpendapat bahwa kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek dari pelaksanaan tanggung jawabnya di muka bumi. Kesalahan bukan merupakan fungsi negatif dari kegiatan ekonomi yang produktif. Semakin saleh kehidupan seseorang seharusnya semakin produktif. Bahkan tiga dari 5 rukun Islam sangat terkait langsung dengan kegiatan ekonomi. Artinya seseorang bisa melaksanakan kewajiban shalat, zakat dan haji apabila mereka memiliki harta yang cukup. Lebih lanjut Ismail (1997: 22) menyatakan kegiatan ekonomi dalam Islam, meskipun konkretnya adalah kegiatan yang bersifat untuk mendapatkan kecukupan materi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan setelah mati dan akan tetap dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Islam tidak mengajarkan satu sistem ekonomi yang komprehensif, tetapi Islam mengajarkan landasan etika dan moral bagi para pemeluknya yang akan melakukan kegiatan ekonomi.

Sementara itu Burhan (1997: 17) berpendapat bahwa doktrin ekonomi dalam Islam terkait erat dengan tujuan hidup yang hakiki manusia. Oleh karena itu, membicarakan tujuan manusia dilihat dari kacamata ekonomi tidak bisa terlepas dari tujuan hidup. Dalam rangka

ini maka kegiatan ekonomi manusia menyatu dengan status manusia sebagai khalifah dan fungsi manusia untuk beribadah. Sebagai khalifah maka kegiatan ekonomi manusia harus dalam kerangka memakmurkan seluruh penghuni bumi seraya menjaga kelestariannya, sedang dikaitkan dengan ibadah maka kegiatan tersebut hendaknya ditujukan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Landasan etika-etika yang ditawarkan Islam kepada para penganutnya cukup jelas. Landasan etika yang diberikan pada produsen sama ketatnya dengan yang diberikan pada para konsumen. Selanjutnya Burhan (1997: 38) mengatakan ciri pertama perilaku seorang konsumen yaitu dia tidak bertujuan memaksimalkan kepuasan lahir, kecuali sampai batas moderat. Ciri kedua adalah bahwa benda dan jasa alat pemuas tersebut harus halal, baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya. Selanjutnya ia menambahkan bahwa perilaku produsen mempunyai ciri-ciri yang berbeda pula. Produsen yang Islami menganggap bahwa bekerja adalah bagian perintah Allah dan sebagai ibadah. Tujuannya bukan untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya, melainkan untuk berpartisipasi memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengharap ridlo Allah. Perilaku produsen tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Barang/jasa yang dihasilkan halal.
- b. Barang/jasa tersebut dihasilkan dengan mutu yang sebaik-baiknya.
- c. Membayar upah tenaga kerja secepat-cepatnya.
- d. Melakukan transaksi yang ada kaitannya dengan proses produksi secara halal.

Dalam hal ini Fadhely (1995: 14) berpendapat bahwa Islam pada prinsipnya mengajarkan kebaikan, dan telah mengatur kehidupan umatnya didunia dan diakhirat. Tidak terlepas pula ajaran perikehidupan menjalankan ekonomi. Dalam prinsip etika ekonomi pada hakekatnya adalah menjalankan bisnis yang jujur sesuai dengan akidah agama yang diyakininya. Ujian untuk berperilaku jujur dan mendapatkan berkah rizki yang diperoleh dari usaha bisnisnya itu.

Dengan demikian bila ditilik dari doktrin-doktrinnya maka etos kerja kaum santri ada kesamaan bila dibanding dengan kalangan Protestan di Barat. Bagi kaum protestan kerja keras dan “membelanjakan” hasil kerja karena dipandang sebagai ibadah. Menurut Nottingham (1996: 130), pencapaian surga adalah tujuan utama orang Kristen. Tujuan-tujuan sosial untuk mendapatkan harta dan kegiatan ekonomi ditekankan. Kekayaan harus dianggap sebagai suatu yang sangat penting untuk digunakan dan bukan untuk ditimbun atau ditumpuk. Hal yang sama juga kita dapati dalam Islam. Menurut Fadhely (1995: 35) bahwa aktifitas ekonomi dalam bentuk kolektif sesungguhnya adalah proses sosialisasi dari hasil-hasil ekonomi yang dicapai oleh masing-masing orang tersebut. Selanjutnya ia berpendapat bahwa suatu usaha membawa hasil maka ia berhak menikmati hasil itu untuk dirinya sendiri dan kemudian yang sebagian wajib diperuntukkan bagi kemakmuran orang banyak.

Terhadap kewajiban “membelanjakan” rezkinya tersebut untuk kegiatan-kegiatan sosial Burhan (1997: 38) berpendapat bahwa alokasi sumber-sumber ekonomi dilakukan melalui dua mekanisme yaitu mekanisme pasar dan non pasar. Pasar merupakan mekanisme utama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi, asal saja dalam pasar tersebut berlaku fair. Selain itu ada mekanisme di luar pasar melalui jalan infaq. Jalur infaq merupakan jalur pemerataan kemakmuran dalam masyarakat.

ETOS KERJA DAN SURVIVALITAS

Masyarakat ilmiah mempunyai pendapat dan batasan yang berbeda-beda tentang etos kerja. Namun demikian secara substansial mereka mempunyai pengertian yang sama tentang etos kerja. Secara umum mereka membangun pengertian bahwa yang dimaksud dengan etos kerja adalah semangat kerja yang didasari oleh nilai-nilai atau norma-norma tertentu. Sukriyanto (2000: 92), melalui tesisnya memberikan pengertian bahwa etos kerja adalah suatu semangat kerja yang dimiliki oleh masyarakat untuk mampu bekerja lebih baik guna memperoleh nilai hidup mereka.

Sementara itu Clifford Geertz memberikan pengertian bahwa etos kerja adalah elemen evaluatif yang bersifat nilai yang mengarah pada pekerjaan yang dianggap sebagai keharusan hidup baik dari diri sendiri atau sikap dasar terhadap diri sendiri. Karena etos kerja menentukan penilaian manusia yang diwujudkan dalam suatu pekerjaan, maka ia akan pula menentukan hasil-hasilnya. Geertz memandang ada keterkaitan yang erat antara etos kerja dengan survivalitas (daya tahan hidup) manusia dibidang ekonomi karena itu lebih jauh ia berteori bahwa semakin progresif etos kerja suatu masyarakat, semakin baik hasil-hasil yang akan dicapai baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini diperkuat temuan Weber (2000: 55) bahwa di beberapa negara di Eropa posisi-posisi penting dalam masyarakat seperti pemilik modal, staf terdidik maupun karyawan perusahaan yang mempunyai kemampuan (skill) tinggi kebanyakan adalah orang protestan.

Manusia bisa survive dengan dukungan etos kerja. Sukiyanto (2000: 74) lewat teorinya menemukan kenyataan bahwa para peternak sapi perah Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu Kotatif Batu Kabupaten Malang mempunyai daya tahan hidup sebagai akibat dari etos kerja mereka yang tinggi. Bagi mereka kerja dipahami sebagai ibadah. Kerja merupakan wujud pengabdian seorang hamba kepada Tuhan yang menciptakannya. Bekerja adalah merupakan kewajiban kepada Tuhan, diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

PERILAKU EKONOMI DAN SOLIDARITAS KONSUMEN

Perilaku ekonomi seseorang bisa jadi tidak hanya merupakan suatu tindakan yang memenuhi kebutuhan ekonomi semata. Menurut Weber (Damsar, 1997: 30-31), perilaku ekonomi seseorang bisa jadi merupakan suatu tindakan sosial, bila tindakan tersebut memperhitungkan perilaku orang lain. Memberi perhatian ini dilakukan secara sosial dalam berbagai cara. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa aktor selalu mengarahkan tindakannya kepada perilaku orang lain melalui makna-makna terstruktur. Aktor mengintegrasikan kebiasaan-kebiasaan, adat dan norma-norma yang dimiliki dalam

sistem hubungan sosial yang sedang berlangsung, tindakan ekonomi tidak dipandang sebagai fenomena stimulus-respon yang sederhana, tetapi lebih kepada hasil dari suatu proses yang dilakukan oleh individu dalam proses hubungan sosial yang sedang berlangsung. Tindakan ekonomi disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan hubungan sosial personal yang sedang berlangsung dari para aktor. Perilaku ekonomi di atas tidak hanya terjadi pada para pengusaha tetapi juga sikap para konsumen. Jaringan kerja hubungan ekonomi antar pelaku dengan pengusaha, dapat dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan non ekonomik. Hal semacam ini terjadi pada suatu masyarakat yang masih mempunyai ikatan emosional yang kuat baik karena ras, etnik maupun agama. Dan keadaan yang demikian oleh Durkheim (Kinlock, 1997) disebut sebagai solidaritas mekanik, banyak dijumpai pada masyarakat tradisional.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila kita dapati adanya suatu kelompok masyarakat tertentu yang cenderung lebih suka melakukan transaksi usaha dengan didasari pertimbangan-pertimbangan non ekonomi seperti karena adanya kesamaan ras, agama, sekte dan lain-lain, meskipun sebenarnya transaksi bisa saja dilakukan dengan suatu kelompok masyarakat tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomik semata.

PENGUSAHA MUSLIM PERKOTAAN DI PONOROGO

Pengusaha muslim perkotaan Ponorogo menjalankan usahanya pada umumnya terkonsentrasi di tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Mangkujayan, Banyudono dan Bangunsari yang semuanya terletak di wilayah Kecamatan Kota Ponorogo yang secara geografis berada di pusat Kota Ponorogo. Sebagian besar pengusaha muslim yang bergerak dibidang toko meubel beroperasi di Kelurahan Mangkujayan, di Jalan Urip Sumoharjo meskipun disitu juga terdapat beberapa pengusaha toko meubel Cina. Sebagian besar pengusaha muslim yang bergerak pada usaha toko pakaian jadi terkonsentrasi di Kelurahan Banyudono dan Bangunsari terutama di Jalan Jaksa Agung, Jalan Bayangkara, Jalan Sukarno-Hatta dan Pasar Lanang.

Berbeda dengan dua jenis usaha seperti yang telah disebutkan didepan maka untuk jenis-jenis usaha yang lain seperti apotik, hotel, rumah makan dan toko swalayan, wilayah penyebarannya lebih merata di banyak kelurahan di pusat kota. Sementara itu sampai saat ini kawasan Jalan Panglima Jenderal Sudirman adalah satu-satunya jalan protokol yang belum bisa ditembus oleh pengusaha muslim pribumi. Pada jalan tersebut belum terdapat pengusaha muslim pribumi yang mempunyai usaha yang bisa bersaing dengan pengusaha Cina.

Menurut kurun waktunya profil pengusaha muslim pribumi perkotaan Ponorogo bisa dibagi dua yaitu sebelum merosotnya Koperasi BAKTI dan sesudah merosotnya Koperasi BAKTI.

a. Usaha Perekonomian Masyarakat Muslim Perkotaan Sebelum Runtuhnya Koperasi BAKTI.

Sejak jaman penjajahan Belanda masyarakat Ponorogo adalah masyarakat pedagang. Bermula dari masyarakat petani pedesaan yang ingin memasarkan hasil pertanian mereka berupa 'kluwak' dan hasil industri mereka berupa gula tebu, karena semakin banyaknya hasil pertanian mereka, maka merekapun semakin sulit untuk memasaarkannya. Lama-lama muncul pengusaha pengepul dari kota yang rata-rata berlatar belakang agama Islam cukup kuat dan lebih berpendidikan. Karena semangat kerja dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi ini pula maka usaha pengepul ini menjadi sangat pesat karena mulai bisa berkomunikasi dan membuat jaringan kerja dengan pedagang kota lain di antaranya dengan kota Solo. Karena adanya jaringan kerja antar kota inilah pada akhirnya membuat para pengepul ini tidak mengalami kesulitan menampung semua hasil pertanian dan lebih dari pada itu para penguaha tersebut bisal mensuplai kebutuhan masyaralat Ponorogo terhadap barang-barang dari luar kota. Karena sering berkomunikasi dengan para pengusaha Surakarta itulah banyak para pengusaha muslim Ponorogo mulai menjadi anggota SDI (Serikat Dagang Islam) di Surakarta.

Dengan menjadi anggota SDI tersebut pengusaha Ponorogo mulai mengenal dunia batik. Berangkat dari banyaknya ditemukan bahan-bahan dari tumbuhan yang digunakan untuk melukis batik

seperti tom dan kenet, maka pengusaha Ponorogo mulai memproduksi batik dan pada akhirnya terbentuklah sentra-sentra industri batik yang sekarang peninggalannya berupa rumah-rumah pembatik di Kelurahan Nologaten, Cokromenggalan dan Kertosari.

Pertumbuhan sentra-sentra industri batik dengan segala aktifitasnya telah merangsang Ponorogo tumbuh sebagai kota dagang. Pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan batik sangat pesat karena kain batik produksi Ponorogo selalu unggul dipasaran karena bisa menembus pasar dengan harga paling murah. Hal ini disebabkan bahan-bahan pewarna batik tidak perlu didatangkan dari luar kota. Di Ponorogo mudah didapati tumbuhan tom dan kenet yang menjadi bahan baku pewarna batik.

Dalam mengorganisasi perdagangan dan industri batik para pengusaha mendirikan Koperasi Batik BAKTI yang tujuannya mempermudah masyarakat pengusaha batik menjadi anggota untuk memperoleh bahan-bahan kimia sebagai bahan dasar pembuatan batik yang waktu itu masih diimpor dari Belanda. Namun demikian pada akhirnya kemajuan Koperasi Batik BAKTI mengalami hambatan dengan keluarga beberapa pengurus dan sebagaian anggota Koperasi Bakti untuk membentuk koperasi sendiri dengan nama Koperasi Pembantik. Koperasi Batik BAKTI banyak beranggotakan Kelompok Kulon (orang-orang Muhammadiyah), sementara Koperasi Pembatik banyak beranggotakan Kelompok Etan (orang-orang Nahdlatul Ulama). Melalui penarikan iuran dari setiap yard (0,92 m) kain mori yang dibeli para pengusaha batik, maka akhirnya Koperasi Batik BAKTI berhasil mendatangkan 100 buah mesin pembuat kain mori dari Inggris. Dan sebuah pabrik mori di desa Niten. Dengan demilikinya sebuah pabrik mori maka nilai kompetitif kain batik dari Ponorogo semakin tinggi dan mulai menggeser pasaran batik dari Jogja dan Solo, bahkan pasaran batik Ponorogo sampai keluar Pulau Jawa seperti Pulau Sumatra dan Kalimantan. Masa kejayaan batik Ponorogo adalah masa kejayaan masyarakat muslim dalam menguasai perekonomian Ponorogo.

Dengan berkembangnya usaha batik di Ponorogo maka berkembang pula sifat usaha masyarakat muslim pribumi perkotaan di Ponorogo dari usaha perdagangan hasil-hasil pertanian menjadi usaha industri batik dan tentu saja juga merubah sifat kota Ponorogo dari kota perdagangan menjadi kota industri karena beberapa desa, yang kini dikenal Kelurahan yaitu Nologaten, Cokromengalan dan Kertosari telah menjadi sentra industri.

Penyebab kemerosotan pengusaha batik Ponorogo adalah sama dengan kemerosotan pengusaha batik di Jogja, Surakarta, Pekalongan dan Tegal. Seiring merosotnya batik itu pulalah merosot pula peranan pengusaha muslim Ponorogo dalam kegiatan perekonomian Ponorogo pada umumnya.

b. Usaha Perekonomian Masyarakat Muslim Perkotaan Setelah Runtuhnya Koperasi BAKTI

Sepuluh tahun sejak runtuhnya industri batik di Ponorogo yang diikuti dengan runtuhnya dominasi pengusaha muslim Ponorogo maka hampir sulit ditemui adanya sisa-sisa kejayaan pengusaha muslim pribumi selain rumah-rumah besar berarsitektur lama milik para pengusaha batik yang dibangun pada masa kejayaan mereka yang kini sudah mulai kurang terawat. Beberapa aset penting untuk koperasi milik pengusaha batik mulai dijual ke pengusaha Cina. Regenerasi batik, baik yang tergabung dalam koperasi BAKTI, koperasi PEMBATIK maupun yang mandiri, tidak terjadi karena anak-anak mereka lebih tertarik untuk menekuni profesi yang lain setelah menyelesaikan studi mereka. Ada yang jadi pengelola sekolah, pegawai, dan lain-lain.

Baru pada pertengahan tahun 80-an usaha perekonomian yang dikelola masyarakat muslim menunjukkan kegairahannya baik yang bergerak pada usaha perdagangan dengan mengelola toko, jasa angkutan, perhotelan, rumah makan dan lain-lain. Para pengusaha tersebut ada yang berangkat dari keluarga yang pernah berkecimpung pada industri batik maupun yang bukan. Bahkan sebagian dari mereka adalah pendatang dari luar kota.

Pada awal tahun 2000-an bisa dianggap sebagai tahun kejayaan pengusaha muslim di Ponorogo karena pada tahun tersebut pengusaha muslim pribumi telah mendominasi beberapa jenis usaha pertokoan pakaian jadi, meublar, rumah makan, apotik dan perhotelan.

Etos Kerja Pengusaha Muslim Perkotaan

Tidak bisa dipungkiri bahwa para pengusaha muslim perkotaan Ponorogo menjadi pengusaha yang sukses berangkat dari nol dengan pengertian lain mereka tidak berangkat disertai dengan modal usaha yang besar. Mereka berangkat usaha dengan modal semangat dan ketrampilan. Yang tidak kalah menarik dari etos kerja mereka adalah bahwa tingginya etos kerja mereka tidak hanya di dorong oleh motif-motif ekonomi semata tetapi juga oleh motif religi dan sosial.

Mereka percaya betul bahwa puluhan juta rupiah yang ia keluarkan dalam dua bentuk kegiatan tersebut akan diganti oleh Allah dengan kemudahan rejeki melalui kemajuan usaha mereka. Menunaikan ibadah haji adalah dalam rangka mereka memenuhi motivasi religi, sementara itu dengan membayar zakat mereka juga berusaha memenuhi motif religi di satu sisi tetapi disisi lain mereka juga bermaksud memenuhi motif sosial karena zakat yang mereka keluarkan tidak hanya untuk membantu masjid saja tetapi juga untuk kegiatan sosial seperti memberikan shodaqoh untuk panti asuhan dan menyalurkan beras untuk kaum miskin pada malam Idu; Fitri, suatu Hari Raya besar bagi kaum muslim sebagai malam penutupan pada bulan puasa. Fenomena yang diberikan oleh Fadhely dinamakan sebagai aktifitas ekonomi dalam bentuk kolektif yang sesungguhnya merupakan proses sosialisasi hasil-hasil ekonomi yang dicapai oleh masing-masing orang tersebut.

Dari kedua macam kegiatan ibadah baik haji ataupun membayar zakat kita bisa memahami bahwa etos kerja mereka selain digerakkan oleh motif ekonomi juga digerakkan oleh motif lain yaitu religi dan sosial. Sementara itu bila dihitung secara ekonomi setiap pengusaha

tersebut dalam melaksanakan dua macam kegiatan tersebut harus mengeluarkan puluhan juta rupiah yang berarti tambahan investasi yang cukup besar untuk sebuah usaha di kota Ponorogo. Bagi seorang pengusaha yang etos kerjanya tidak didorong oleh suatu motif diluar ekonomik maka pengeluaran uang puluhan juta rupiah adalah penghamburan yang tidak perlu dan tidak masuk akal. Karena untuk mendapatkan uang sebanyak itu mereka harus bersusah payah.

Hasil temuan tersebut di atas, menunjukkan bahwa para pengusaha muslim pribumi di kota Ponorogo mempunyai etos kerja yang tinggi. Mereka cukup ulet dan sebagian dari mereka berangkat dari nol dan hanya berbekal semangat, pengalaman dan ketrampilan. Tingginya etos kerja mereka ternyata tidak hanya didorong oleh motif ekonomik, yaitu motif untuk memenuhi kebutuhan hidup semata tetapi juga didorong oleh motif sosial yaitu keinginan untuk membelanjakan keuntungan usaha untuk kepentingan sosial, dan motif religi yaitu keinginan untuk membelanjakan sebagian hartanya untuk kepentingan keagamaan atau untuk memperoleh imbalan dari Tuhan. Adanya motif ekonomi bisa kita lihat dari banyak dimilikinya barang-barang pribadi seperti rumah bagus, mebeler berkelas, alat-alat elektronik sampai alat transportasi seperti sepeda motor dan mobil. Adanya motif religi bisa kita lihat dari kuatnya keinginan mereka untuk pergi haji. Dan motif sosial bisa dilihat dari antusiasme mereka untuk membayar zakat baik zakat fitrah maupun zakat harta.

Konsep etika protestan yang ditemukan Weber (2000) yang menggariskan bahwa kerja keras adalah untuk memperoleh kepastian apakah seseorang bisa masuk surga atautakah tidak, juga bisa di temui pada para pengusaha muslim di Ponorogo. Dengan kerja keras sebagai pengusaha mereka bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Lebih dari pada itu mereka juga membelanjakan hartanya untuk kepentingan sosial seperti mengeluarkan zakat di bulan Ramadhan dan sebagainya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kepentingan sosial harta yang diperoleh lewat usaha ekonomi yang mereka kelola juga digunakan untuk meningkatkan aktifitas spiritual mereka yaitu dengan pergi haji ke Makkah untuk memenuhi salah satu kewajiban

agama bagi seorang muslim yang membutuhkan puluhan juta rupiah untuk biaya perjalanan. Apa yang telah ditemukan pada para pengusaha muslim Ponorogo bahkan lebih dari pada apa yang telah ditemukan Weber pada kaum calvinis. Apa yang dilakukan oleh para pengusaha muslim pribumi di Ponorogo tidak sekedar melaksanakan etika protestan yang dicirikan Weber (Sukiyanto, 2000) dengan kerja keras, jujur, hemat, dan tekun, para pengusaha muslim Ponorogo juga merupakan para produsen yang Islami seperti yang dicirikan oleh Burhan (1997: 38) dengan: a) Barang atau jasa yang dihasilkan halal; b) Barang atau jasa yang dihasilkan dengan mutu yang baik; c) Membayar upah tenaga kerja secepatnya; dan d) Melakukan transaksi yang ada kaitannya dengan proses produksi secara halal. Sejauh ini tidak ada pengusaha muslim yang menghasilkan barang atau jasa yang tidak halal, dan hal ini terjadi tidak secara kebetulan. Mereka memilih jenis usaha dan menjalankan usaha mereka dengan bekal pemahaman yang cukup tentang ajaran Islam.

Solidaritas Mekanik dan Tindakan Sosial

Para pengusaha muslim pribumi di Ponorogo secara sengaja menunjukkan dirinya kepada para konsumen bahwa mereka betul-betul pengusaha muslim yang mencoba meyakinkan bahwa aktifitas usaha mereka dikelola secara Islami. Bagi yang berusaha dibidang toko pakaian akan banyak memajang beragam busana muslimah dan perlengkapan sholat. Sementara itu bagi yang mengelola toko buku bacaan akan memenuhinya dengan buku-buku ajaran Islam. Sedang mereka yang berusaha mengelola rumah makan selain menyajikan menu-menu yang tidak dilarang oleh ajaran Islam mereka juga memajang kaligrafi berbahasa Arab.

Semua cara yang dilakukan oleh para pengusaha muslim tersebut untuk memperoleh respon positif dari konsumen, yang demikian menurut Weber (Ritzer, 1992; 42) sering disebut sebagai tindakan sosial. Menurut Weber (Damsar, 1997; 30-31) perilaku ekonomi seseorang bisa jadi merupakan tindakan sosial bila tindakan tersebut memperhatikan perilaku orang lain. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa

memberi perhatian dilakukan seseorang secara sosial dalam berbagai cara, aktor mengarahkan tindakan kepada perilaku orang lain melalui makna-makna terstruktur. Aktor menginterpretasikan kebiasaan-kebiasaan, adat dan norma-norma yang dimiliki dalam sistem hubungan sosial yang sedang berlangsung, tindakan ekonomi tidak dipandang sebagai fenomena stimulus respon yang sederhana, tetapi lebih kepada hasil dari suatu proses yang dilakukan oleh individu dalam proses hubungan sosial yang sedang berlangsung.

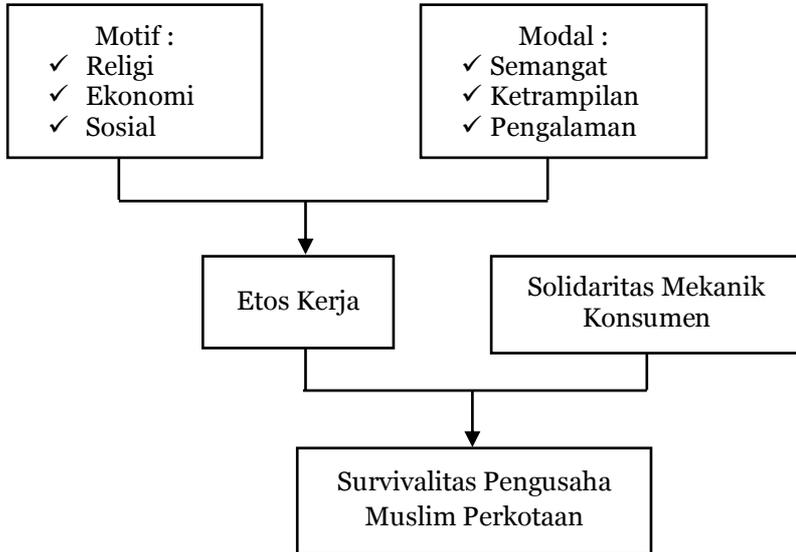
Dengan demikian para pengusaha melakukan tindakan sosial dalam rangka memperoleh respon balik dan mendorong tumbuhnya solidaritas mekanik dari masyarakat Ponorogo yang mayoritas beragama Islam. Hal yang dilakukan oleh para pengusaha muslim pribumi tersebut nampaknya membuahkan hasil dengan semakin banyaknya konsumen yang berkunjung ke berbagai usaha yang dikelola oleh pengusaha muslim pribumi.

Survivalitas Masyarakat Muslim Perkotaan Ponorogo

Kemajuan usaha dari para pengusaha muslim perkotaan selain ditentukan oleh etos kerja pengusaha muslim sendiri juga dipengaruhi oleh pandangan maupun sikap masyarakat konsumen. Selain pertimbangan ekonomis semata seperti barang berkualitas, harga dan pelayanan baik, konsumen banyak juga yang melakukan transaksi karena pertimbangan-pertimbangan emosional.

Solidaritas mekanik ini dilakukan oleh para konsumen karena mereka merasa wajib untuk bertransaksi dengan sesama muslim sepanjang persyaratan ekonomis seperti harga, barang bagus dan lain-lain sudah terpenuhi. Solidaritas mekanik ini menunjukkan kuatnya ikatan emosi masyarakat muslim Ponorogo terutama karena dorongan kesamaan agama. Kuatnya ikatan emosi yang disertai tingginya religiusitas warga, fanatik memegang aqidah, menjadikan dunia usaha yang digeluti pengusaha mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk berkembang.

Beberapa pengusaha Cina yang mencoba mengembangkan usaha rumah makan mengalami kegagalan karena sikap fanatik warga masyarakat Ponorogo. Warga Ponorogo yang sebagian besar adalah penganut agama Islam yang taat akan berusaha untuk tidak bersentuhan dengan rumah makan yang dikelola Cina karena khawatir dengan masakan Cina yang khas dengan minyak babi, sementara masyarakat muslim faham betul bahwa babi adalah haram hukumnya menurut agama Islam. Beberapa rumah makan Cina yang pernah mencoba bangkit selalu mengalami kegagalan karena diterpa isue minyak dan daging babi. Situasi dan sikap masyarakat yang demikian tentu sangat menguntungkan pengusaha rumah makan muslim. Tidak heran bila sampai sekarang seluruh rumah makan yang besar hanya dimiliki pengusaha muslim perkotaan. Beberapa rumah makan Chinese Food ternyata dimiliki para pengusaha muslim Ponorogo. Dari beberapa temuan di atas maka bisa dilihat skema pola umum survivalitas masyarakat muslim perkotaan Ponorogo sebagaimana dalam gambar 6 (Jusuf H. dan Slamet S.; 2005).



Gambar 6. Survivalitas Masyarakat Muslim Perkotaan Ponorogo

DAFTAR PUSTAKA

- Bellah, Robert M, 1996, "*Religi Tukugawa, Akar-Akar Budaya Jepang*", Penerbit PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Budiman, Arief, 1996, "*Teori Pembangunan Dunia Ketiga*", Penerbit PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Burhan, 1997, "*Memberdayakan Ekonomi Umat : Suatu Kajian Suatu Kajian Konsepsional Dan Beberapa Bukti Empiris*", Lintasan Ekonomi, Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi Univ. Brawijaya, Malang.
- Damsar, 1997, "*Sosiologi Ekonomi*", Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Durkheim, Emile, 1994, "*The Division of Labor in Society*", Free Press, New York.
- Fadhely, Mohamad, 1995, "*Meneropong Kehidupan Ekonomi Umat Islam, Peradaban Islam, Kapitalisme dan Budaya Cina di Indonesia*", Penerbit Golden Press, Jakarta.
- Ismail, Munawar, 1997, "*Islam Kapitalisme dan Sosialisme; Studi Komparatif Sistem Ekonomi*", Lintasan Ekonomi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, Edisi Khusus Januari-April 1997.
- Jusuf Harsono dan Slamet Santoso, 2005, "*Solidaritas Mekanik Masyarakat dan Survivalitas Pengusaha Muslim Perkotaan di Ponorogo*", dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Nomor : 185/SPPP/PP/DP3M/IV/2005, tanggal 11 April 2005
- Kinlock, Graham C, 1997, "*Sociological Theory, It's Development and Major Paradigma*", Florida State University, Me Graw Hill Book Company.
- Kuntowijoyo, 1985, "*Muslim Kelas Menengah Indonesia Dalam Mencari Identitas*", Prisma, LP3ES.

- Marzali, Amin, 1994, "*Kesenjangan Sosial Ekonomi Antar Golongan Etnik, Kasus Cina-Pribumi di Indonesia*", Prisma, LP3ES.
- Nottingham, Elizabeth K, 1996, "*Agama dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama*", Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ritzer, George, 1992, "*Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*", Penerbit Rajawali Press, Jakarta.
- Soekamto, Soerjono, 1985, "*Max Weber, Konsep-Konsep Dasar Dalam Sosiologi*", Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.
- Sukiyanto, 2000, "*Etose kerja Salah Satu Faktor Survivalitas Peternak Sapi Perah, Studi Kasus Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu Kotatif Batu Kabupaten Malang*", Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
- Usman, Sunyoto, 1998, "*Perkembangan Dan pemberdayaan Masyarakat*", Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Weber, Max, 2000, "*Etika Protestan Dan Semangat Kapitalisme*", Pustaka Prometheus.

SWADAYA MASYARAKAT 4

Secara mendasar, kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh permasalahan ekonomi semata tetapi lebih bersifat multidimensional dengan akar permasalahan terletak pada sistem ekonomi dan politik yang ada. Seringkali permasalahan kemiskinan yang ada di suatu masyarakat disebabkan adanya kebijakan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan masyarakat, sehingga kebanyakan dari masyarakat tidak mempunyai akses yang memadai ke sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kehidupan yang layak. Akibat yang sering ditimbulkan adalah masyarakat menjadi terpaksa hidup di bawah standart dan tidak mampu untuk mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan mereka, baik dari segi ekonomi, pemenuhan kebutuhan fisik, sosial maupun politik.

Permasalahan kemiskinan tersebut di atas, jika tidak segera ditangani akan semakin memperparah kondisi masyarakat miskin yang banyak ditandai adanya etos kerja yang sangat lemah, rendahnya semangat menghadapi permasalahan hidup dan adanya kebiasaan buruk yang terpaksa mereka lakukan sebagai jalan pintas untuk mempertahankan kehidupan. Permasalahan ini jika dibiarkan terlalu lama dan berlangsung berturut-turut akan melahirkan budaya kemiskinan yang sangat sulit diberantas.

⁴ Tulisan ini bersumber dari hasil penelitian yang berjudul: *Dampak Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) atau PNPM Mandiri Perkotaan Terhadap Peningkatan Swadaya Masyarakat* (Peneliti: Slamet Santoso). Dibiayai oleh Dana Pembinaan Penelitian (DPP) Universitas Muhammadiyah Ponorogo Tahun Anggaran 2010/2011, dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor: 065/1/II/K.1/IV/2011

Upaya penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan melalui berbagai program yang digulirkan oleh pemerintah. Namun upaya tersebut lebih banyak terfokus pada peningkatan penghasilan masyarakat miskin, seperti pemberian kredit lunak, bantuan langsung masyarakat dan lain-lain. Tidak dapat disangkal bahwa upaya tersebut mampu mendorong adanya peningkatan penghasilan masyarakat miskin, tetapi tidak serta merta mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di masyarakat. Kesalahan mendasar permasalahan tersebut adalah melihat persoalan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka karena rendahnya penghasilan (ekonomi) mereka. Dalam hal ini, peningkatan penghasilan masyarakat seolah-olah menjadi "*obat mujarab*" untuk memecahkan segala persoalan kemiskinan yang ada. Jika dikaji lebih dalam, akar kemiskinan justru bukan pada penghasilan tetapi banyak diakibatkan adanya kebijakan politik yang tidak adil sehingga masyarakat miskin menjadi tersingkir dan tidak mampu mengakses berbagai sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh mereka untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang layak.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993, tentang program penanggulangan kemiskinan, maka pemerintah telah banyak melakukan intervensi percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Intervensi tersebut meliputi tiga hal, yaitu bantuan modal, penyediaan sarana dan prasarana, dan pendampingan masyarakat. Beberapa program yang telah digulirkan antara lain adalah IDT, Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pembangunan Jalan Poros Desa (PJPD), Program Pengembangan Kecamatan (PPK) atau PNPM, P2MPD, PDM-DKE, JPS Khusus, dan P2KP (PNPM Mandiri Perkotaan). Program penanggulangan kemiskinan yang memiliki intervensi bantuan modal, penyediaan sarana dan prasarana, dan pendampingan masyarakat antara lain PDM-DKE, P2MPD, PPK (PNPM), P2KP (PNPM Mandiri Perkotaan), dan Gerdu Taskin (dari Propinsi Jawa Timur).

KELEMAHAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah masih banyak bersifat parsial dan sektoral, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, tercipta benih fragmentasi sosial, menurunnya modal sosial yang ada di masyarakat (seperti gotong royong, musyawarah, keswadayaan dan lain-lain).

Menurunnya modal sosial yang ada di masyarakat akan berdampak pada pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian untuk mengatasi persoalan secara bersama-sama. Persoalan tersebut sering disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pihak pengelola program kemiskinan dan pemimpin (tokoh) masyarakat, yang cenderung tidak adil, tidak transparan dan tidak peduli terhadap masyarakat miskin, sehingga banyak menimbulkan kecurigaan, stereotip dan skeptisme diantara masyarakat penerima program.

Pada dasarnya keberadaan kelembagaan masyarakat, yang dibentuk untuk mensukseskan program penanggulangan kemiskinan, yang belum berdaya disebabkan oleh karakteristik lembaga masyarakat tersebut yang tidak mengakar dan tidak representatif. Orientasi kepentingan dari pihak luar, kepentingan kelompok, maupun kepentingan pribadi masih banyak mendominasi dalam kelembagaan masyarakat yang dibentuk dalam suatu program penanggulangan kemiskinan, sehingga berdampak tidak adanya komitmen dan kepedulian terhadap kondisi wilayah, termasuk masyarakat miskin. Persoalan kelembagaan masyarakat tersebut dapat berdampak munculnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap berbagai bentuk kelembagaan masyarakat yang ada, dan akhirnya masyarakat tidak peduli dan tidak bersedia membantu mensukseskan program penanggulangan kemiskinan yang ada di daerahnya.

Berdasarkan berbagai persoalan atau kelemahan program penanggulangan kemiskinan tersebut di atas, maka perlu adanya perbaikan terhadap pendekatan dan metodologi penanggulangan

kemiskinan, yaitu ke arah perubahan perilaku atau sikap dan cara pandang masyarakat yang senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai universal kemanusiaan (*moral*), prinsip kemasyarakatan (*good governance*), dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Buku Pedoman P2KP; 2004).

Perubahan perilaku atau sikap dan cara pandang masyarakat merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari. Kemandirian lembaga masyarakat dibutuhkan dalam rangka membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih berorientasi kemasyarakat miskin (*pro poor*) dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), baik ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan (termasuk perumahan dan pemukiman), maupun sosial.

Gambaran lembaga masyarakat di atas, hanya akan dapat dicapai apabila orang-orang yang diberi amanat sebagai pemimpin masyarakat tersebut merupakan kumpulan dari orang-orang yang peduli, memiliki komitmen kuat, ikhlas, relawan, dan jujur serta mau berkorban untuk kepentingan masyarakat miskin, bukan untuk pengambil keuntungan bagi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Tentu saja hal ini bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah, karena upaya-upaya membangun kepedulian, kerelawanan, dan komitmen tersebut pada dasarnya terkait erat dengan proses perubahan perilaku masyarakat.

PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP)

Proyek Penganggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) pertama kali masuk di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2005 dan sampai saat ini program tersebut masih berjalan dengan baik. Saat ini P2KP namanya diganti dengan PNPM Mandiri Perkotaan. Lokasi program di Kabupaten Ponorogo adalah di Kecamatan Ponorogo atau disebut Kecamatan Kota, dengan sasaran sebanyak 19 (sembilan belas) kelurahan. Dana program yang dialokasikan untuk wilayah tersebut sebesar Rp. 3.750.000.000,- dengan pembagian anggaran masing-masing kelurahan antara Rp. 150.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- (berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah Keluarga Pra Sejahtera).

Terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, P2KP meyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan proses perubahan perilaku masyarakat adalah melalui pendekatan pemberdayaan atau proses pembelajaran (*edukasi*) masyarakat dan penguatan kapasitas untuk mengedepankan peran pemerintah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakatnya. Kedua substansi P2KP tersebut sangat penting sebagai upaya proses transformasi P2KP dari "*tataran proyek*" menjadi "*tataran program*" oleh masyarakat bersama pemerintah daerah setempat. Bagaimanapun harus disadari bahwa upaya dan pendekatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi perhatian pemerintah pusat, melainkan justru yang terpenting harus menjadi prioritas perhatian dan kebutuhan masyarakat bersama pemerintah itu sendiri (Buku Pedoman P2KP; 2004).

Selanjutnya dijelaskan bahwa substansi P2KP sebagai proses pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat dilakukan dengan terus menerus untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan kokoh untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Proses pembelajaran tersebut di tingkat masyarakat berlangsung selama masa

proyek P2KP maupun pasca proyek P2KP oleh masyarakat sendiri dengan membangun dan melembagakan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK). Dengan demikian, penguatan lembaga masyarakat yang dimaksud P2KP terutama menitikberatkan pada upaya penguatan pelakunya untuk mampu menjadi pelaku nilai dan pada gilirannya mampu menjadi motor penggerak dalam melembagakan dan membudayakan kembali nilai-nilai universal kemanusiaan (gerakan moral), prinsip-prinsip kemasyarakatan (gerakan good governance), serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (gerakan Tridaya), sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat.

Substansi P2KP sebagai penguatan kapasitas dalam rangka mengedepankan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, dilakukan melalui pelibatan intensif Pemda pada pelaksanaan siklus kegiatan P2KP, penguatan peran dan fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPK-D) agar mampu menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (DSPK-D) dan PJM Pronangkis Kota/Kabupaten berbasis aspirasi dan program masyarakat (Pronangkis Kelurahan), serta mendorong dan melembagakan Komunikasi Belajar Perkotaan (KBP). Disamping itu, P2KP juga mendorong kemandirian dan kemitraan masyarakat bersama pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Dengan demikian, pelaksanaan P2KP sebagai "gerakan bersama membangun kemandirian dan pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai-nilai universal", diyakini akan mampu membangun kesadaran kritis dan perubahan perilaku individu ke arah yang lebih baik.

Perubahan perilaku individu yang secara kumulatif akan menimbulkan perubahan kolektif pada masyarakat. Hal tersebut merupakan inti dari pendekatan TRIDAYA, yaitu proses pemberdayaan masyarakat agar terbangun: *Daya Sosial* sehingga tercipta masyarakat efektif, *Daya Ekonomi* sehingga tercipta masyarakat produktif, dan *Daya Pembangunan* sehingga tercipta masyarakat pembangunan yang peduli lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Harus disadari bahwa untuk melakukan upaya “*penyadaran*” masyarakat menuju perubahan sosial atau transformasi sosial sebagaimana yang diharapkan masih memerlukan waktu yang tidak singkat dan perlu diupayakan secara terus menerus secara berkesinambungan. Salah satu bentuk “*penyadaran*” dimaksud adalah melalui *Community Development*, yang sering diterjemahkan sebagai pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat.

Menurut pendapat Riza Primahendra (2006), bahwa pada saat ini *Community Development* telah mengalami proses pengkayaan sehingga menjadi sebuah pendekatan yang multi aspek dan sekarang secara umum terdiri dari beberapa aspek kunci sebagai berikut:

- a. Adalah sebuah proses “*akar rumput*”. *Community Development* merupakan proses yang terjadi di masyarakat lokal dan dilaksanakan di dalam konteks mereka, sehingga dapat dikatakan bahwa *Community Development* bukanlah proses yang dapat didesain dan diproses dari atas.
- b. Menjadi lebih swadaya (*self-reliance*). *Community Development* pada dasarnya merupakan upaya membantu masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri atau secara ringkas membuat masyarakat menjadi swadaya.
- c. Berkembang menjadi komunitas pembelajar (*learning communities*). Menjadi swadaya menuntut masyarakat lokal untuk mampu belajar dari pengalaman sendiri untuk menjawab tantangan yang akan muncul dikemudian hari dan juga mampu memberdayakan diri mereka sendiri.
- d. Berkurangnya kerentanan dan kemiskinan. Keberhasilan *Community Development* bukan sekedar bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan. Apapun kegiatannya dan oleh siapa saja, *Community Development* hanya akan dianggap berhasil bila mampu mengurangi kerentanan dan kemiskinan yang dihadapi masyarakat.
- e. Terciptanya peluang ekonomi dan mata pencaharian yang berkelanjutan. Peluang ekonomi dan mata pencaharian yang

berkelanjutan dalam sebagian besar kegiatan *Community Development* adalah sasaran yang menjadi pondasi bagi pencapaian sasaran lain yang lebih jauh.

- f. Menguatnya modal sosial. Dalam komunitas masyarakat miskin yang tidak memiliki modal finansial, modal sosial merupakan modal dasar yang memungkinkan masyarakat lokal bertahan hidup dan mengembangkan aktivitas ekonomi. *Community Development* dilaksanakan pertama-tama dengan menggunakan modal sosial sebagai dasar kegiatan-kegiatan lainnya.
- g. Tercapainya keseimbangan tujuan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. *Community Development* bukan untuk merubah keseimbangan elemen yang ada dalam masyarakat tetapi mempertahankan perspektif keseimbangan yang ada tersebut.

Berdasarkan aspek keterlibatan masyarakat, dalam aplikasi di lapangan *Community Development* dapat dikelompokkan tiga bentuk, yaitu: a) *Development for Community*. Masyarakat pada dasarnya menjadi obyek pembangunan karena berbagai inisiatif, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh aktor dari luar. Aktor dari luar dapat melakukan penelitian, konsultasi dan melibatkan tokoh masyarakat setempat tetapi dalam pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya berasal dari luar; b) *Development with Community*. Pola kolaborasi antara aktor luar dan masyarakat setempat semakin kuat. Keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama dan sumber daya yang digunakan berasal dari kedua belah pihak; dan c) *Development of Community*. Inisiatif, perencanaan dan pelaksanaan dilakukan sendiri oleh masyarakat. Sedangkan peran aktor luar lebih sebagai sistem pendukung dan fasilitator.

Ketiga pendekatan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu memperbaiki kualitas kehidupan dan kelembagaan masyarakat menuju perubahan sosial yang lebih baik. Faktor utama dalam pemilihan pendekatan yang akan digunakan adalah seberapa jauh kelembagaan masyarakat telah berkembang dan juga memperhatikan karakteristik masyarakat yang akan dihadapi.

Akhirnya, yang perlu diperhatikan adalah bahwa *Community Development* merupakan sebuah proses yang terus menerus yang menuntut lebih kepada pengembangan kelembagaan dan bersifat terbuka terhadap berbagai masukan dan pengaruh sesuai kondisi lokal. Oleh sebab itu, pelibatan stakeholder *Community Development* secara setara menjadi keharusan agar mampu memunculkan pengembangan partisipasi dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa *Community Development* sangat memperhatikan dan berdasarkan pengalaman kasus-kasus terbaik (*best practice*) sebagai batu pijakan untuk melaksanakan berbagai aktivitas lainnya.

SWADAYA MASYARAKAT DALAM PROGRAM P2KP (PNPM MANDIRI PERKOTAAN)

Swadaya Masyarakat

Pelaksanaan Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya jenis kegiatan fisik, mampu mendorong masyarakat untuk melakukan swadaya guna memperlancar proses pelaksanaan kegiatan dimaksud. Berbagai jenis kegiatan fisik tersebut antara lain adalah perbaikan jalan, perbaikan prasarana perumahan masyarakat, perbaikan drainase, pembuatan sarana MCK, penyediaan air bersih (non pipa), pembuatan sarana persampahan, pembuatan saluran pembuangan limbah, jembatan, sarana penerangan, dan lain-lain.

Bentuk swadaya masyarakat untuk mendukung proses pelaksanaan kegiatan fisik yang Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan adalah berupa tenaga kerja, konsumsi, dan berupa iuran dana (rupiah). Semua bentuk swadaya tersebut kemudian "*dirupiahkan*" sebagaimana yang telah tertuang dalam proposal pengajuan dana kegiatan fisik.

Proses pengajuan usulan kegiatan dan penggalian swadaya masyarakat secara umum dimulai dari musyawarah masing-masing Rukun Tetangga (RT) setelah mendapatkan sosialisasi Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat kelurahan. Musyawarah di tingkat Rukun Tetangga (RT) tersebut biasanya untuk merumuskan

usulan kegiatan dan menentukan serta menyepakati bentuk dan besarnya swadaya masyarakat yang diberikan untuk mendukung kegiatan fisik. Swadaya masyarakat tersebut cukup penting karena dana program sering tidak mencukupi untuk menutup seluruh biaya kegiatan fisik yang diusulkan.

Besarnya prosentase swadaya masyarakat untuk mendukung kegiatan fisik Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan cukup bervariasi, yaitu mulai sekitar 14,29% sampai dengan 34,12% dari total dana kegiatan. Swadaya masyarakat dari kegiatan fisik berupa perbaikan jalan, perbaikan prasarana perumahan masyarakat, perbaikan drainase, pembuatan sarana MCK, penyediaan air bersih (non pipa), pembuatan sarana persampahan, pembuatan saluran pembuangan limbah, jembatan, dan sarana penerangan.

Kegiatan fisik Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan untuk perbaikan jalan mampu menyerap swadaya masyarakat sebesar 20,60% dari total dana kegiatan, untuk perbaikan prasarana perumahan masyarakat mampu menyerap sebesar 24,50% dari total dana kegiatan, untuk perbaikan drainase mampu menyerap sebesar 25,84% dari total dana kegiatan, untuk pembuatan sarana MCK mampu menyerap sebesar 22,57% dari total dana kegiatan, untuk penyediaan air bersih (non pipa) mampu menyerap sebesar 26,45% dari total dana kegiatan, untuk pembuatan sarana persampahan mampu menyerap sebesar 21,49% dari total dana kegiatan, untuk pembuatan saluran pembuangan limbah mampu menyerap sebesar 23,13% dari total dana kegiatan, untuk perbaikan jembatan mampu menyerap sebesar 34,12% dari total dana kegiatan, dan untuk sarana penerangan mampu menyerap sebesar 14,29% dari total dana kegiatan. Secara rata-rata besarnya prosentase swadaya masyarakat untuk mendukung kegiatan fisik Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebesar 23,67% dari total dana kegiatan.



Gambar 7. Beberapa Pelaksanaan Kegiatan Program P2KP

Dinamika Permasalahan

Penyerapan swadaya masyarakat untuk mendukung kegiatan fisik Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan tidak selalu berjalan dengan lancar. Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam penyerapan swadaya masyarakat antara lain adalah:

- a. Tingkat penghasilan atau kesejahteraan warga yang berbeda-beda antara Rukun Tetangga (RT) satu dengan Rukun Tetangga (RT) yang lain, sehingga menyebabkan perbedaan besarnya swadaya masyarakat yang dapat diserap, khususnya swadaya dalam bentuk tunai (rupiah).
- b. Tingkat penghasilan atau kesejahteraan warga yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan adanya berbagai bentuk swadaya masyarakat, yaitu tidak selalu berbentuk tunai (rupiah).

- c. Tidak semua wilayah mempunyai warga mampu yang sering sebagai warga “jujukan” jika swadaya masyarakat yang terkumpul masih kurang dan meraka bersedia untuk menutupinya (donator besar).

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan di dalam musyawarah kelurahan dan biasanya diambil kesepakatan bagi warga yang mampu dapat memberikan swadaya dalam bentuk tunai (rupiah) atau konsumsi, dan bagi warga yang kurang mampu dapat memberikan swadaya dengan menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan fisik yang mereka usulkan. Dalam hal ini, musyawarah warga menjadi kata kunci yang penting untuk menyelesaikan segala permasalahan yang biasanya muncul dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan fisik.

Manfaat Kegiatan

Berbagai manfaat sangat dirasakan oleh masyarakat penerima program Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya dengan tersedianya sarana dan prasarana fisik, yaitu mulai dari jalan di lingkungan mereka semakin baik dan tidak becek, khusus untuk masyarakat kurang mampu telah dibantu perbaikan rumah yang layak, tersedianya drainase, sarana MCK yang memadai, tersedianya air bersih (non pipa), tersedianya sarana persampahan, tersedianya saluran pembuangan limbah, jembatan yang semakin baik, dan sarana penerangan yang semakin baik.

Sarana dan prasarana fisik yang telah dilaksanakan melalui Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan sampai saat ini masih mampu terjaga dengan baik, mulai tingkat kebersihan sampai dengan perbaikan kerusakannya. Hal ini dikarenakan masyarakat setempat sejak awal (tahap perencanaan) dan tahap pelaksanaan kegiatan sudah terlibat dengan aktif dengan memberikan swadaya, baik dalam bentuk tenaga, waktu, dan biaya, sehingga untuk pelestarian program mereka juga melaksanakan dengan baik dan mereka merasa ikut memilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatima Abdullah, 2005, "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Kecil (Studi Kasus pada Usaha Kecil Implementasi P2KP di Kelurahan Pisang Candi Sukun Kota Malang)*", dalam Jurnal Keuangan dan Perbankan, Volume IX Nomor 2 Mei 2005, Penerbit program Studi Keuangan dan Perbankan Universitas Merdeka, Malang.
- Riza Primahendra, 2006, "*Cummunity Development: Sebuah Eksplorasi*" Info URDI Volume 16, dalam www.urdi.org.
- Slamet Santoso, 2011, "*Dampak Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) atau PNPM Mandiri Perkotaan Terhadap Peningkatan Swadaya Masyarakat*", Dibiayai oleh Dana Pembinaan Penelitian (DPP) Universitas Muhammadiyah Ponorogo Tahun Anggaran 2010/2011, dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor : 065/I/II/K.1/IV/2011
- _____, 2004, "*Pedoman Umum P2KP*", Edisi Revisi September 2004, Penerbit Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta.
- _____, 2004, "*Modul Loklatih Aparat Pemda Kabupaten Ponorogo: P2KP-II*", tanggal 20 sampai dengan 24 Desember 2004, di Hotel Tlogo Mas, Ngebel, Ponorogo.

WAROK; PEMIMPIN INFORMAL LOKAL PONOROGO YANG TERLUPAKAN⁵

PENDAHULUAN

Sebagaimana para Kyai, Ustadz, Ajengan kalau di masyarakat Sunda, maka keberadaan para Warok adalah tokoh sentral bagi masyarakat Ponorogo. Warok adalah tokoh penting dalam seni tradisional Reyog Ponorogo. Namun demikian peran warok dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Ponorogo tidak hanya dipandang sebagai tokoh seni namun mereka juga merupakan struktur sosial yang wajib dikemukakan ketika seseorang mengkaji masalah struktur sosial masyarakat Ponorogo. Pada masa lalu warok, karena beberapa kelebihanannya, sering bertindak sebagai *opinion leader* terutama pada masyarakat desa. Perkembangan waktu telah menunjukkan adanya perubahan sosial yang penting yang menyangkut posisi sosial para warok di mata masyarakat Ponorogo. Peran warok pada masa kini memang tidak lagi sesentral sebagaimana pada masa lalu, karena ada sebabnya, tetapi bukan berarti keberadaan mereka bisa dilupakan begitu saja. Modernisasi disebut-sebut sebagai salah satu sebab semakin tergerusnya peran sosial mereka dalam masyarakat Ponorogo.

⁵ Artike ini berdasar hasil Penelitian Hibah Bersaing: Dadhak Merak Reyog Ponorogo Berbahan Baku Substitusi Kulit Macan dan Kendala Mitos Lokal (Jusuf Harsono dan Samet Santoso), sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor 028/SP2H/P/K7/KM/2015

PERTANYAAN SIAPA WAROK

Banyak studi sudah dilakukan untuk mengungkap jati diri seorang warok. Warok adalah seseorang tokoh sakti pada masa lalu pada masyarakat Ponorogo. Keberadaan warok sering dikait-kaitkan dengan dengan keberadaan seni tradisional Reyog Ponorogo karena pada masa kini keberadaan keduanya tidak bisa dilupakan. Namun demikian diyakini keduanya pada masa lalu mempunyai sejarah yang tidak menyatu. Seni Reyog sering dikaitkan dengan keberadaan Kerajaan Bantar Angin sementara itu warok sering dikaitkan dengan tokoh sakti dari dunia hitam yang berasal dari masyarakat biasa. Bahkan beberapa diantaranya berasal dari para *begal* pada masa lalu terutama pada masa sebelum masa Orde Baru, ada juga diantaranya dari para petani pemilik lahan sempit.

Pada masa kini masyarakat Ponorogo tahunya bahwa para warok adalah para tokoh yang berada di balik hidup matinya seni Reyog Ponorogo. Pada kenyataannya keberadaan mereka tidak terpisahkan. Bahkan secara kasat mata menurut masyarakat Ponorogo warok adalah mereka yang selalu berpakaian hitam-hitam dan mengiringi keberadaan kesenian Reyog Ponorogo.

PERAN SOSIAL

Pada masa Orde Baru keberadaan warok menempati posisi terhormat karena mereka sangat dibutuhkan oleh pemerintah baik nasional maupun lokal. Keberadaan mereka begitu penting bukan hanya sebagai “agen” pemelihara seni tradisional Reyog Ponorogo tetapi mereka mempunyai peran sosial yang penting di wilayah Ponorogo dan sekitarnya.

Mereka pernah bersama-sama dengan TNI dan Polri menjadi “penjaga” keamanan di wilayah eks karesidenan Madiun. Mereka pada sekitar tahun 1970 an “dimintai bantuan” untuk membantu keamanan dari gangguan keamanan di sekitar wilayah eks Karesidenan Madiun karena pada tahun itu wilayah tersebut mengalami gangguan keamanan yang luar biasa. Masyarakat di sekitar wilayah tersebut telah

mengalami gangguan dari para penjahat kriminal mulai dari pencuri, begal dan perampok. Aparat keamanan pada masa itu merasa kewalahan menghadapi para penjahat tersebut karena disinyalir banyak yang mempunyai “kesaktian”. Setelah para warok terlibat dalam kegiatan pengamanan wilayah tersebut maka keadaan wilayah tersebut semakin terkendali keamanannya.

PERAN POLITIK

Warok yang dipandang sebagai “orang sakti” di Ponorogo tentu saja mempunyai pengaruh kuat di masyarakat Ponorogo. Sebagai orang yang dipandang mempunyai status sosial yang tinggi mereka mempunyai kemampuan sebagai mobilisator politik yang andal. Disatu sisi mereka adalah seorang seniman reyog yang tangguh dan disisi yang lain mereka juga merupakan orang yang secara fisik mempunyai kekuatan di atas rata-rata. Tidak heran jika dengan berbagai kelebihan yang dimiliki mereka menjadi menarik untuk dijadikan “agen politik” oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada.

Dengan menggunakan terminologi milik Keller (1994: 23), maka para warok ini bisa dimasukkan dalam kategori sebagai *Elit Strategis* karena mereka itu bukan tokoh formal namun mempunyai pengaruh yang cukup kuat di masyarakat Ponorogo terutama di daerah pedesaan. Pemerintah Orde Baru adalah termasuk yang memanfaatkan berbagai kelebihan yang dimiliki oleh para warok tersebut. Banyak warok yang dimobilisasi menjadi penggerak kesenian Reyog di bawah bendera partai politik baik pada masa Orde Lama maupun pada masa Orde Baru. Pada masa tahun 1960-an masyarakat Ponorogo mengenal beberapa kelompok besar kesenian reyog yang berafiliasi pada partai diantaranya adalah BREN (Barisan Reyog Nasional) yaitu organisasi para seniman reyog di bawah naungan PNI (Partai Nasional Indonesia), LEKRA (Lembaga Kesenian Rakyat) yaitu organisasi yang menghimpun seniman reyog di bawah bendera PKI (Partai Komunis Indonesia) dan satunya lagi adalah CAKRA yang merupakan organisasi seniman reyog yang berdiri di bawah bendera NU (Nahdlatul Ulama). Pada masa Orde Baru kesenian ini juga digiatkan kembali bahkan

sebagian besar mereka berada di bawah bendera parati Golkar. Namun demikian beberapa diantaranya menjadi bagian dari penggiat seni reyog yang berafiliasi pada Partai Demokrasi Indonesia.

Fenomena politik penting yang perlu diinformasikan di sini adalah ketika pada tahun 1980an, Bupati Subarkah memerintahkan pada setiap desa dan kelurahan wajib mempunyai Unit Kesenian Reyog dan membangun gapura pintu masuk ke setiap desa dengan ornamen yang menggambarkan kesenian reyog. Unit kesenian reyog diwajibkan diadakan di setiap desa tentu dengan maksud untuk mewedahi para warok yang secara sosial adalah tokoh penting di desa.

Dengan memobilisasi para warok di bawah bendera Golkar maka tidak heran bila pada masa Orde Baru, kota Ponorogo selalu didominasi oleh kemenangan partai Golkar di setiap Pemilu sebelum tahun 1999 karena pada Pemilu tahun tersebut perolehan suara Golkar dikalahkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai baru di Indonesia setelah Reformasi tahun 1998.

MENJADI AGEN PEMBANGUNAN

Karena dianggap berjasa memberikan bantuan kepada pemerintah daerah Ponorogo dan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan diharapkan juga bisa menjaga stabilitas sosial di masyarakat, maka beberapa warok diangkat oleh Gubernur Jawa Timur pada pertengahan tahun 1970-an sebagai Lurah dan Kepala Desa. Hal ini dimungkinkan karena para warok ini menurut Harsono (2005: 9) adalah orang yang ditokohkan oleh masyarakat dan oleh pemerintah pada masa itu dianggap mempunyai posisi tawar menawar yang cukup tinggi secara politis. Pada masa itu para warok bisa menjadi opinion leader, menurut Mardikanto (2010: 134) yang selalu meneruskan pesan kepada orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya. Dengan tingkat pendidikan dan skill di bidang pemerintahan yang kurang memadai maka mereka menjadi pejabat pemerintahan secara formal. Hal ini dimungkinkan karena pada masa itu skala prioritas pemerintahan orde baru adalah menjaga stabilitas sosial politik.

Bertindak sebagai pejabat pemerintah, tepatnya sebagai birokrat, yang mestinya mempunyai skill yang kuat di bidang pemerintahan mereka jalani karena menurut Castle (1984: 23) bahwa birokrasi adalah orang-orang yang digaji yang berfungsi dalam pemerintahan. Tentu saja pemerintah semestinya membutuhkan tenaga yang handal dalam kemampuan skill pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lebih dari itu mereka juga berperan sebagai agen pembangunan dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi karena disatu sisi mereka merupakan tokoh informal di sisi lain mereka juga merupakan tokoh formal di pemerintahan.

WAROK DI ERA SEKARANG

Perubahan jaman yang begitu cepat yang dipicu oleh perkembangan teknologi informatika, industrialisasi yang massiv dan perubahan system politik yang signifikan telah menjadikan perubahan persepsi masyarakat terhadap warok. Pada masa lalu masyarakat Ponorogo menganggap bahwa warok dengan segala kelebihanannya dipandang sebagai tokoh informal karena peran sosialnya yang cukup tinggi, maka pada masa kini Warok dipandang hanya sebagai pelaku seni atau profesi seniman semata. Sebagai pelaku seni atau profesi seniman maka mereka mengandalkan penghidupan dari seni reyog yang digelutinya. Reyog pada masa kini tidak lagi dipandang sebagai seni rakyat tetapi sebagai seni yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan ini menjadikan reyog berkembang sebagai industry ekonomi kreatif. Namun demikian, menurut Khoirurrosyidin (2013: 42) keberadaan sosok warok tidak pernah luput dari upaya tarikan politik oleh kekuatan-kekuatan politik untuk memanfaatkan ketokohnya.

Perkembangan tekonologi informatika menjadikan posisi sosial para warok semakin terpinggirkan. Masyarakat bisa mengakses berbagai kebutuhan informasi, termasuk seni, menjadi lebih mudah. Intensitas masyarakat dalam menikmati seni tradisional, termasuk Reyog, semakin kecil. Situasi seperti ini menjadikan masyarakat semakin jarang berinteraksi dengan para warok yang juga sebagai tokoh informal. Dengan semakin majunya teknologi komunikasi maka

masyarakat merasa mempunyai banyak pilihan tentang tokoh yang diidolakan. Warok tidak lagi menjadi *opinion leader*. Posisi mereka sudah banyak diambil alih oleh para tokoh Ormas, LSM dan akademisi yang lebih sering muncul di berbagai bentuk media massa dengan berbagai pandangan, ide dan inovasi pemikiran yang tidak bisa ditandingi oleh para warok.

Semakin kecilnya peran politik para warok pada masa kini juga menjadikan mereka tidak lagi mempunyai peran social yang berarti, meskipun dalam beberapa Pilkada dan Pileg beberapa dari mereka masih dimanfaatkan “jasanya” untuk menjadi mesin politik bagi pasangan Calon Bupati atau Caleg dari beberapa partai politik peserta pemilu. Beberapa unit atau group kesenian reyog yang terlibat dalam kegiatan kampanye tersebut bertindak secara profesional, artinya mereka mengenakan tarif tertentu untuk melibatkan group kesenian mereka. Namun beberapa group yang lain melibatkan diri dalam aksi politik tersebut karena mempunyai afiliasi politik pada partai politik tertentu.

Ketika para warok masih terlibat dalam berbagai kegiatan politik, keberadaan mereka sering diperhitungkan oleh berbagai pihak. Penguasa lewat partai politik dengan unit kesenian reyognya telah menempatkan warok sebagai figure sentral dalam aksi mobilisasi politik. Di sini mereka bertindak sebagai mobilisator pada acara-acara kampanye di lapangan yang membutuhkan kehadiran massa dalam jumlah besar. Kehadiran warok dengan kesenian reyognya telah menjadi magnet politik bagi masyarakat di sekitar lapangan tempat kampanye dilakukan.

PENUTUP

Nampaknya keberadaan mereka dalam masyarakat Ponorogo sebagai tokoh informal yang selalu dijadikan rujukan sikap pada masa mendatang akan digantikan oleh tokoh-tokoh LSM dan akademisi. Posisi mereka, para warok, yang selama ini mempunyai peran social yang tinggi akan mengalami penurunan peran. Peran warok dalam

kehidupan social masyarakat Ponorogo akan kembali seperti semula yaitu hanya menjadi seorang seniman yang berkecimpung dalam dunia dan dinamika seni reyog Ponorogo. Masyarakat tidak banyak lagi yang memanfaatkan kemampuannya dalam mengakses Informasi yang dibutuhkan. Masyarakat secara perorangan dengan bantuan teknologi informatika yang dikuasai sudah bisa mengakses secara langsung informasi yang dibutuhkan. Keberadaan tokoh-tokoh LSM dan akademisi dipandang lebih relevan oleh masyarakat. Dengan skill dan pengetahuan yang lebih baik maka para tokoh LSM dan akademisi dipandang bisa memberikan solusi yang dibutuhkan masyarakat.

Dengan turunnya peran sosial mereka bukan berarti keberadaan peran mereka bisa diabaikan begitu saja. Perubahan sosial membutuhkan waktu yang panjang, sementara itu masyarakat Ponorogo sedang pada fase perubahan social itu sendiri dari tradisonal menuju modern. Pada fase seperti ini masyarakat masih membutuhkan tokoh informal tradisonal yang masih memegang teguh nilai-nilai lokal yang sudah mulai ditinggalkan oleh tokoh-tokoh lain yang lebih mengandalkan pada rasionalitas berpikir semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Lance Castles, 1983, *“Birokrasi Dan Masyarakat Di Indonesia dalam Birokrasi Kepemimpinan dan Revolusi Sosial”*, Penerbit Hapsara, Surakarta.
- Jusuf Harsono dan Slamet Santoso, 2005, *“Dinamika Perubahan Struktur Sosial Para Warok Ponorogo (Studi Kasus: Mobilitas Vertikal – Horizontal Para Warok Di Ponorogo)”*, Jurnal Fenomena , Vol 2. No 1, LPPM UNMUH Ponorogo.
- Jusuf Harsono dan Samet Santoso, 2015, *“Dadhak Merak Reyog Ponorogo Berbahan Baku Substitusi Kulit Macan dan Kendala Mitos Lokal”*, Peneliti Hibah Bersaing, Surat Perjanjian Nomor 028/SP2H/P/K7/KM/2015

Keller, Suzanne, 1994, "*Penguasa dan Kelompok Elit, Peranan Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern*", Penerbit Yayasan Ilmu Ilmu Sosial, Jakarta.

Khoirurosyidin, 2013, "*Pergeseran Peran Warok Dalam Politik Lokal Di Kabupaten Ponorogo*", Jurnal Penelitian Aristo, Vol. 1. No : 02, Fisip UNMUH Ponorogo.

Totok Mardikanto, 2010, "*Komunikasi Pembangunan, Acuan Bagi Akademisi, Praktisi dan Peminat Komunikasi Pembangunan*", UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), Surakarta.

AMBIGUITAS INTEREST GROUP DAN PARTISIPASI POLITIK SEMU DALAM PILKADA PONOROGO TAHUN 2015⁶

PENDAHULUAN

Ponorogo adalah kota sedang dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta orang. Kota ini bersama dengan hampir 200 Kabupaten dan Kota se Indonesia pada tanggal 9 Desember 2015 menyelenggarakan Pilkada (Pemilihan Kepada Daerah) secara serentak sesuai dengan UU Politik tahun 2015. Pilkada serentak di seluruh Indonesia ini telah menandai terjadinya sejarah baru pada system politik di negeri ini. Sebagaimana Kota dan Kabupaten lain yang menyelenggarakan Pilkada tentu Kabupaten Ponorogo mempunyai catatan-catatan menarik untuk dicermati oleh para pemerhati politik di Indonesia.

Perkembangan kultur politik baik pada tingkat massa, elit ormas maupun birokrasi di Kabupaten Ponorogo juga perlu menjadi kajian mengingat kota ini merupakan kota yang paling dinamis secara politik di Jawa Timur bagian barat. Bisa jadi transformasi budaya politik juga terjadi di kota Kabupaten ini. Ambiguitas sikap politik terjadi di banyak komponen masyarakat mulai dari Birokrasi, Organisasi Massa Keagamaan, perguruan silat dll yang menurut teori politik yang dikembangkan Gabriel A. Almond (Mas'ood: 1984) bisa dimasukkan sebagai *interest group*.

⁶ Artikel ini ditulis oleh Jusuf Harsono dan telah diterbitkan dalam prosiding Seminar Nasional 2016 dengan tema Eavaluasi Pilkada Serentak: “*Membangun Kesadaran Politik dan Komunikasi Partisipatoris Menuju Penguatan Tata Kelola Pemerintahan*” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo tanggal 9 April 2016.

Berbagai optimisme tentang sistem penyelenggaraan Pilkada yang semakin efisien tentu harus disambut dengan tangan terbuka. Namun demikian fenomena politik uang yang semakin masiv dan vulgar dalam berbagai bentuk dan di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo. juga perlu menjadi perhatian bersama. Munculnya kesan kuat di masyarakat bahwa berbagai komponen penyelenggara Pilkada secara tidak sungguh-sungguh dalam menangani praktek politik uang.

KONFIGURASI POLITIK SAAT PILKADA

Terdapat 4 pasangan peserta Pilkada yang berkompetisi pada tanggal 9 Desember 2015 tersebut untuk merebut perhatian dan dukungan masyarakat Ponorogo. Mereka harus memperebutkan kurang lebih 700 ribu suara warga Ponorogo yang berhak memilih walaupun pada akhirnya mereka yang hadir di TPS sekitar 500 ribu warga. Melihat konfigurasi partai pendukung para Calon kita akan tertegun karena ada pasangan calon yang mendapatkan dukungan dari lebih dari sepuluh parpol di DPRD dan beberapa pasangan Calon yang hanya didukung tidak lebih dari dua parpol. Dari empat pasangan Calon Bupati maka pasangan Sugiri-Sukirno adalah pasangan yang mendapat dukungan dari parpol di DPRD dengan jumlah paling banyak yaitu: Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS. Belum lagi dukungan kurang lebih 20 LSM di Ponorogo. Sementara pasangan Amin-Agus Widodo didukung oleh PDIP dan PKB. Pasangan Ipong-Sudjarno didukung oleh PAN dan Partai Gerindra. PAN adalah partai menengah dengan 6 kursi yang terpinggirkan karena gara-gara kalah loby di dewan, partai ini harus mengiklaskan tidak kebagian posisi sebagai salah satu ketua komisi di DPRD (Ponorogo Pos, 23 Oktober 2014). Sementara satu pasangan lagi berangkat dari Independen yang berlatar belakang profesi sebagai pendidik yaitu seorang guru besar salah satu PTS di Pasuruan dan dari mantan Kepala SD dari Kecamatan Sawoo.

Menarik untuk diamati adalah bahwa koalisi pasangan Sugiri-Sukirno diusung oleh kekuatan parpol yang menguasai mayoritas kursi di DPRD Kabupaten Ponorogo yang pada Pilkada kemarin keluar

sebagai “pecundang” dikalahkan oleh pasangan Ipong-Sudjarno yang diusung oleh partai PAN-Gerindra yang notabene adalah partai menengah. Diberbagai spekulasi pasangan Sugiri-Sukirno diprediksi akan memperoleh kemenangan karena diusung oleh kekuatan mayoritas di DPRD. Perlu menjadi perhatian adalah bahwa Drs. H. Ipong Muchlison adalah pendatang baru dalam konstelasi politik local Ponorogo. Ia adalah warga kota Samarinda dan sekaligus Ketua Partai Gerindra Kalimantan Timur yang dikenal sebagai pengusaha Kalimantan Timur dari Ponorogo yang sukses. Dua tahun terakhir menjadi tokoh idola anak-anak muda di Ponorogo. Sementara itu Sujarno adalah pensiunan pejabat daerah yang punya pengalaman menjabat di beberapa instansi dengan demikian dianggap sudah sangat berpengalaman di birokrasi pemerintahan.

AMBIGUITAS ORMAS

Fenomena yang tidak kalah menarik untuk diamati adalah perilaku beberapa ormas dalam Pilkada. Warga Nahdliyin dipastika kesulitan mengalami kebingungan dalam menentukan pilihannya terhadap pasangan Calon Bupati karena para elit mereka terpecah dalam menentukan dukungan politik. Elit NU lebih memberikan dukungan pada pasangan Sugiri-Sukirno. Hal ini Nampak dengan sering hadirnya Ketua PC NU di berbagai event yang merepresentasikan kegiatan politik pasangan Sugiri-Sukirno walaupun Ipong berasal dari keluarga salah satu Kyai berpengaruh di Ponorogo dan sebelumnya sudah bersilaturahmi dengan banyak elit PC NU Ponorogo (Ponorogo Pos, April 2015). Sementara itu pada sisi lain PKB yang nota bene adalah partai yang merepresentasikan kepentingan politik warga NU jelas menjadi salah satu partai pengusung pasangan Amin-Agus Widodo. Berbeda dengan yang didepan adalah GP Anshor yang merupakan eksponen muda keluarga Nahdliyin memberikan dukungan pada pasangan Calon Bupati Ipong-Sudjarno. Sementara itu ambiguitas juga terjadi pada warga Muhammadiyah karena memang secara politis warga Muhammadiyah banyak yang berafiliasi pada PAN dan Partai Golkar. Mereka harus memilih memberi dukungan pada

Sugiri-Sukirno atau Ipong-Sujarno, apalagi Ipong juga mengklaim alumni SD Muhammadiyah Ponorogo.

Fenomena seperti ini juga terjadi pada organisasi Perguruan Silat Setia Hati Terate yang merupakan perguruan silat dengan jumlah anggota terbanyak yaitu puluhan ribu anggota menghadapi hal yang sama. Banyak elit perguruan silat ini menjadi pendukung dari beberapa pasangan calon Bupati yang tentu saja diikuti oleh “warga” perguruan ini dalam memberikan dukungan politik. Bukan tidak mungkin warga perguruan merasa ambigu dalam menentukan pilihannya.

Kedua ormas menjadi contoh keterlibatan interest group yang menurut G. A. Almond (Mas'ood: 1984) merupakan lembaga politik penting dalam sebuah system politik. Meskipun dalam kejadian politik tersebut tidak ada pernyataan resmi dari kedua ormas ini dalam memberikan dukungan politik terhadap salah satu pasangan Calon Bupati Ponorogo. Elit dari kedua ormas tersebut dengan menggunakan konsep nya Suzanne Keller (1994: 11) , bisa disebut sebagai *strategic elite* yaitu elit yang sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan walaupun mereka tidak di berada dalam struktur kekuasaan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Langkah yang ditempuh oleh elit kedua ormas ini bisa jadi dianggap sebagai langkah “membelah diri” untuk mempertahankan eksistensinya ditengah ketidak mampuan diri secara tepat dalam membaca situasi yang berkembang. Membelah diri adalah proses adaptasi yang lazim digunakan dalam ilmu Biologi menyikapi perilaku Micro Organisme yang merasa terancam oleh dinamika lingkungan sekitarnya. Hampir bisa dipastikan bahwa massa kedua ormas tidak mengetahui strategi yang sedang dijalankan oleh para elit mereka. Barangkali menjadi mendekati kebenaran tentang yang disampaikan oleh Fajar Pramono (2013: 216) bahwa penentu kompetisi elit politik Ponorogo adalah massa bukan elit.

Kenyataan seperti ini menarik untuk dikaji karena ini menyangkut kultur politik masyarakat Ponorogo yang sedang berkembang. Bila dulu masyarakat Ponorogo dikenal sebagai masyarakat yang paternalistik maka Pilkada ini nampaknya menjadi masa transformasi kultur politik masyarakat Ponorogo.

SIKAP PARA WAROK

Berbeda dengan pemahaman masyarakat umumnya selama ini. Warok sering dipandang sebagai masyarakat yang “utun”, yaitu sifat orang yang kurang terpelajar dan tidak banyak tahu tentang perkembangan informasi yang terjadi disekitarnya. Mereka dianggap ‘utun’ karena selama ini para warok ini hanya bergelut dengan dunia seni budaya reyog dan asing dengan dunia politik yang hiruk-pikuk. Pada pilkada tahun 2015 masyarakat Ponorogo dikejutkan dengan sikap Warok yang menunjukkan bahwa mereka adalah komunitas yang cukup cerdas dalam membaca situasi. Kalau selama ini mereka dianggap sebagai komunitas yang terhegemoni maka pada momen Pilkada tahun 2015 mereka bisa dianggap bisa memanfaatkan peluang untuk kepentingan mereka. Mereka mampu bersikap *rational choise* dengan dinamika politik yang ada. Pada awal masa kampanye Pilkada mereka seolah menjadi pendukung seluruh pasangan Calon Bupati karena mereka sering dihadirkan pada acara sosialisasi para Calon di beberapa tempat dimana para Calon melakukan sosialisasi dan biasanya para pasangan pun mengidentifikasi diri juga sebagai warok dengan berpakaian hitam-hitam seperti para warok. Momen yang sangat mengejutkan adalah pada saat akhir masa kampanye, mereka yang berjumlah ratusan unit kesenian reyog ponorogo sepakat menentukan sikap mendukung pasangan Cabup Ipong-Sujarno karena mereka menganggap pasangan ini lebih aspiratif dan punya komitmen yang jelas. Warok dalam masyarakat Ponorogo menurut Jusuf dan Slamet (2005: 14), mempunyai status social yang tinggi setara dengan para kyai dan pejabat daerah sehingga mempunyai pengaruh di masyarakat sekitarnya. Keberadaan mereka tidak bisa diabaikan dalam setiap kajian tentang dinamika social-budaya masyarakat Ponorogo dari waktu ke waktu.

BIROKRASI SEBAGAI MESIN POLITIK

Birokrasi yang secara teoritis digambarkan oleh Gabriel A. Almond (Mas’oed: 1984) sebagai salah satu lembaga politik penting dalam sebuah system politik yang tentu saja mempunyai level yang

sama dengan lembaga politik yang lain tidak tercermin dalam Pilkada Ponorogo tahun ini. Pada Pilkada tersebut banyak birokrat tidak menunjukkan perilakunya sebagai orang yang berkecimpung di lembaga yang harus netral secara politik. Jauh sebelum memasuki masa kampanye mereka sudah banyak yang menunjukkan keberpihakanya pada calon-calon tertentu. Sikap tersebut sudah ditunjukkan secara mencolokoleh para birokrat dalam berbagai bentuk kegiatan yang mengindikasikan kegiatan penggalangan dan konsolidasi baik di rumah para calon, di kafe-kafe, touring keluar kota dan lain-lain.

Dari kegiatan yang dilakukan tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak lagi merupakan lembaga politik seperti yang diharapkan tetapi mereka cenderung menjadi “mesin politik” para calon Bupati tersebut. Dari berbagai info yang bisa dihimpun mereka memang secara tersembunyi maupun terang-terangan melakukan aksi mencari dukungan *man to man* dan *lip to lip* kepada para karyawan atau staf yang ada dibawah control manajemennya. Bila ia seorang Lurah maka ia akan mempengaruhi anak buahnya di kator dimana ia bertugas. Paling menarik untuk diamati adalah salah satu pasangan calon bupati bisa menggerakkan hampir seluruh urah dan kepala desa yang notabene merupakan aparat pelayanan masyarakat paling bawah.

Perilaku politik yang memihak di masa orde baru ini bisa dipahami sebagai sebuah langkah rasional karena mereka berharap bahwa bila pasangan calon bupati yang mereka dukung memenangi kompetisi ini mereka juga akan menikmati hasilnya berupa kompensasi jabatan yang diharapkan. Perilaku politik birokrat yang demikian tentu saja bertentangan dengan cita-cita reformasi yang ingin melepaskan birokrasi dari jaring politik eksekutif dan legislatif.

POLITIK UANG DAN PARTISIPASI POLITIK SEMU

Politik uang pada Pilkada tahun ini terasa berjalan begitu masiv dan vulgar. Terjadi di seluruh wilayah baik di kota maupun di pedesaan. Fenomena ini bahkan terjadi di seluruh level sosial ekonomi di masyarakat. Fenomena ini terjadi dimungkinkan karena ketidak

percaya diri para pasangan calon untuk mendapatkan simpati para pemilih. Berdasarkan informasi di lapangan diperoleh informasi bahwa para pasangan calon melakukan politik uang ke orang perorang dengan besaran rupiah yang berbeda. Ada pasangan yang memberikan politik uang dengan besaran dua puluh ribu rupiah untuk perorang. Ada juga pasangan yang memberikan amplop berisi dua puluh ribu rupiah untuk per orang. Ada juga yang memberi uang sebesar empat puluh ribu rupiah. Bahkan ada juga yang memberi dengan besaran seratus ribu rupiah per amplop untuk perorang. Hal ini diperkuat oleh pendapat Sarto Wardoyo (Ponorogo Pos: 2015) yang menyatakan bahwa bahwa fenomena politik uang terjadi merata di seluruh wilayah Ponorogo. Bahkan ia memperkirakan besarnya politik uang yang beredar di seluruh wilayah Ponorogo selama Pilkada berlangsung kurang lebih sebanyak ima belas milliar rupiah.

Yang menarik dari fenomena ini adalah bahwa besaran uang yang diberikan adalah hampir konsisten untuk setiap pasangan calon bupati. Sementara itu persaingan politik uang sangat ketat karena beberapa informan menginformasikan bahwa mereka menerima politik uang dari beberapa pasangan calon. Bahkan dalam beberapa keluarga telah menerima uang dari beberapa tim sukses sebanyak anggota keluarga yang ada. Politik uang terjadi kebanyakan pada malam hari menjelang Pilkada atau pada tanggal 8 Desember 2015. Sebagian lagi terjadi pada pagi hari tgl 9 Desember 2015 atau sering disebut sebagai “serangan fajar”.

Metode pembagian uang sering melalui kelompok-kelompok yang sudah didata jauh hari sebelumnya. Pembagian uang dilakukan ketua kelompok ke keluarga-keluarga dengan mendatangi rumah-rumah yang sudah diidentifikasi atau melalui perorangan karena tidak setiap satu keluarga selalu menjadi pendukung pasangan calon yang sama. Ada juga pembagian uang ke pemilih tanpa pernah ketemu “tim sukses” dengan calon pemilih, tim sukses tanpa ragu-ragu memasukkan amplop ke rumah-rumah lewat lobang di bawah pintu yang rumahnya sudah tertutup karena sudah malam. Menarik lagi adalah amplop yang diberikan berisi uang tanpa diberi atribut atau pesan apapun dari tim sukses. Nampaknya calon pemilih yang menerima amplop tanpa

pernah bertemu dengan tim sukses sudah mengetahui maksud dan memperoleh amplop berisi uang dari tim sukses nya siapa. Masyarakat yang menerima amplop sudah faham dengan mengidentifikasi jumlah uang yang berada dalam amplop.

Politik uang berjalan begitu masiv dan dalam berbagai bentuk. Bentuk pertama adalah pemberian uang langsung pada pemilih baik di kemas dalam amplop maupun dalam bentuk uang lembaran. Rata-rata tim sukses ketika memberikan uang disertai menyebutkan pasangan calon yang memberikan uang. Bentuk politik uang yang lain adalah dalam “kontrak politik”. Kontrak poliitik adalah sebuah perjajian tim sukses dengan sekelompok orang, biasanya komunitas RT, untuk memberikan dukungan suara kepada salah satu pasangan calon yang nantinya akan diberikan kompensasi dalam bentuk uang atau dalam bentuk program dari pasangan calon tertentu bila memenangkan suara di wilayah TPS tertentu. Kontrak politik biasanya ditandai dengan penyerangan DP atau uang muka yang besarnya juga tergantung pada kesepakatan di antara dua pihak.

Meski politik uang berjalan dengan masiv bukan berarti tidak ada perlawanan moral dari masyarakat tertentu. Dalam pengamatan penulis menunjukkan adanya beberapa kelompok masyarakat Desa yang menolak politik uang tersebut. Hal ini bisa dilihat dengan terpampangnya spanduk perlawanan tersebut. Terdapat spanduk di sebuah desa yang menolak politik uang dengan redaksi “Kami Menolak Politik Uang” yang dipasang di lokasi jalan masuk ke desa tersebut. Terdapat juga spanduk yang bertuliskan “Terima Uangnya Jangan Coblos Orangnya” yang di pasang oleh desa yang lainnya.

Di satu sisi masivnya politik uang telah menimbulkan keprihatinan secara moral namun lebih daripada itu secara konsep ilmu politik hal ini juga menjadi fenomena yang perlu mendapat perhatian yang serius. Dalam konsep partisipasi politik maka fenomena politik uang ini tidak bisa dimasukkan dalam salah satu kategori manapun. Bahkan hal ini bisa menjadi kategori partisipasi politik “semu” karena keaktifan mereka atau partisipasi politik mereka digerakkan oleh “sesuatu” di luar keinginan mereka sendiri. Bisa jadi pemilih yang telah

menerima “uang” tersebut mempunyai keyakinan memilih yang berbeda atau bahkan sama sekali tidak bermaksud hadir di TPS untuk menggunakan hak pilihnya karena berbagai alasan yang berbeda.

Kegiatan politik uang di lapangan berjalan begitu vulgar bisa dilihat dengan banyaknya calon pemilih pilkada yang menerima uang dari berbagai tim sukses. Satu orang bisa menerima uang dari berbagai tim sukses pasangan menunjukkan bahwa telah terjadi perang terbuka antar tim sukses di lapangan. Sering penulis dapati informasi bahwa calon pemilih menerima amplop dari tim sukses secara beruntun mulai amplop berisi uang dua puluh ribu, dua puluh lima ribu sampai empat puluh ribu atau lima puluh ribuan.

Selain merusak pemahaman terhadap partisipasi politik aktif, praktek politik uang yang masiv dan vulgar dimungkinkan juga merusak hubungan sosial elit – massa dalam sebuah ormas. Massa tidak lagi bisa dimobilisasi oleh elit karena mereka akan lebih tertarik pada uang yang disebar oleh tim sukses. Kultur politik masyarakat Ponorogo yang paternalistik telah bergerak menuju egalitarianistik. Dengan demikian politik uang telah menjadi media rekonstruksi kultur politik lama menjadi kultur politik baru di Ponorogo.

PENUTUP

Pilkada Ponorogo tahun 2015 telah selesai pada akhir bulan Januari 2016 sejak diputuskannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Tim Pasangan Calon Bupati Sugiri-Sukirno kepada KPUD Ponorogo atas dugaan kesalahan perhitungan suara dalam Pilkada tersebut sehingga dianggap menguntungkan pasangan yang lain, yaitu Ipong-Sudjran. Pada kasus hukum tersebut akhirnya MK memenangkan KPUD Ponorogo. Keputusan MK tersebut mengakhiri kontroversi salah hitung KPUD atas hasil Pilkada Ponorogo.

Keputusan MK mengakhiri berbagai spekulasi tentang kekhawatiran akan adanya Pilkada ulang dan adanya konflik antar pendukung dari pasangan calon bupati yang sedang bertarung. Namun demikian berbagai pekerjaan rumah tetap harus dikerjakan

diantaranya adalah menyikapi atas maraknya praktek politik uang yang masiv dan vulgar. Fenomena ini sangat merisaukan dari berbagai aspek. Disatu sisi, praktek ini telah merusak moralitas politik masyarakat Ponorogo karena memilih adalah penggunaan hak yang tidak boleh dipengaruhi oleh apapun juga. Praktek politik uang yang masiv telah merusak obyektifitas penilaian seseorang terhadap para calon pemimpin daerah. Disisi lain, politik uang telah merusak penilaian atas tingkat partisipasi politik warga karena muncul kekhawatiran bahwa tingkat partisipasi politik yang terjadi pada Pilkada Ponorogo tahun 2015 adalah partisipasi politik yang semu. Hal ini juga menunjukkan rendahnya kepercayaan diri para calon terhadap program kerja yang ditawarkan dan dijanjikan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar, 2005, *“Politik Indonesia Transisis Menuju Demokrasi”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jusuf Harsono dan Slamet Santoso, 2005, *“Dinamika Perubahan Struktur Sosial Para Warok di Ponorogo (Studi Kasus : Mobilitas Vertikal-Horizontal Para Warok Di Ponorogo)”*, Jurnal Fenomena, Vol. 2, No. 1, LPPM UNMUH Ponorogo.
- Mochtar Mas’oed, 1984, *“Perbandingan Sistem Politik”*, Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Sudijono Satroatmodjo, 1995 *“Perilaku Politik”*, Penerbit IKIP Semarang Press.
- Suzanne Keller, 1994 *“Penguasa dan Kelompok Elit, Peranan Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern”*, Penerbit Yayasan Ilmu Ilmu Sosial, Jakarta.
- Muhammad Fajar Pramono, 2013, *“Politik Lokal Dan Pemerintahan Daerah, Studi Kritis Pemerintahan Ponorogo Tahun 2000-2012”*, Penerbit CV Adi Citra Cemerlang.
- Ponorogo Pos, No. 654, Tahun XIV, 23 Oktober-05 November 2014.
- Ponorogo Pos, No. 708, Tahun VX, 10 – 16 Desember 2015.
- Ponorogo Pos, No. 675, Tahun XIV, 02 – 08 April 2015.

DINAMIKA PERUBAHAN STRUKTUR SOSIAL PARA WAROK PONOROGO ⁷

Ponorogo adalah kota di Jawa Timur bagian barat yang mempunyai kultur politik paling dinamis (berlangsung sejak perang kemerdekaan) dibandingkan dengan kota-kota lain di sekitarnya. Hal ini dimungkinkan karena di kota ini terdapat kekuatan-kekuatan sosial politik yang hiterogen dengan struktur sosial yang terbuka.

Berbicara tentang dinamika sosial politik di Ponorogo, tentunya tidak bisa meninggalkan keberadaan Warok dengan segala karakternya. Warok adalah sebutan untuk orang Ponorogo yang mempunyai kemampuan supra natural dan kelebihan dalam olah kanuragan. Warok adalah tokoh masyarakat tradisional Ponorogo yang sakti. Di satu sisi, Warok adalah tokoh budaya karena keberadaannya tidak bisa pisah dengan kesenian Reyog dan di sisi lain, seorang Warok adalah seorang tokoh politik, hal ini tidak bisa lepas dari keberadaannya sebagai tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh luas. Dengan terminologi Keller (1984: 19), Warok adalah seorang *Elit Strategis* yang segala pemikirannya harus diperhitungkan oleh *Elit Penguasa* karena mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat.

Para Warok, karena posisi sosialnya yang strategis berada di tengah-tengah antara masyarakat dengan penguasa, seringkali hanya berperan dan dijadikan *instrument* pengerah massa oleh para elit yang berkuasa. Namun dalam perkembangan terakhir, terjadi

⁷ Tulisan ini pernah dimuat dalam Jurnal Fenomena (ISSN 1693-8038) Volume 2, Nomor 1, Januari 2005, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penulis: Jusuf Harsono dan Slamet Santoso.

perkembangan peran dan fungsi yang signifikan. Para Warok telah menjalankan peran dan fungsi yang penting, dari sekedar tersubordinasi dari elit penguasa menjadi mempunyai kemampuan yang besar dalam posisi *tawar-menawar* dengan elit penguasa. Kiprah mereka di dalam percaturan politik lokal terus berlangsung hingga jaman sekarang ini. Disamping itu untuk memperoleh derajat sosial keagamaan yang tinggi, beberapa Warok telah melakukan ibadah haji ke Tanah Suci Mekkah dan bahkan ada yang beberapa kali melakukan ibadah haji.

Salah satu perubahan struktur sosial dalam masyarakat sering ditandai dengan adanya pergeseran elit sosial dalam masyarakat dan juga munculnya elit baru dalam masyarakat. Susanne Keller (1984: 23) mengartikan elit sebagai sekelompok orang yang menduduki posisi tertentu dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Ia membagi elit menjadi tiga kelompok besar, yaitu Elit Penguasa (*Rulling Elite*), Kelas Penguasa (*Rulling Class*) dan Elit Stategis (*Strategic Elite*). Bagi Keller, keberadaan elit stategis, yang biasanya terdiri dari orang-orang atau tokoh informal dalam masyarakat perlu mendapatkan porsi perhatian yang besar, selain karena pengaruhnya yang kuat. Ia juga mempunyai pergerakan yang bebas dalam sebuah sistem. Ia sering berada di luar kursi kekuasaan tetapi pada suatu waktu ia bisa masuk atau menduduki kursi kekuasaan.

Berbeda dengan Keller adalah Viepredo Pareto (Kinlock, 1977: 20) berpendapat bahwa elit adalah orang yang berhasil dan mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat yang berbeda. Pareto percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda tersebut umumnya datang dari kelas yang sama. Disini Pareto sangat pesimis akan terjadi perubahan sosial karena yang terjadi hanyalah perubahan posisi antar elit dalam masyarakat. Pareto membagi elit menjadi dua kelompok, yaitu elit yang sedang berkuasa dan elit yang sedang tidak berkuasa. Dua kelompok elit tersebut mempunyai dua karakter yang berbeda, yaitu kategori "*Lion*" yang berkarakter buas dan kuat, umumnya mereka terdiri dari para bangsawan, militer dan agamawan. Sementara yang satunya kategori "*Fox*" dengan karakter licik yang selalu menunggu situasi

untuk mengambil alih kekuasaan, umumnya mereka terdiri dari para pengusaha.

Sementara itu, Gaetano Mosca (Varma, 1992: 205) menegaskan bahwa perubahan sosial sangat mungkin terjadi bila elit yang ada tidak lagi mampu menjabarkan fungsinya dan akan digantikan oleh orang biasa yang karena proses belajar mampu meningkatkan kemampuannya untuk menembus posisi kelas sosial di atasnya. Mosca membagi masyarakat dalam tiga kelas, yaitu *Elit*, *Sub Elit* dan *Massa*.

Teori Keller dan Mosca tersebut di atas percaya bahwa sikulasi kekuasaan akan terjadi tidak hanya dari kelas yang sama tetapi juga dari kelas yang berbeda. Dalam perspektif Keller, maka Warok adalah bagian dari Elit Strategis. Sementara itu menurut perspektif Mosca, Warok adalah bagian dari Sub Elit dalam masyarakat. Dengan demikian, teorinya lebih cocok bila digunakan dalam memahami fenomena perubahan struktur sosial para Warok di Ponorogo.

DINAMIKA FUNGSI SENI REYOG

Sebagaimana seni budaya lain yang mampu menjadi daya tarik massa maka keberadaan seni Reyog juga mengalami dinamika fungsi dari fungsi awalnya. Semula seni Reyog hanyalah sebuah seni budaya berwujud sendra tari yang melibatkan puluhan orang dengan diiringi berbagai instrumen masih tradisional terdiri dari seperangkat gamelan dan angklung yang mengisahkan sebuah cerita yang bersumber pada lima versi. Seperti yang diceritakan oleh Rido Kurnianto (1997: 26) bahwa terdapat lima versi yang melatarbelakangi munculnya kesenian Reyog. Satu diantara lima versi tersebut adalah yang paling dominan membangun persepsi masyarakat Ponorogo secara luas. Versi tersebut telah menguatkan legenda perjalanan seorang raja, *Klono Sewandono*, dari kerajaan Bantarangin dalam rangka menyunting seorang putri *Songgolangit*, dari kerajaan Daha. Dan perjalanan tersebut menjadi peristiwa yang heroik dari sang raja karena harus menaklukkan berbagai rintangan di perjalanan.

Seni tradisional ini tentu sangat atraktif khususnya bagi masyarakat Ponorogo. Karena begitu atraktifnya seni ini maka keberadaannya mampu menghadirkan puluhan bahkan ratusan pengunjung. Daya tariknya yang tinggi tersebut merupakan potensi dimanfaatkan oleh kekuatan politik manapun. Terbukti pada tahun 1960-an, PKI dengan LEKRA-nya efektif melakukan mobilisasi massa untuk mendapatkan simpati masyarakat dengan seni Reyog sebagai instrumen pengerah massa. Seperti kata Pramono (2004; 109), bahwa seni Reyog dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan misi dan visi politik tertentu yang akhirnya mengarah pada politisasi seni budaya Reyog untuk mobilisasi massa. Dan sejarah politik lokal pada masa pemerintahan lokal juga membuktikan bahwa fenomena pemanfaatan Kesenian Reyog untuk tujuan politik cukup kuat. Partai Golkar, partai pemerintahan Orde Baru, hampir pada setiap acara yang melibatkan massa banyak juga memanfaatkan kesenian Reyog. Bahkan lebih dari itu, atribut para Konco Reyog juga sering memakai kaos kuning yang mengesankan bahwa kesenian Reyog dengan para pendukungnya juga sudah di bawah kendali Partai Golkar tersebut. Bahkan pada era reformasi pun, keberadaan kesenian Reyog tidak pernah luput dari upaya kekuatan politik untuk memanfaatkan keberadaannya. Pada Pemilu tahun 1999 dan tahun 2004 hampir setiap partai politik besar berupaya menggunakan kesenian ini untuk instrumen pengerah massa. Terhadap fenomena ini Warok Kasni (Mbah Wo Kucing), menurut hasil penelitian Pramono (2004: 112), mengatakan bahwa seni Reyog tampil dalam setiap acara yang diadakan oleh partai politik tertentu tidak lebih dari kerja profesional saja. Selanjutnya ia mengatakan bahwa siapa yang megundang untuk pertunjukan, pihaknya siap untuk melayani. Bukan karena partai atau kelompok kepentingan politik tertentu.

Namun demikian perkembangan peran dan fungsi seni budaya Reyog ini nampaknya tidak menyurutkan atau tidak menghilangkan perannya dalam budaya. Bahkan dalam sistem kepariwisataan nasional kesenian ini lebih memantapkan posisinya sebagai salah satu obyek wisata budaya andalan. Peran budaya kesenian ini terus berkembang terbukti dengan selalu digelarnya kegiatan Festival Reyog Nasional yang

diselenggarakan setiap tahun, menyongsong Perayaan Satu Muharram di Ponorogo, yang diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia.

DINAMIKA PERAN WAROK

Sebagaimana tokoh masyarakat yang lain, baik yang formal maupun informal, keberadaan Warok juga begitu penting di mata masyarakat. Dalam acara-acara tertentu bahkan begitu sentral perannya. Pemahaman masyarakat bahwa Warok adalah seorang tokoh masyarakat lokal yang dianggap mempunyai kesaktian dan berperan mengemban nilai-nilai lokal yang sering digambarkan dengan jujur, berani, lugu dan apa adanya. Oleh karena itu, Warok sering dianggap penggambaran sebenarnya tentang karakter masyarakat Ponorogo.

Meskipun dalam sejarah pemunculannya masih sulit dipastikan apakah Warok terkait dengan pemunculannya kesenian Reyog, namun yang pasti dalam perkembangannya kesenian Reyog dan Warok bagai sekeping uang logam dengan sisi yang berbeda tetapi sulit untuk dipisahkan, karena pada akhirnya setiap unit kesenian Reyog yang terdiri dari seperangkat *dhadhak merak* dan gamelan yang didukung puluhan seniman akan terdapat seorang atau beberapa orang Warok. Perlu diketahui bahwa setiap desa di Ponorogo dipastikan mempunyai satu group kesenian Reyog atau lebih, sementara jumlah desa/kelurahan di Ponorogo sampai saat ini sebanyak 303 desa/kelurahan.

Beberapa dekade terakhir perkembangan peran kesenian Reyog dalam masyarakat seiring dengan perkembangan peran Warok. Kenyataan menunjukkan bahwa kedua hal tersebut tidak bisa membatasi diri pada peran sosial-budaya saja tetapi juga sudah bergerak pada peran yang lebih kompleks lagi, yaitu peran dalam politik.

Reyog sebagai sebuah seni budaya yang mempunyai daya tarik tinggi telah menjadi instrumen pengumpul massa. Sementara itu, Warok yang mempunyai status sosial yang baik sering menjadi *vote getter* dalam setiap Pemilu. Bahkan, menurut Pramono (2004: 113), banyak sekali para tokoh Reyog (Warok), terutama para pemudanya,

yang kemudian terakses dalam pemilihan kepala desa maupun perangkat desa. Dengan demikian para warok dan para konco Reyog mulai sadar akan posisi politiknya. Di satu sisi mereka telah menjalankan fungsi manifestnya, yaitu sebagai mobilisator massa, dan di sisi lain mereka sedang menjalankan fungsi latentnya dengan menaikkan status sosial politiknya. Mereka semula berada pada posisi sebagai massa, dengan situasi politik yang memungkinkan, maka mendorong mereka untuk memasuki posisi sub-elit. Sementara itu, para Warok yang sebelumnya menempati posisi sebagai sub-elit, dengan keadaan politik yang ada, menjadi pendorong menuju posisi elit. Lurah *Jlg*, *IS*, dan *Smd* adalah sosok Warok yang mewakili fenomena dinamika fungsi Warok di tingkat desa/kelurahan. Sementara itu, Warok *Tbn* adalah sosok Warok yang tidak hanya mampu menduduki posisi elit di tingkat desa/kelurahan dengan menjadi Kepala Kelurahan Cokromenggala tetapi juga mampu menjadi seorang anggota DPRD Kabupaten Ponorogo mewakili salah satu Partai Politik (Golkar) untuk dua periode (tahun 1997 s/d 1999 dan tahun 1999 s/d 2004) sebelum akhirnya gagal mencalonkan lagi menjadi anggota dewan pada Pemilu 2004. Sekalipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa *Tbn* pada Pemilu 2004 telah menjadi *vote getter* pada Daerah Pemilihan IV untuk Partai Golkar yang meliputi wilayah Kecamatan Ngrayun dan Slahung. Seperti kata Sudijono (1995: 16), pada akhirnya status sosial seseorang akan mempengaruhi tingkat partisipasi politiknya. Status sosial para Warok yang baik, mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Karena menyadari posisinya sebagai tokoh informal yang mempunyai pengikut tidak sedikit dan mengetahui dirinya sebagai *Elit Strategis*, maka sangat beralasan kalau mereka mulai menaikkan *harga tawar* tidak hanya sebagai *istrumen pengerah massa* tetapi berkembang menjadi *pemain politik* yang diperhitungkan.

Namun demikian dinamika peran politik yang dijalani tidak jarang menimbulkan konflik internal diantara para Warok. Mereka dihadapkan pada kenyataan politik di sekitarnya, dimana setiap kekuatan politik yang ada selalu berusaha menarik simpati para Warok. Hal ini terbukti pada pertengahan bulan Agustus 2004 telah terjadi

pergantian pengurus INTI secara *sepihak*. Analisis yang dikembangkan saat itu adalah bahwa pergantian tersebut terkait persiapan dari salah satu Bakal Calon Bupati dalam menyongsong Pilihan Bupati Ponorogo tahun 2005.

MOBILITAS VERTIKAL PARA WAROK

Dengan pengertian yang agak luas para Warok mulai melakukan mobilitas vertikal atau gerakan sosial vertikal ketika mereka mulai masuk organisasi-organisasi massa yang berorientasi politik. Menurut Sorokin (Soekanto, 1990: 279) saluran yang terpenting dalam gerak sosial ini adalah angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi dan keahlian. Pada tahun 1947 banyak para Warok yang tergabung dalam BRP (Barisan Reyog Ponorogo) yang dilahirkan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia). Berbagai atribut partai komunis selalu menghiasi penampilan mereka. Dalam hal ini keberadaan Warok tidak bisa dipisahkan dengan seni budaya Reyog. Bersamaan dengan munculnya BRP, maka muncul BRN (Barisan Reyog Nasional) yaitu organisasi yang menghimpun aktifis Reyog yang berorientasi politik pada PNI (Partai Nasional Indonesia).

Fenomena politik menonjol lainnya yang bisa dikaitkan dengan keberadaan Reyog dan Warok adalah terbentuknya INTI (Insan Taqwa Illahi), yaitu organisasi massa yang menghimpun para Warok dan Ulama di Ponorogo pada tahun 1977, dengan tujuan utama menciptakan keamanan di Ponorogo dan memenangkan Partai Golkar dalam Pemilu tahun 1977. Pembentukan INTI tersebut melibatkan Warok-Warok ternama ketika itu, antara lain Warok *Smd* (Josari), Warok *Tbn* (Cokromenggalan), Warok *Jlg* (Karang Lo Lor), Warok *IS* (Mangunsuman), Warok *Kd* (Kedung Banteng), Warok *Mld* (Gegeran), Warok *Ngn* (Brotonegaran), Warok *Kbn* (Kauman), Warok *Wlt* (Bulu Kipik), Warok *Rkn* (Badegan), Warok *Tph* (Balong), Warok *Jk* (Purbosuman) dan Warok *MK* (Brotonegaran). Sementara itu dari kalangan Ulama diwakili Haji *MT*.

Secara khusus fenomena mobilitas vertikal ini nampak dengan ditunjuknya beberapa Warok ternama oleh Bupati Sumadi untuk dijadikan sebagai Kepala Desa dan Kepala Kelurahan. Hal tersebut merupakan bagian strategi Golkar untuk memenangkan Pemilu tahun 1977. Yang dialami oleh para Warok tersebut merupakan bentuk gerak sosial naik dari sebagai tokoh informal biasa menjadi menduduki pisisi jabatan yang mempunyai kekuasaan formal sebagai Kepala Desa atau Kepala Kelurahan. Dengan kaca mata Keller (1984: 59), hal ini bisa dipahami sebagai *Sirkulasi Elit* dimana para Warok yang sebelumnya hanya sebagai elit strategis karena diuntungkan oleh situasi tertentu telah bergerak ke pusat kekuasaan dengan menjadi Kepala Desa atau Kelurahan. Hal ini dapat dibuktikan, bahwa pada tahun 1977 terdapat lima orang Warok yang menjadi Kepala Desa dan dua orang Warok lain menjadi Kepala Kelurahan.

Seperti kata Sorokin (Soekanto, 1990: 276) bahwa gerak sosial atau mobilitas sosial terbagi dalam dua bentuk, yaitu *ke atas* dan *ke bawah*, maka para Warokpun mengalami dua bentuk pula. Kalau sebelum tahun 1977 mereka hanya sebagai *Elit Strategis* lalu pada tahun 1977 mereka bisa memasuki atau menduduki *Rulling Elite* (elit penguasa), begitu pula pada awal tahun 2000 banyak diantara mereka memasuki usia enam puluh tahun dan itu berarti memasuki usia pensiun. Dengan sendirinya mereka harus meninggalkan kursi kekuasaan di Desa atau Kelurahan. Berakhirnya masa jabatan formal tersebut ternyata tidak menyurutkan perhatian mereka terhadap persoalan-persoalan politik, terutama politik lokal. Mereka tetap mencoba menempatkan diri lagi sebagai bagian *Elit Strategis* yang keberadaannya perlu diperhitungkan.

Dengan demikian Warok yang selama ini dikenal sebagai *Symbolic Leader* (Usman: 1998; 63), yaitu seorang pemimpin yang hanya diakui oleh massa yang dipimpin telah berubah status menjadi seorang *Visible Leader*, setelah menjadi Kepala Desa atau Kepala Kelurahan, yaitu pemimpin yang diakui oleh massa yang dipimpin dan pemimpin-pemimpin lain.

MOBILITAS HORISONTAL PARA WAROK

Walaupun tidak sedinamis dalam fenomena politik, namun fenomena keagamaan para Warok tidak bisa dilewatkan begitu saja dalam sejarah dan dinamika masyarakat Ponorogo secara keseluruhan. Sejarah Ponorogo perlu mencatat bahwa terdapat beberapa Warok telah menunaikan ibadah haji. Secara kuantitatif jumlah mereka yang pergi haji baru tiga orang. Namun secara kualitatif mereka yang pergi haji adalah para Warok yang paling berpengaruh pada masanya, yaitu Warok *Smd*, Warok *Jlg* dan Warok *Tbn*. Kepergian mereka ke Tanah Suci perlu dicatat dalam sejarah lokal Ponorogo karena kepergian mereka bukanlah peristiwa biasa bagi seorang Warok. Kepergian seorang Warok menunaikan Rukun Islam ke lima tersebut bukan peristiwa keagamaan biasa, tetapi peristiwa ini bisa dianggap sebagai peristiwa sosial-budaya.

Secara sederhana hal ini bisa menjadi pemahaman bahwa para Warok tersebut sedang menempuh perjalanan sosial budaya dari seorang *Abangan* menjadi seorang *Santri*. Sorokin (Soekanto, 1990: 276) menganggap hal ini sebagai sebuah fenomena mobilitas sosial horisontal. Sorokin mengartikan gerak sosial horisontal sebagai peralihan individu dari suatu kelompok ke kelompok lainnya. Namun demikian, fenomena ini tidak sama persis dengan yang digambarkan oleh Sorokin, karena para Warok yang menunaikan ibadah haji tersebut tidak pernah meninggalkan kelompoknya. Bahkan dengan status ganda sebagai seorang *Abangan* sekaligus sebagai seorang *Santri* tersebut mereka lebih leluasa berinteraksi dengan kedua kelompok tersebut. Sesuatu yang selama ini jarang terjadi karena adanya perbedaan kebiasaan hidup dan sistem nilai diantara kedua kelompok tersebut.

Perubahan status ini tidak hanya berpengaruh pada cara pandang kelompok *Santri* terhadap para Warok yang menunaikan ibadah haji tersebut, tetapi sebaliknya juga bagi para Warok terhadap kelompok *Santri*. Mengingat Warok adalah *Symbolic Leader* maka banyak pengikutnya juga mengikuti pandangan baru dan hal tersebut memberikan kontribusi dalam mengurangi jurang sosial diantara dua kelompok tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Keller, Suzane, 1984, "*Penguasa dan Kelompok Elit, Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*", Penerbit Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta.
- Kinlock, Graham C., 1977, "*Sociological Theory, It's Development and Major Paradigme*".
- Pramono, 2004, "*Budaya Reyog dan Komunikasi Politik: Politisasi dan Kulturisasi Seni Budaya Reyog dalam Praktek Politik di Ponorogo*", dalam Jurnal Fenomena, Volume 1 Nomor 2 Juli 2004, LPPM Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Rido Kurnianto, 1997, "*Dampak Kesenian Reyog Ponorogo terhadap Jiwa Keagamaan Konco Reyog di Kabupaten Ponorogo*", hasil Penelitian DIP APBN Tahun 1996/1997.
- Soekanto, Soerjono, 1990, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Sudijono Sastro Admojo, 1995, "*Perilaku Politik*", Penerbit IKIP Semarang Press.
- Sutopo, HB., 1989, "*Dukuh Mbrumbung dan Nggerangan Mengukir Seni Rupa Cipta Rakyat*", Makalah, Surabaya.
- Sunyoto Usman, 1998, "*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*", Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Varma, SP, 1992, "*Teori Politik Modern*", Penerbit Rajawali, Jakarta.

ETIKA DAN MORAL POLITIK MENYONGSONG PILKADA BUPATI PONOROGO TAHUN 2010 ⁸

FILSAFAT ETIKA DAN MORAL POLITIK

Sejarah ilmu Politik telah melahirkan pemikir-pemikir politik yang pada akhirnya sangat mempengaruhi pikiran dan perilaku para elit, baik para elit politik maupun para elit-elit yang lain. Sejarah pemikiran manusia mencatat hidupnya seorang filosof besar bernama Hegel yang melahirkan filsafat hidup manusia dengan jargon *Mind controls the body*, yang inti ajarannya menghendaki manusia agar hidupnya dikendalikan oleh pikiran sehatnya. Konsep hidup yang adiluhung ini nampaknya tidak banyak direspon oleh para elit pada zamanya maupun pada masa sekarang. Sementara itu pada zaman yang hampir sama, yaitu abad pertengahan, juga hidup seorang filosof kiri Karl Marx yang melahirkan filsafat hidup yang sangat bertentangan dengan ide Hegel yang notabene adalah gurunya sendiri. Karl Marx memperkenalkan ide dasarnya dengan *Body controls the mind*, yang intinya bahwa jalan pikiran manusia pada akhirnya akan dikendalikan oleh kebutuhan ekonominya. Nampaknya filsafat hidup yang terakhir ini yang paling banyak diikuti manusia zaman sekarang. Filsafat hdiup dari Karl Marx pada akhirnya bersinergi dengan filsafat Politik dari Niccolo Machiavelli, bapaknya ilmu politik modern, yang memisahkan etika dan moral dari kajian dan tindakan politik seseorang atau Negara. Jargon politiknya, *The end justifies the means*, atau bisa diartikan

⁸ Makalah ini ditulis oleh Jusuf Harsono dan telah dipresentasikan pada tanggal 4 Desember 2009 dalam acara seminar yang diselenggarakan oleh Bakesbanglinmas Kabupaten Ponorogo.

sebagai tujuan menghalalkan segala cara telah menjadi pedoman perilaku para politisi zaman sekarang. Ia tidak peduli dengan moralitas dan immoralitas aksi-aksi politik yang menuju pada atau menyimpang dari tujuan moral manusia (Schmandt, 2002). Tanpa disadari filsafat hidup manusia dari Karl Marx dan Machiavelli telah mendominasi perilaku manusia untuk mencapai tujuannya termasuk diantaranya adalah untuk memenuhi keinginan-keinginan politiknya.

KARAKTER MASYARAKAT PONOROGO

Setiap masyarakat maupun etnik selalu mempunyai ciri-ciri fisis maupun non fisis terutama berkaitan dengan watak atau karakter dasar secara umum. Sejauh ini belum ada suatu kajian khusus yang mendalam tentang karakter asli masyarakat Ponorogo. Namun penulis mendapati sebuah temuan menarik tentang karakter masyarakat Ponorogo asli yang penulis dapati dari beberapa Warok tradisional. Kalau ini bisa diasumsikan sebagai representasi karakter masyarakat Ponorogo asli maka penulis menemukan karakter masyarakat Ponorogo adalah: Berani, Lugu, Jujur, Bersahaja, Religius, Statis, dan Keras.

Berdasar pada kenyataan tersebut maka sebenarnya tidak ada ruang bagi masyarakat Ponorogo untuk melupakan hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan etika dan moral. Fakta terakhir menunjukkan satu perkembangan yang luar biasa dari berbagai bidang kehidupan yang semuanya mengarah pada adanya dinamisasi masyarakat Ponorogo yang ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Beberapa karakter di atas menunjukkan nilai positif pada masyarakat Ponorogo namun disisi lain justru menjadi titik kelemahan karena mudah dimanfaatkan oleh orang lain terutama elit-elit politik yang sedang mempunyai kepentingan. Diantara nilai-nilai yang bisa dimanfaatkan karena mudah dimobilisasi adalah *berani* dan *lugu*. Beberapa karakter tersebut seperti *jujur*, *lugu*, *religious* dan *statis* dimungkinkan terbentuk karena sebagian besar berprofesi sebagai petani. Sifat statis orang Ponorogo hanya bertahan sampai akhir tahun 1990-an. Sejak Pemilu tahun 1999 yang dipandang sebagai pemilu yang

paling demokratis maka masyarakat Ponorogo mengalami perubahan karakter. Masyarakat Ponorogo, dalam bidang politik, dianggap sebagai masyarakat yang paling dinamis dibandingkan dengan masyarakat sekitar seperti Pacitan, Magetan, Ngawi, dan Madiun. Dalam berbagai aspek seperti ekonomi, budaya, sosial dan politik Ponorogo adalah kota yang sangat dinamis.

DINAMIKA POLITIK PONOROGO

Ponorogo adalah kota yang secara politik paling dinamis di daerah Mataraman atau Jawa Timur bagian Barat. Fenomena politik pada Pileg tahun 2004, Pilpres tahun 2004, dan Pilkada tahun 2005 adalah fenomena politik yang sangat menarik untuk diamati. Pada Pileg tahun 2004, Partai Golkar dan PDIP telah menunjukkan dominasinya di DPRD Ponorogo, pada Pilpres tahun 2004 SBY- JK dari Partai Demokrat telah memperoleh suara terbanyak di kota ini, sementara itu pada Pilbup tahun 2005 Muhadi – Amin yang diusung dari PKB telah memenangkan suara masyarakat Ponorogo. Demikian pula pada Pileg untuk DPR pusat Partai Demokrat terasa begitu digdaya sementara untuk DPRD Ponorogo Partai ini belum bisa mengungguli PDIP dan Golkar. Sementara itu untuk Pilpres tahun 2009 pasangan SBY – Boediono tidak mendapatkan perlawanan yang berarti dari pasangan lainnya. Dari kejadian di depan maka kita tidak terlalu salah untuk mengatakan bahwa Ponorogo mempunyai dinamika politik yang baik. Masyarakat mempunyai mobilitas politik yang cepat dan tidak terjebak pada orientasi-orientasi tertentu yang beku. Disisi lain siapapun akan mengalami kesulitan untuk melakukan pemetaan atas sikap politik masyarakat. Dengan demikian prediksi yang sembrono tentang kecenderungan pemilih akan sangat menyesatkan Tim Sukses para Cabup dan Cawabup. Elit harus mengeluarkan *energi* dan *cost* yang besar untuk menaklukkan masyarakat Ponorogo dan bukan tidak mungkin ini merupakan godaan awal untuk melakukan penyimpangan etika dan moral dalam berpolitik. *Money Politic* oleh para calon, calon apapun, akan menjadi godaan yang paling sederhana untuk

memenangkan sebuah kompetisi. Dikatakan sebagai godaan sederhana karena jenis godaan yang lain juga ada yaitu:

1. Penggunaan Birokrasi sebagai mesin politik untuk mendulang suara mengingat Birokrasi mempunyai tempat strategis di sistem politik kita dan tentu saja mempunyai pengaruh yang besar di masyarakat.
2. Bekerjasama dengan oknum Panitia Pemilihan pada level tertentu untuk melakukan manipulasi data hasil pemilihan agar menguntungkan salah satu pihak peserta Pemilukada.
3. Penggunaan kekuatan kelompok tertentu untuk melakukan intimidasi pada pemilih untuk memilih sesuai dengan keinginannya. Cara ini adalah cara yang paling primitif tetapi bukan tidak mungkin akan terjadi.

Tahun 2010 adalah tahun yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Ponorogo karena tahun depan kota ini akan mengelat satu peristiwa besar yang akan memakan biaya puluhan milyar, yaitu berupa Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih seorang figur Bupati dan Wakilnya. Walaupun sejauh ini kota Ponorogo masih nampak *adem ayem* karena memang masih lama dan masih belum nampak figur-figur yang akan bersaing namun bukan tidak mungkin seluruh Calon maupun Tim sukses sedang menyiapkan strategi dan amunisinya. Hal baik yang sudah bisa kita catat sejauh ini adalah belum satupun para calon maupun Tim sukses yang sudah menebar “ranjau politik” yang ini bisa dimaknai bahwa semua pihak memang punya kemauan kuat untuk saling menjaga integritas pihak lain. Dengan pengertian lain semua pihak sepakat untuk melaksanakan etika politik baik. Namun demikian godaan tidak akan berhenti sampai pelaksanaan Pilkada selesai. Semakin dekat dengan pelaksanaan Pilkada maka godaan akan semakin gencar dan kuat serta semakin berat kadarnya dari sekedar *money politic* sampai dengan konflik fisik. Untuk yang terakhir ini kota Ponorogo mempunyai tingkat kerawanan yang tinggi.

POTENSI KERAWANAN

Sebagaimana kota lain di Bakorwil Madiun, maka kota ini juga menyimpan potensi kerawanan sosial politik yang tinggi. Banyaknya

anggota perguruan bela diri dari berbagai aliran dengan doktrin komando yang tidak efektif menjadikan mereka mudah dipotong garis komandonya oleh pihak yang berkepentingan untuk melakukan aksi-aksi yang tidak terstruktur dan tidak sesuai dengan garis komando dari induk organisasinya dan ini adalah salah satu kerawanan politik yang ada. Setiap Tim Sukses tentu berusaha dengan segala cara yang mungkin untuk memanfaatkan jaringan kerja dari organisasi perguruan bela diri yang ada. Kelompok ini menjadi sangat menarik perhatian para Tim Sukses karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Mereka mempunyai jaringan kerja yang luas sampai kedesa.
2. Mereka mempunyai struktur komando yang tidak efektif untuk jangkauan yang luas.
3. Mereka mempunyai anggota yang banyak bahkan sampai puluhan ribu.
4. Berdasarkan pengalaman mereka juga pernah dimanfaatkan menjadi mesin politik oleh partai politik tertentu dan pasangan Cabup-Cawabup pada masa lalu.

Mereka bisa dianggap potensial sumber kerawanan politik karena mereka mempunyai ketrampilan olah fisik yang tidak dimiliki oleh warga pada umumnya. Namun demikian hal ini juga merupakan potensi keamanan yang efektif kalau ada yang bisa memobilisasi dan mengelola mereka untuk fungsi-fungsi keamanan. Mengelola mereka bukanlah persoalan yang gampang dan murah mengingat mereka sudah terjebak pada kepentingan yang sama dengan system nilai yang berbeda karena suatu saat potensi konflik antar perguruan bela diri ini juga bisa manifest apalagi sudah ada stimulus yang tidak konstruktif dari para Tim Sukses pasangan Cabup – Cawabup. Stimulus itu bisa berarti janji-janji yang akan diberikan ketika pasangan yang didukung memperoleh kemenangan dalam Pemilu tersebut. Dikhawatirkan bila janji-janji tersebut adalah janji-janji yang tidak masuk akal yang pada akhirnya akan menimbulkan kerawanan politik baru meskipun Pemilu sudah lama berlalu seperti adanya gerakan massa menuntut janji pada bupati baru.

MAKNA 1 SURO BAGI MASYARAKAT PONOROGO ¹⁰

Hampir setiap kota di Jawa mulai dari Banyuwangi sampai Tegal pada setiap menjelang bulan Suro, menurut kalender Jawa, selalu bisa dijumpai adanya kegiatan masyarakat maupun Pemerintahan Daerah yang bernuansa tradisi atau budaya Jawa mulai dari menyelenggarakan malam tirakatan, kirab pusaka sampai pada acara jamas pusaka atau membersihkan pusaka atau senjata tradisional para moyangnya. Bulan Suro adalah bulan suci orang Jawa yang menandai pergantian tahun Jawa yang diskralkan dan karenanya diadakan berbagai acara tradisi untuk menyongsong. Kegiatan Suro-an sudah dilakukan masyarakat Ponorogo secara marak sejak tahun 1970-an dengan acara tunggal, yaitu berjalan kaki mengelilingi kota dengan tidak mengeluarkan suara dan dilakukan hanya oleh para orang dewasa. Sementara itu sekarang justru dilakukan oleh para usia remaja dengan berbagai polah-tingkah yang kadang tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai atau norma masyarakat Jawa. Mereka berjalan sambil bergandengan tangan dengan lawan jenis yang seringkali dengan melanggar etika sosial yang berlaku. Berbagai kegiatan menyambut 1 Suro atau datangnya tahun baru Jawa sering disebut masyarakat Ponorogo sebagai Suro-an.

Bulan Suro bagi masyarakat Ponorogo mempunyai makna tersendiri karena semangat untuk menyambut datangnya bulan ini hampir sama dengan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Banyak warga Ponorogo yang tinggal di kota di luar Ponorogo menyempatkan diri pulang ke Ponorogo untuk merasakan bersama-

¹⁰ Artikel ini ditulis oleh Jusuf Harsono dan Slamet Santoso

sama keluarga dan masyarakat luas menikmati datangnya bulan Suro yang puncaknya terjadi pada malam 1 Suro setiap tahunnya. Semangat untuk mengikuti acara Suro-an di kota ini begitu kuat karena datangnya bulan ini disambut masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan berbagai acara besar mulai dari yang tradisional sampai yang modern. Berbagai acara tradisional digelar oleh Pemerintah Ponorogo mulai dengan Kirab Pusaka dan Jamasan Pusaka Bathoro Katong, Kirab Pusaka dan Jamasan Pusaka Bantar Angin, Larung Sesaji di Telaga Ngebel, Istighosah di Pendopo Agung sampai pada acara modern seperti Festival Reog Nasional yang diikuti oleh group reog dari luar Ponorogo termasuk dari luar Jawa, Pertunjukan Band, Pacuan Kuda, Road Race, Kontes Kakang Senduk sampai pada Pertunjukan Kembang Api di Aloon-Aloon Ponorogo. Berbagai kegiatan tersebut didanai dengan APBD sampai milyaran rupiah. Masyarakat sendiri juga banyak menyelenggarakan panggung hiburan mulai dari musik dangdut sampai dengan pertunjukan Wayang Kulit.



Gambar 8. Kegiatan Kirab Pusaka dalam Perayaan Grebeg Suro

Puncak malam Suro biasanya ditandai dengan adanya ratusan ribu masyarakat Ponorogo dan para pengunjung dari luar kota yang berjalan kaki mengelilingi kota mulai waktu sehabis sholat Ishak sampai dengan pukul 12.00 malam dan berakhir di Aloon-Aloon Ponorogo sambil menikmati pertunjukan Kembang Api yang dinyalakan oleh Bupati Ponorogo untuk menandai penutupan rangkaian acara menyongsong datangnya bulan Suro dan disudut-sudut kota masyarakat banyak yang secara swadaya menyelenggarakan panggung-panggung pertunjukan kesenian. Pada malam itu juga diumumkan para pemenang Festival Reog Nasional yang biasanya diselenggarakan selama lima hari sebelumnya. Peristiwa malam 1 Suro inilah yang sering dijadikan magnet bagi para perantau untuk pulang ke Ponorogo.

Berjalan kaki mengitari kota adalah kesan yang paling mendalam bagi para perantau maupun pengunjung dari luar kota. Berjalan kaki bersama ratusan ribu pejalan kaki adalah peristiwa langka yang jarang dijumpai di kota-kota lain apalagi jalanan dalam keadaan bebas kendaraan. Pada malam itu banyak juga dijumpai para pejalan kaki berpakaian ala warok Ponorogo yaitu baju dan celana hitam yang sangat longgar dan berkaos dalam bergambar khas Ponorogo seperti Reog, kepala harimau atau warok sakti yang berwajah angker.

FENOMENA EKONOMI

Kegiatan Suro-an di Ponorogo adalah kegiatan besar yang melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat Ponorogo maupun pengunjung dari luar dengan biaya yang sangat besar untuk ukuran kota kecil. Rangkaian kegiatan Suro-an di kota ini biasanya dimulai dua minggu sebelum malam Suro sampai dengan satu minggu setelah malam Suro. Diperkirakan berbagai kegiatan yang melibatkan berbagai unsur Pemerintahan, swasta dan masyarakat langsung tersebut telah berhasil memutar uang sebesar belasan milyar rupiah yang terserap oleh berbagai pelaku ekonomi di Ponorogo mulai perajin reog, penjaja makanan, transportasi, parkir kendaraan, mainan, karcis pertunjukan sampai pada dana yang dikelola oleh Event Organizer yang

mendapatkan job untuk mempersiapkan pertunjukan panggung pada malam pembukaan maupun penutupan.

Suro-an di Ponorogo identik dengan ekonomi kerakyatan khas Ponorogo karena event inilah yang dijadikan moment penting bagi perantau maupun pengunjung dari luar untuk mengenal dan menikmati kembali sesuatu yang khas Ponorogo seperti sate ayam, nasi pecel, dawet gempol, dawet jabung, jenang bata, jenang debok, cinderamata khas Ponorogo seperti kaos bergambar reog, reog mini, bathik reog, dan lain-lain. Sekaligus peristiwa ini adalah kesempatan bagi pelaku ekonomi kerakyatan baru untuk memperkenalkan produknya.



Gambar 9. Berbagai Kegiatan Ekonomi dalam Perayaan Grebeg Suro

FENOMENA SOSIAL-BUDAYA

Suro-an di Ponorogo hampir identik dengan pertunjukan seni Reog. Salah satu pertunjukan yang diharapkan bisa dinikmati oleh para

perantau dan pengunjung dari luar kota adalah pertunjukan seni Reog pada acara Festival Reog Nasional di panggung utama Aloon-Aloon Ponorogo selama lima hari menjelang malam Suro baik pada siang maupun malam hari. Festival ini betul-betul dinikmati masyarakat karena menampilkan berbagai group kesenian reog dari Ponorogo maupun luar yang menampilkan berbagai ketrampilan dan kreasi mereka. Meskipun untuk menikmati acara ini mereka harus mengeluarkan biaya beberapa ribu rupiah untuk membeli tiket masuk arena Festival Reog yang dilaksanakan di panggung raksasa yang dibangun secara permanen pemerintahan Bupati Markum. Peserta Festival Reog Nasional nampaknya memang unit-unit kesenian reog terbaik di Indonesia yang mewakili daerah masing-masing seperti Jakarta, Kutai Kertanegara, Lampung, Palembang, Pontianak, Surabaya, Jember, Trenggalek, Wonogiri, Banjarmasin, dan lain-lain. Masyarakat Ponorogo meyakini bahwa peringatan 1 Suro adalah peringatan berdirinya kota Ponorogo yang ditandai dengan adanya kesenian reog. Dengan pengertian lain bahwa keberadaan kesenian reog tidak bisa dipisahkan dengan peringatan 1 Suro dan berdirinya kota Ponorogo.



Gambar 10. Festival Reog Nasional di Panggung Utama Aloon-Aloon Ponorogo

Selain identik dengan kesenian reog maka bulan Suro juga identik dengan Warok. Warok adalah tokoh sentral di Ponorogo. Warok adalah tokoh penting di Ponorogo yang keberadaannya sangat diperhitungkan mengingat kedudukan sosialnya yang cukup dihormati di masyarakat. Menurut Jusuf (2006: 2), kedudukan sosial para warok

setingkat dengan para ustadz dan pejabat pemerintahan di mata masyarakat. Warok dihormati oleh masyarakat karena mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu diantaranya kemampuan supranatural dan olah kanuragannya berupa kesaktian tidak mempan senjata dan lain-lain. Selain mempunyai kelebihan-kelebihan tadi biasanya para warok mempunyai unit kesenian reog dan menjadikannya warok juga sebagai tokoh budaya karena kelompok kesenian reog biasanya dipimpin oleh seorang warok dilingkungannya. Pada perayaan Suro-an ini biasanya para warok yang dimotori Yayasan Reog menyelenggarakan Sarasehan Warok Nasional yang menjadi ajang kangen-kangenan dan tukar pikiran diantara peserta. Peserta sarasehan adalah seluruh warok di Ponorogo dan perwakilan dari peserta Festival Reog Nasional yang berasal dari luar Ponorogo, bahkan dari luar Pulau Jawa.

FENOMENA RELIGI

Fenomena Suro-an di Ponorogo juga bisa dianggap sebagai fenomena religi mengingat kegiatan keagamaan di bulan Suro juga cukup meningkat. Sebagian masyarakat Ponorogo menganggap bahwa 1 Suro, sebagai 1 Muharram, yaitu bulan yang mengawali datangnya bulan baru mengikuti system penanggalan Islam yang dikenal sebagai tahun Hijriyah. Sebagian masyarakat Ponorogo yang berada di lingkungan Pondok Pesantren menyambut datangnya 1 Muharram dengan suka cita mengingatkan mereka pada beberapa peristiwa besar yang terjadi pada para Rosul. Masyarakat muslim Ponorogo yang taat tadi memperingati dengan melakukan kegiatan istighosah atau pengajian dalam bentuk jamaah dengan jumlah besar di lapangan ataupun di masjid-masjid kecil. Demikian juga dilakukan di sekolah-sekolah agama maupun sekolah umum. Menurut Adib (Ponorogo Pos: 2012), kegiatan menyambut datangnya bulan Suro oleh masyarakat Ponorogo sudah mengarah pada kegiatan yang menjurus ke musyrik yaitu kegiatan yang menurut ajaran agama Islam dianggap telah menyekutukan Allah SWT. Pandangan Adib, salah satu komponen

pemuda Islam, bisa jadi mewakili sebagian masyarakat Islam taat di Ponorogo.

Fenomena religi yang dimaksud diatas bukan berarti bahwa Suro-an hanya diperingati atau disambut oleh masyarakat Islam taat saja. Masyarakat Ponorogo yang masih melakukan tradisi kejawaen dalam berbagai kelompok juga melakukan berbagai kegiatan yang diyakini sebagai syarat menyambut bulan Suro diantaranya dengan Kirab Pusaka, Jamas Pusaka, Larung Sesaji dan perenungan-perenungan di tempat-tempat tertentu. Menurut Soekanto (2012: 154) kegiatan seperti ini dilakukan masyarakat karena masyarakat tersebut meyakini bahwa kekuatan-kekuatan alam disekitarnya tidak selalu baik baginya. Mereka membutuhkan kegiatan tersebut untuk menjaga hubungan dengan kekuatan supra natural agar bisa menjaga masyarakat dari kekuatan alam yang tidak selalu baik tersebut. Bagaimanapun juga larung sesaji adalah kegiatan “religi” bagi mereka. Mereka melakukan dengan suasana sakral yang dilengkapi dengan berbagai material simbol-simbol pemujaan. Rido Kurnianto (2006: 50) menuturkan bahwa masyarakat sekitar Telaga Ngebel melakukan kegiatan tradisi tersebut, larung sesaji, dengan menyiapkan tumpeng nasi berbentuk gunung, lauk-pauk, jajanan pasar yang semua itu dipersembahkan pada arwah para leluhur mereka.

Perbedaan cara karena perbedaan persepsi ini berujung pada perbedaan cara merayakan Suro-an di Ponorogo. Larung Sesaji yang sudah ada sejak jaman nenek moyang diselenggarakan dengan cara-cara adat Jawa berupa membuang sesaji ke tengah Telaga Ngebel pada akhir tahun 1990-an dirubah modelnya dengan melarung doa dalam tulisan Arab yang dilarung ke tengah Telaga. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Bupati Markum atas saran dari beberapa tokoh Islam di Ponorogo. Perubahan model dari larung sesaji menjadi melarung doa juga berpengaruh pada penyebutan kegiatan tersebut menjadi Larung Risalah. Hal ini nampaknya menjadikan masyarakat Ngebel merasa tidak nyaman dan dibalik itu mereka secara diam-diam tetap menyelenggarakan Larung Sesaji pada malam hari sebelumnya. Pada tahun 2011 penggunaan istilah Larung dikembalikan oleh Bupati Amin

menjadi Larung Sesaji untuk mengakomodasi keinginan masyarakat tradisional kawasan Telaga Ngebel.

Tanpa disadari telah terjadi perbedaan-perbedaan persepsi antar berbagai pihak tentang bagaimana menyelenggarakan kegiatan dalam menyambut datangnya bulan Suro atau Muharram setiap tahun yang bukan tidak mungkin akan berpotensi munculnya polarisasi kelompok-kelompok masyarakat di Ponorogo. Larung Sesaji atau Larung Risalah Doa di Telaga Ngebel yang dijadikan kegiatan wisata budaya oleh Pemerintah Ponorogo tersebut telah memicu kesenjangan antara Kelompok Islam dengan Kelompok Kejawen. Kelompok kejawe adalah (Kuntjaraningrat, 1994) kelompok masyarakat yang masih melaksanakan tradisi agama Hindu-Budha di kalangan masyarakat Jawa yang ditujukan kepada kekuatan yang dipercaya ikut menjaga alam. Keputusan Bupati Markum yang merubah nama Larung Sesaji menjadi Larung Risalah Doa telah menjadikan Komunitas Kejawen merasa ditinggalkan. Sementara itu keputusan Bupati Amin untuk mengembalikan Larung Risalah Doa menjadi Larung Sesaji pada tahun 2012 telah menjadikan kelompok Islam merasa diabaikan.

FENOMENA SEJARAH-POLITIK

Hari lahirnya kota Ponorogo ditetapkan oleh Pemerintahan Bupaati Markum pada 1 Suro dan sudah mengalami perubahan pada masa Bupati Muhadi menjadi bulan Agustus. Apa yang melatar belakangi perubahan tersebut masyarakat tidak banyak yang tahu. Bahkan masyarakat juga tidak banyak yang tahu kalau hari lahirnya kota Ponorogo juga sudah mengalami perubahan. Keputusan politik tersebut telah merubah cara pandang masyarakat tentang sejarah kota ini. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa sejarah kota ini dimulai sejak jamanya Prabu Bathoro Katong yang juga menandai berjayanya Islam di kota ini. Demikian juga sebaliknya bahwa sebagian masyarakat, terutama sekitar Somoroto, berpendapat bahwa kota ini sudah ada sejak jamanya Bantar Angin yang merupakan pemerintahan Hindu.



Gambar 11. Larung Sesaji di Telaga Ngebel

Akibat dari perbedaan persepsi antara dua pihak tadi menimbulkan konsep peringatan yang berbeda. Satu kelompok yang didukung oleh Pemerintah Ponorogo menyelenggarakan Kirab Pusaka dimulai dari makam Bathoro Katong di sekitar Pasar Pon yang juga dikenal sebagai Kutho Etan menuju Pendopo Agung di Aloon-Aloon. Sementara itu masyarakat Somoroto menyelenggarakan peringatan dengan Kirab Pusaka dari Petilasan Bantar Angin mengelilingi 5 desa di Kauman lalu kembali ke Petilasan Bantar Angin di Desa Kauman yang juga disebut sebagai Kutho Kulon. Pasar Pon jaraknya sekitar 6 km ke arah Timur dari Pendopo Agung Ponorogo dan Kauman adalah wilayah di sebelah barat Ponorogo yang berjarak sekitar 8 km dari pusat kota Ponorogo atau Pendopo Agung.

Kisah menarik dari penyelenggaraan Kirab Pusaka ini adalah dimulainya Kirab Pusaka sejak jaman Bupati Markum sekitar pertengahan 90an. Perayaan 1 Suro yang merupakan kegiatan tradisi yang semula dilaksanakan oleh masyarakat sendiri tiba-tiba

diintervensi oleh Pemerintah Ponorogo yang bernuansa historis-politis. Bupati Markum yang kehadirannya di Ponorogo sebagai bupati baru belum sepenuhnya diterima masyarakat Ponorogo mengambil inisiatif memaksimalkan kegiatan Suro-an dan dimotori Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kegiatan ini nampaknya mendapat respon positif dari masyarakat Ponorogo. Berikutnya adalah dari kegiatan menyongsong bulan baru tahun Jawa berkembang menjadi peringatan lahirnya kota Ponorogo. Pemikiran ini akhirnya memicu kontroversi karena pada akhirnya muncul pihak-pihak yang merasa diuntungkan dan dirugikan peran sejarahnya. Masyarakat Somoroto adalah masyarakat yang merasa menjadi pihak yang paling dirugikan dengan model peringatan tersebut karena mereka merasa kota Ponorogo sudah ada sejak jaman Kerajaan Bantar Angin.

Tahun 2006 adalah tahun awal perjuangan masyarakat Somoroto untuk memperjuangkan dalam rangka memperoleh pengakuan dari Pemerintah Ponorogo. Masyarakat Somoroto menyelenggarakan kegiatan Grebeg Tutup Suro berupa Kirab Pusaka milik Prabu Kelono Sewandono yang diyakini sebagai Raja Bantar Angin. Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo memang tidak mudah. Bentuk pengakuan yang diharapkan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri sebetulnya adalah dalam bentuk pengakuan bahwa Grebeg Tutup Suro yang diadakan oleh masyarakat Somoroto adalah merupakan bagian dari keseluruhan prosesi peringatan berdirinya Kota Ponorogo dan dimasukkan sebagai agenda kegiatan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan bagian dari sejarah berdirinya Ponorogo tidak pernah kendor. Perjuangan untuk mendapatkan respon dari Pemerintah Ponorogo oleh masyarakat Somoroto merupakan tindakan sosial, menurut Weber (Soekanto, 1985). Pengakuan dari Pemerintah Ponorogo baru diperoleh pada tahun 2010 namun pengakuan itu sendiri sangat berlatar belakang politik.

Tahun 2010 Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan Pilbup atau Pemilihan Bupati yang sudah habis masa jabatannya pada tahun tersebut. Ketika Grebeg Tutup Tahun di Somoroto dilaksanakan pada

tahun 2006 salah satu penggagasnya adalah Wakil Bupati Amin yang pada masa itu dalam posisi berseberangan secara politis dengan sang Bupati Muhadi. Mereka mulai berbeda pandangan sejak dilantik. Wakil Bupati Amin nampak berhasil menarik simpati masyarakat Ponorogo bagian barat terutama di daerah Somoroto. Keadaan tersebut nampak segera dicermati oleh Bupati Muhadi yang pada Pemilu pada akhirnya harus berkompetisi dengan mantan Wakil Bupati Amin. Salah satu bentuk pengakuan dari Pemerintah Ponorogo terhadap kegiatan Grebeg Suro oleh masyarakat Somoroto adalah ikut sertanya Bupati Muhadi dalam barisan dengan naik salah satu kereta kuda yang disiapkan oleh panitia Kirab Pusaka tersebut. Keikutsertaan Bupati Muhadi dalam kegiatan tersebut sangat mudah ditebak sebagai bagian dari upayanya untuk mendapatkan simpati masyarakat Somoroto mengingat dalam pertengahan tahun tersebut ia akan maju sebagai salah satu calon Bupati Ponorogo periode 2010-2015, yang pada akhirnya dimenangkan oleh pasangan Bupati – Wakil Bupati, Amin – Ida. Pengakuan sejarah ini nampaknya bisa diperoleh dengan tindakan sosial yang memanfaatkan situasi politik yaitu adanya persaingan politik antara para Calon Bupati Ponorogo. Amin dan Muhadi, keduanya berasal dari Ponorogo wilayah barat. Amin berasal dari Desa Tosanan dan Muhadi berasal dari Desa Kauman yang kedua desa tadi berada di wilayah Kawedanan Somoroto.

PENUTUP

Kegiatan Suro-an yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan masyarakat luas dan pengunjung dari luar kota semula adalah peristiwa budaya yang rutin dilakukan oleh masyarakat biasa, terutama kaum tua, sejak tahun 1970-an telah berubah menjadi peristiwa yang harus dipahami dengan berbagai perspektif. Aroma politik dan bisnis yang kuat dalam peristiwa tersebut telah meninggalkan nilai-nilai budayanya itu sendiri. Campur tangan pemerintah yang berdimensi politik dan bisnis telah melibatkan para tokoh agama, politik, dunia pendidikan, pelaku bisnis untuk mengedepankan kepentingannya dengan meninggalkan nilai-nilai

budaya yang mestinya bisa menjadi simpul sosial atas berbagai perbedaan horizontal-vertikal dalam masyarakat. Intervensi yang terlalu kuat dari Pemerintah dalam acara-acara kultural tersebut telah memperlebar jarak antara komponen-komponen sosial masyarakat Ponorogo terutama masyarakat Islam taat dengan komunitas Kejawaen. Pengemasan kegiatan budaya atas nama kepentingan kepariwisataan telah menimbulkan kecemasan-kecemasan bagi sebagian kelompok masyarakat. Kelompok Islam taat menganggap bahwa Pemerintah Ponorogo telah memberikan angin segar kepada komunitas Kejawaen, sementara itu komunitas Kejawaen merasa bahwa Pemerintah Ponorogo telah dikendalikan oleh Kelompok Islam aliran keras. Pemerintah harus mulai mengurangi kehadirannya dalam event-event budaya khas. Elit politik harus mulai mengurangi keterlibatan dan pengaruhnya dalam kegiatan-kegiatan budaya “sensitive” tersebut yang ini berarti harus bisa menahan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Jusuf Harsono dan Slamet Santoso, 2006, “*Dinamika Perubahan Struktur Sosial Para Warok Ponorogo (Studi Kasus: Mobilitas Sosial Verikal-Horizontal Para Warok Di Ponorogo)*”, Jurnal Fenomena, LPPM Unmuh Ponorogo, Vol 2 No, Januari 2006,
- Koentjaraningrat, 1994, “*Kebudayaan Jawa*”, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Rido Kurnianto dan Jusuf Harsono, 2006, “*Motif Perlawanan Kultural Tradidi Larung Risalah di Ngebel Ponorogo*”, Jurnal Fenomena, LPPM Unmuh Ponorogo, Vol 3. 1, Januari 2006
- Soerjono Soekanto, 2012, “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985, “*Konsep-Konsep Dasar Sosiologi*”, Penerbit PT Rajawali, Jakarta.

PENURUNAN STATUS KOTA PONOROGO ¹¹ (dari Kota Juragan Menuju Kota Para Pedagang dan Buruh)

Dalam sejarahnya kota Ponorogo dikenal sebagai kota pertanian dan perdagangan. Sebagai kota pertanian Ponorogo dikenal sebagai penghasil kedelai dan rempah yang baik. Sebagai kota perdagangan kota ini pada jaman sebelum kemerdekaan juga dikenal sebagai kota jalur perdagangan kain batik bersama dengan beberapa kota seperti Solo, Yogyakarta, dan Pekalongan. Apalagi pada masa tahun 1950-an kota ini dikenal sebagai produsen kain mori pembuat kain batik namun sejak tahun 1980-an kota Ponorogo lebih menjadi kota perdagangan daripada sebagai kota industri kain batik karena beberapa kelurahan seperti Nologaten, Kertosari, Cokromenggalan yang sebelumnya dikenal sebagai kampung kerajinan batik sudah tidak ada kegiatan ekonomi yang ada hubungannya lagi dengan industri batik. Bahkan beberapa tahun terakhir kampung-kampung tersebut sudah berubah menjadi kawasan atau pusat transaksi business modern karena berkaitan dengan produk-produk industri masa kini seperti usaha perdagangan komputer, sepeda motor, alat-alat elektronika, dan lain-lain. Begitu pula daerah pedesaan yang dulu adalah penghasil kacang-kacangan dan rempah karena daerah pinggiran merupakan daerah agraris yang sebagian besar warganya berprofesi sebagai “*peasant*” telah berubah menjadi daerah kaum “*labour*”.

¹¹ Tulisan ini pernah dimuat dalam Jurnal Ekuilibrium (ISSN 1858-165X), Volume 6 Nomor 1, September 2010, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penulis: Jusuf Harsono dan Sukmono Hadi Hutojo.

Dalam istilah sosiologi ekonomi, kedua kelompok di atas termasuk dalam istilah untuk kelompok “*marginal*”. Hal ini bisa dibedakan dengan “*farmer*” dan “*worker*” karena keduanya yang terakhir mempunyai konotasi yang positif. Kedua kelompok yang terakhir mempunyai strata sosial yang lebih baik. Strata sosial dalam sosiologi ekonomi lebih banyak ditentukan oleh kepemilikan asset dan investasi keluarga. Daerah pedesaan Ponorogo menjadi variabel yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi karena daerah ini merupakan kantong TKI terbesar di Indonesia yang mempunyai kontribusi bagi perkembangan sosial-ekonomi kota Ponorogo.

INDUSTRI BATIK PONOROGO

Sejak pemerintahan orde baru membuka kran perdagangan bebas di Indonesia efek perjajjian dengan World Bank dan IMF tahun 1970-an maka efek domino juga dirasakan akibatnya sampai di kota Ponorogo. Sejak dunia industri batik di kota Solo, Pekalongan, dan Yodjakarta tidak lagi membutuhkan kain mori produk Ponorogo, karena dianggap kurang berkualitas, maka pabrik mori yang merupakan perusahaan koperasi milik para pembatik Ponorogo juga mengalami penyusutan produksi secara drastis dan ini juga mempunyai efek domino karena biaya opsional pabrik mori ini juga tidak bisa ditopang oleh *home industry* batik yang ada di Ponorogo (Jusuf Harsono, 2005). Pabrik kain mori selalu mengalami *over cost* karena mesin pabrik kain mori secara teknis juga tidak boleh berhenti bekerja sementara hasil produksi kain mori juga tidak bisa dilempar ke pasar mengingat perusahaan batik yang muncul tahun 1980-an adalah perusahaan batik dengan modal besar yang membutuhkan kain bahan dengan kualitas yang lebih baik yang perusahaan kain morinya sudah ada di beberapa kota seperti Sukoharjo, Pekalongan, dan Solo. Beberapa perusahaan kain bahan batik dan konveksi batiknya juga dimiliki oleh keluarga Presiden Soeharto. Disatu sisi, perusahaan kain bahan batik produk Ponorogo tidak mampu bersaing dengan perusahaan kain milik keluarga Cendana dan teman-teman. Disisi lain, hasil produksi konveksi batik Ponorogo juga tidak mampu bersaing di

pasaran dengan hasil konveksi batik Semar dan lain-lain yang notabene juga milik keluarga Pak Harto dan teman-teman. Keadaan seperti ini telah mendorong munculnya orientasi-orientasi baru dunia *business* di Ponorogo.

Beberapa kampung di atas yang sebelumnya merupakan kampung industri kini, sejak tahun 1980-an, telah menjadi pusat perdagangan barang-barang industri seperti barang elektronika, hand phone, sepeda motor, komputer, pakaian jadi, dan lain-lain. Beberapa pengrajin batik mencoba bangkit kembali dengan usaha yang sama ternyata mengalami kegagalan, sementara itu sebagian perajin yang lain juga mencoba melakukan diversifikasi usaha sebagai perajin tenun handuk juga mengalami kegagalan karena adanya beberapa faktor penyebab diantaranya adalah kemampuan akses pasar dan kredit modal usaha yang rendah.

TENAGA KERJA INDONESIA

Ponorogo selain dikenal sebagai kota penghasil kain mori dan jalur perdagangan batik di pulau Jawa juga dikenal sebagai penghasil komoditas pertanian yang penting. Dengan karakter tanah yang cukup subur karena berada di dataran rendah yang secara geografis berada diantara dua gunung berapi yaitu Gunung Wilis dan Gunung Lawu maka kota ini merupakan kota pertanian yang cukup ideal karena relative mudah memperoleh air. Air merupakan unsur terpenting dalam masyarakat pertanian. Selain sebagai daerah penghasil beras, Ponorogo juga dikenal sebagai penghasil kedelai dan bahan empon-empon dan rempah yang melimpah. Beberapa tahun terakhir juga sebagai penghasil buah-buahan seperti durian, mangga dan melon. Pertanian dengan hasil yang baik tidak bisa dinikmati oleh seluruh petani di Ponorogo. Hasil pertanian yang memuaskan hanya bisa dinikmati oleh para petani yang mempunyai lahan di dataran rendah yang ada di pinggiran kota karena cukup mudah memperoleh suplai air. Mereka bisa melakukan kegiatan tanam padi dua hingga tiga kali dalam satu tahun. Sementara itu para petani yang berada di pedesaan yang sebagian besar berada di dataran sedang dan tinggi tidak bisa

menikmati aliran air irigasi maupun hujan sepanjang tahun. Rata-rata mereka hanya bisa menanam padi setahun sekali, bahkan ada yang tidak bisa menanam padi sama sekali dalam satu tahun karena faktor jenis tanah yang tidak memungkinkan, karena tanah mereka mengandung kapur mengingat salah satu gunung yang mengapit kota Ponorogo adalah gunung kapur. Keadaan seperti ini telah terjadi selama ratusan tahun. Sesuai dengan karakter masyarakat Jawa secara umum mereka adalah masyarakat yang “*nrimo ing pandum*” yaitu satu filosofi yang selalu menerima keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun karena semua dianggap datangnya dari Tuhan.

Keadaan ini pada akhirnya mengalami perubahan sejak dua puluh tahun yang lalu ketika masyarakat pedesaan mulai mengenal teknologi antenna TV Parabola. Dengan antenna parabola tersebut masyarakat pedesaan bisa melihat seluruh penjuru dunia dengan segala kemajuan peradabannya tanpa ada kendala yang berarti. Mereka mulai mengenal negara-negara Asia Tenggara, seperti yang sering diceritakan oleh teman-teman mereka yang sedang mengais rejeki sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia), terutama di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Hongkong dan lain-lain. Mereka mulai sadar bahwa beberapa teman yang mengais rejeki di negara lain tersebut mengalami perubahan status sosial-ekonominya. Beberapa penelitian membuktikan hal tersebut. Khoirurrosyidin (2008), mendapatkan informasi dalam penelitiannya bahwa para keluarga TKI mengalami peningkatan status sosial-ekonominya secara signifikan. Mereka yang semula merupakan keluarga petani sederhana setelah bekerja di luar negeri telah menjadi keluarga yang terpandang secara ekonomi. Modernisasi telah merubah cara pandang mereka tentang status sosial-ekonomi sebuah keluarga. Filosofi “*nrimo ing pandum*” nampak tidak lagi dijadikan pegangan kuat dalam menjalani hidup. Seperti kata Budiman (2000), bahwa modernisasi menawarkan nilai-nilai baru dalam masyarakat. “*nrimo ing pandum*” adalah nilai tradisional masyarakat pedesaan yang mulai tergeser dengan nilai baru “pemuhan kebutuhan ekonomi dan konsumerisme”. Namun demikian cukup banyak pula yang mengalami kegagalan karena

terlanjur melepas asset tetapi gagal berangkat karena tertipu oleh para calo tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab. Karena mereka mulai berpenghasilan lebih baik maka pola hidup mereka mulai mengalami perubahan menjadi lebih konsumtif dibanding ketika sebelum mereka menjadi TKI. Rata-rata mereka mulai membangun rumah dengan model terbaru dengan bahan yang baik seperti lantai berkeramik, genting pres, perelengkapan rumah tangga serba elektronika seperti mesin cuci, *sound syatem* dengan model *home theatre* yang bernilai belasan juta, sepeda motor, hand phone keluaran terbaru, dan lain-lain. Pola hidup yang seperti ini mulai menarik para tetangga, teman dan saudara untuk ikut mencari pekerjaan di luar negeri dengan ketrampilan seadanya. Akhir tahun 1990-an ketika Indonesia baru saja selesai dilanda krisis ekonomi dan politik yang dahsyat yang ditandai dengan turunnya kekuasaan Pak Harto sebagai Presiden selama 32 tahun dan juga ditandai dengan jatuhnya nilai tukar mata uang rupiah dibanding dengan seluruh mata uang negara asing. Sebagai ilustrasi pada tahun 1999 harga dollar di pasaran mencapai 12 ribu rupiah per dollarnya bahkan pada pertengahan 1998 satu dollar senilai dengan 16 ribu rupiah. Banyak warga Ponorogo dari pedesaan yang mencari peluang kerja diluar negeri karena didorong oleh perbedaan nilai tukar rupiah dengan mata uang asing tersebut selain karena begitu banyak pengangguran sebagai akibat dari banyaknya perusahaan yang gulung tikar karena krisis moneter yang melanda negeri ini. Diperkirakan pada saat itu jumlah pengangguran absolut mencapai 50 juta jiwa. Tidak jarang sebagian dari mereka terpaksa harus melepas asset (*tangible asset*) keluarga mereka seperti tanah pertanian, sapi, sepeda motor, dan lain-lain. Sherraden (2006) menjelaskan bahwa *tangible asset* adalah kekayaan yang nyata seperti tanah, kendaraan, dan lain-lain. Lebih jauh ia berteori bahwa asset berkaitan erat dengan cara berpikir seseorang atau keluarga tentang masa depan mereka. Dalam konteks ini maka para keluarga TKI yang melepaskan asset mereka bisa diartikan bahwa mereka telah mempertaruhkan masa depan keluarga mereka sebagai petani. Beberapa dari mereka setelah kembali dari luar negeri bisa mengambil kembali assetnya dengan cara membeli kembali atau mendapatkan asetnya yang lain berupa tanah di perkotaan, mobil,

dan lain-lain. Mereka yang bekerja keluar negeri umumnya yang perempuan sebagai pembantu rumah tangga sementara yang pria banyak yang menjadi buruh bangunan dan industri. Kedua profesi tersebut memang profesi yang *low skill* mengingat mereka yang berangkat keluar negeri justru mereka yang berpendidikan dan berkecakupan rendah. Selisih nilai tukar mata uang asing dengan rupiah telah menjadikan mereka lebih kaya dan sejahtera secara relatif.

PENUTUP

Fenomena *pertama* yang menarik dari ilustrasi di atas adalah bahwa kota Ponorogo yang pada tahun 1950 sampai 1970-an adalah kota industri batik dan kain mori pada perkembangannya menurun menjadi kota perdagangan yang menurut mata rantai ekonomi adalah perantara dari industri ke konsumen. Sementara industri adalah menempati struktur sebagai subyek dalam mata rantai perekonomian di masyarakat. Fenomena menarik yang *kedua* adalah perekonomian pedesaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya warga pedesaan di Ponorogo yang menjadi TKI telah mempengaruhi dinamika dan pertumbuhan ekonomi Ponorogo secara makro. Kota Ponorogo telah berkembang menjadi kota perdagangan secara pesat. TKI telah memberikan kontribusi terhadap semakin cepat dan besarnya sirkulasi uang di Ponorogo melalui kemampuan keuangan dan gaya hidup keluarga TKI yang cukup konsumtif. TKI melalui remitansinya yang ratusan milyar pertahun telah merangsang pertumbuhan ekonomi Ponorogo. Disatu sisi situasi tersebut bila dilihat dari kaca mata kesejahteraan dan ekonomi maka sangat melegakan dan membanggakan namun bila dilihat dari kaca mata status sosial ekonomi maka situasi ini sangat mengkhawatirkan karena para TKI yang sebagian besar berasal dari keluarga dan kultur petani tidak hanya telah kehilangan asset pertaniannya dengan menjual tanah sebagai bekal keluar negeri tetapi juga kehilangan status sosial-ekonominya dari sebagai “*juragan*” menjadi sebagai seorang buruh. Mereka semula adalah pemilik lahan meskipun sempit. Setidaknya mereka adalah majikan bagi dirinya sendiri. Dalam struktur sosial masyarakat Jawa,

juragan atau majikan menempati struktur yang cukup tinggi. Meskipun dengan perbedaan status tersebut keluarga TKI menjadi lebih sejahtera dibanding ketika sebagai petani gurem karena selama menjadi petani gurem keluarga petani tersebut tidak mungkin berinvestasi karena keterbatasan lahan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian para keluarga petani tersebut telah mengalami penurunan status dari seorang “*juragan*” di negeri sendiri menjadi seorang “*buruh*” di negeri orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Jusuf Harsono dan Slamet Santoso, 2005, “*Solidaritas Mekanik dan Survivalitas Pengusaha Muslim Perkotaan di Ponorogo*”, Jurnal Penelitian Fenomena ISSN 1693-8038, Vol. 2, No. 1, Januari 2005, LPPM Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Khoirurrosyidin, 2008, “*Pola Aliran Uang Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Ponorogo*”, Jurnal Penelitian Fenomena ISSN 1693-8038, Vol. 5, No. 1, Januari 2008, LPPM Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Michael Sherraden, 2006, “*Aset Untuk Orang Miskin Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arif Budiman, 2000, “*Teori Pembangunan Di Dunia Ketiga*”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

BIODATA PENULIS



Drs. JUSUF HARSONO, M.Si., lahir di Madiun tanggal 13 Januari 1962. Menamatkan Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Pasca Sarjana Program Studi Magister Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Sampai saat ini aktif sebagai tenaga pengajar pada FISIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Beberapa penelitian yang telah didanai oleh Ditjen Dikti Depdiknas RI, antara lain: 1) *Dinamika Perubahan Struktur Sosial Para Warok Ponorogo* (2004); 2) *Solidaritas Mekanik Masyarakat dan Survivalitas Pengusaha Muslim Perkotaan di Ponorogo* (2005); 3) *Tradisi Larung Risalah di Ngebel Ponorogo* (2005); 6) *Pluralitas Sikap Politik Warga Muhammadiyah Ponorogo Pada Pemilukada Tahun 2005* (2008); 7) *Pedoman Pembuatan Perangkat Kesenian Reyog Ponorogo sebagai upaya mempertahankan dan melestarikan budaya Adiluhung* (2009); 8) *Pola Solidaritas dan Mobilitas Kelompok Pedagang Angkringan di Ponorogo* (2012-2013), dan 9) *Dadhak Merak Reyog Ponorogo Berbahan Baku Substitusi Kulit Macan dan Kendala Mitos Lokal* (2015-2016).

Aktif menulis di media massa dan menjadi instruktur/pemakalah dalam pertemuan ilmiah, yaitu antara lain: 1) *Grebeg Suro, Ritual Religi-Kultural Menuju Ritual Sosial-Ekonomi* (April 2000); 2) *Konsep Otonomi Mampu Diterima Ponorogo* (September 2000); 3) *Mobilitas Sosial Para Warok* (Pebruari 2003); 4) *Grebeg Suro dan Depolarisasi Sosial* (Pebruari 2004); 5) *Memahami Perayaan Suro dari Perspektif*

Ekonomi Kemasyarakatan (Maret 2004); 6) *Etika Dan Moral Politik Menyongsong Pilkada Bupati Ponorogo Tahun 2010* (Seminar di Bakesbanglinmas Ponorogo, 4 Desember 2009); 7) *Perubahan Sistem Pemilu Di Indonesia* (Seminar di KPUD Ponorogo, 10 Juni 2010); 8) *Plus Minus Penyelenggaraan Pemilukada Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2010* (Seminar di BEM FISIP Unmuh Ponorogo, 8 Desember 2010); 9) *Ponorogo Potensial Target NII* (April 2011); 10) *Menuju Masyarakat Ponorogo Yang Transparan; Merespon Diundangkannya UU KIP tahun 2008* (Dialog Publik di PMII Ponorogo, 28 Februari 2011); 11) *Sektor Informal Menunggu Sentuhan Kebijakan Pemkab Ponorogo* (Diklat oleh Dinas Indakop Po 26 April 2011); dan 12) *Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Pengaruhnya Terhadap Penurunan Peran Tokoh Informal Dalam Sosial Politik Pada Masa Reformasi* (Seminar Seminar oleh FISIP Unmuh Ponorogo tgl 30 Mei 2011).



SLAMET SANTOSO, SE., M.Si., lahir di Ponorogo pada tanggal 16 Oktober 1970. Menamatkan Sarjana Ekonomi Jurusan IE-SP di Universitas Brawijaya Malang dan Pasca Sarjana Program Studi Magister Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Sampai saat ini aktif sebagai tenaga pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Beberapa penelitian yang telah didanai oleh Ditjen Dikti Depdiknas RI, antara lain: 1) *Dampak Wanita yang Bekerja di Luar Rumah terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga* (1998); 2) *Dinamika Perubahan Struktur Sosial Para Warok Ponorogo* (2004); 3) *Survivalitas Pedagang Warung Hik (Warung Angkringan) di Kota Ponorogo* (2006); 4) *Analisis Potensi Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo* (2007); 5) *Dampak Program Gerdu-Taskin terhadap Perkembangan Pokmas Industri Roti di Desa Kalimalang Kabupaten Ponorogo*

(2007), 6) *Pola Solidaritas dan Mobilitas Kelompok Pedagang Angkringan di Ponorogo (2012-2013)*, 7) *Pengembangan Model Sistem Informasi Retribusi Parkir Berbasis Web Untuk Mewujudkan Transparansi Keuangan Daerah Di Kabupaten Ponorogo (2014-2015)*, dan 8) *Dadhak Merak Reyog Ponorogo Berbahan Baku Substitusi Kulit Macan dan Kendala Mitos Lokal (2015-2016)*.

Hasil karya yang telah diterbitkan dalam bentuk buku: 1) *Statistika Deskriptif* (Penerbit Ardana Media Yogyakarta ISBN 979-111-926-0, bulan Maret 2009); 2) *Statistika Induktif: Plus Aplikasi Analisis Regresi dengan Program SPSS* (Penerbit Ardana Media Yogyakarta ISBN 979-111-929-9, bulan Mei 2009); 3) *Metode Penelitian Kuantitatif: Plus Aplikasi Program SPSS* (Penerbit P2-FE Universitas Muhammadiyah Ponorogo, ISBN 978-602-98008-1-4, bulan Oktober 2010), 4) *Statistika* (Penerbit UMPO Press, ISBN 979-1068-25-9, bulan Nopember 2011), 5) *Statistika Ekonomi Plus Aplikasi SPSS* (Penerbit UMPO Press, ISBN 979-1068-61-5, bulan Maret 2013) 6) *Sosiologi Masyarakat Ponorogo* (Penerbit Univ. Muhammadiyah Ponorogo Press, ISBN 978-602-97947-1-7, bulan Juli 2013), dan 7) *Penelitian Kuantitatif; Metode dan Langkah Pengolahan Data* (Penerbit Univ. Muhammadiyah Ponorogo Press, ISBN 978-602-0815-03-9, bulan Juli 2015).

